## INVENTARIS ARSIP DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 1946-1969



## DIREKTORAT PENGOLAHAN DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2017

#### KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan, tentang mengamanatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis yang dikelola ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sumber informasi publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengelolaan arsip statis, maka khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap.

Pada Tahun Anggaran 2016, salah satu program kerja Sub Direktorat Pengolahan Arsip I yang berada di bawah Direktorat Pengolahan adalah menyusun Inventaris Arsip Departemen Kehakiman Republik Indonesia (RI) Tahun 1946-1969. Inventaris arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis Departemen Kehakiman RI yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip.

Kami menyadari bahwa inventaris ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami senantiasa mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan ke depannya. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan semua pihak yang telah membantu penyusunan inventaris arsip ini hingga selesai. Semoga Allah SWT membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. Amin.

> Jakarta, Januari 2017 Direktur Pengolahan,

#### Azmi

## **DAFTAR ISI**

K	ATA	PE	NGANTAR	i
D.	AFT.	AR I	ISI	ii
I.	PEN	NDA	.HULUAN	iv
	A.	Seja	arah Organisasi	iv
	B.	Sejarah Arsipv		
C. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip			tanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip	v
		1.	Pengolahan Arsip	v
		2.	Petunjuk Akses Arsip	vi
			a. Penggunaan Inventaris Arsip	vi
			b. Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data	ix
II.	UR	AIA	N DESKRIPSI ARSIP	1
	A. Kesekretariatan			1
		1.	Perencanaan	1
		2.	Kepegawaian	2
		3.	Keuangan	21
		4.	Perlengkapan	30
		5.	Organisasi dan Tata Laksana	37
		6.	Ketatausahaan	42
		7.	Hubungan Masyarakat	44
	B.	B. Peradilan		74
	C.	Pen	nasyarakatan	86
D. Hukum		kum	95	
		1.	Perundang-undangan	95
		2.	Ketatanegaraan	137
		3.	Kewarganegaraan	142
		4.	Keimigrasian	144
		5.	Keperdataan	151
			a. Pencatatan Sipil	151
			b. Pengurusan Harta Peninggalan	156

c. Pertanahan	. 165
d. Kenotariatan	. 171
e. Pengakuan Badan Hukum	. 173
LAMPIRAN	. 228
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Susunan dan Tugas	
Kewajiban Kementerian Kehakiman	. 228
2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/4/4 tanggal 12 Februari 1964	
tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman	. 237
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S. 4/4/24 tanggal 27 Januari 1965	5
tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman	. 245
4. Daftar Istilah	. 254
5. Daftar Singkatan	. 261
6. Indeks	. 264

#### I. PENDAHULUAN

### A. Sejarah Organisasi

Departemen Kehakiman RI merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan tugas pokok yaitu mengurus hal-hal mengenai pengadilan, penjara, kejaksaan, dan kadaster. Pada awalnya, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1945 tentang Badan-badan dan Peraturan Pemerintah Dulu, tugas Departemen Kehakiman RI masih mengacu pada tugas Departement van Justitie sebagaimana tercantum dalam Staatsblad 1924 Nomor 576 ayat (2) dengan dikurangi beberapa tugas yang dialihkan kepada Departemen Sosial/Perburuhan dan Departemen Penerangan. Hingga pada tahun 1948, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Peraturan Susunan dan Pimpinan Kementerian dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Susunan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman sebagai dasar organisasi Departemen Kehakiman RI.

Pada perkembangannya, seiring dengan perubahan konstelasi politik pemerintahan, organisasi Departemen Kehakiman RI telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1952 tentang Susunan Kementerian Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Februari 1964 Nomor J.S.4/4/4 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman. Namun pada prinsipnya, perubahan tersebut tidak merubah secara signifikan fungsi pokok dari Departemen Kehakiman RI itu sendiri, yang meliputi peradilan, pemasyarakatan dan pelayanan hukum, baik hukum perundang-undangan, ketatanegaraan, kewarganegaraan, keimigrasian, maupun keperdataan.

Hingga saat ini, nama Departemen Kehakiman RI telah berubah beberapa kali disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut, yaitu Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI (1999-2001), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (2001-2004), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (2004-2009), dan sejak 2009 berubah menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

#### B. Sejarah Arsip

Arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969 diserahkan ke ANRI diperkirakan pada 1975. Hal ini didasarkan pada Lampiran Surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 1975 1985/Set.Kab/U-10/75. Lampiran tersebut berupa tiga buku berisi Daftar Arsip Departemen Kehakiman RI. Selain itu, terdapat satu buku berisi Daftar Arsip Departemen Kehakiman RI yang disusun oleh ANRI pada 1982 sebagai pelengkap lampiran surat. Pada 1988, arsip Departemen Kehakiman RI dijadikan bahan praktik magang bagi pegawai baru di ANRI.

Arsip Departemen Kehakiman RI berjumlah 102 boks atau sekitar 20,4 meter linier yang memuat informasi mengenai penyelenggaraan fungsi Departemen Kehakiman RI dalam kurun waktu (1946-1969). Arsip ini merupakan arsip bermedia kertas dengan kondisi tidak teratur dan terdapat arsip yang rusak.

#### C. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip

#### 1. Pengolahan Arsip

Arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969 baru pertama kali diolah oleh ANRI untuk menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa inventaris arsip. Pengolahan dilakukan oleh tim kerja berdasarkan Surat Perintah Nomor KN.02.01/350/2016 tentang Tim Penyusun Inventaris Arsip Departemen Kehakiman RI 1945-1976 terdiri atas Azmi (penanggung jawab kegiatan), Retno Wulandari (penanggung jawab teknis), Khoerun Nisa Fadillah (koordinator), Sari Diana (sekretaris), dengan anggota Wiyaningsih, Widhi Setyo Putro, Dewi Mayang Sari, Titik Kurniawati, Hasna Fuadilla Hidayati, Wulandari, Catur Rahmawati Tejaningrum, dan Nugrahita Rizky.

Pengolahan dan penyusunan **Inventaris** Arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969 dilaksanakan selama dua belas bulan, mulai Januari s.d. Desember 2016. Prosedur pengolahan arsip mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dan Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah (SOP AP) di Lingkungan Direktorat Pengolahan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyusunan Inventaris Arsip Statis.

Prosedur pengolahan Arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969 dilaksanakan melalui tahap persiapan, identifikasi, penyusunan rencana teknis, penelusuran sumber data dan referensi, penyusunan skema sementara, rekonstruksi, deskripsi, manuver data, penyusunan skema definitif, penomoran definitif, manuver fisik, penomoran arsip, pemberian label arsip dan penataan dalam boks arsip, pemberian label boks, penataan boks, penyusunan draf inventaris arsip, penilaian dan uji petik, finalisasi inventaris arsip, verifikasi dan validasi, ekspose, penyempurnaan dan pengesahan, penggandaan, penjilidan dan distribusi, serta dokumentasi.

Pengaturan unit informasi arsip Departemen Kehakiman RI Tahun 1946-1969 dilakukan berdasarkan analisis fungsi organisasi Departemen Kehakiman RI pada kurun waktu 1946-1969, yaitu meliputi empat kelompok besar. Pertama adalah kesekretariatan yang terdiri atas perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, serta hubungan masyarakat. Kedua adalah peradilan. Ketiga adalah Pemasyarakatan. Keempat adalah hukum yang terdiri atas perundang-undangan, ketatanegaraan, kewarganegaraan, keimigrasian, dan keperdataan yang meliputi pencatatan sipil, pengurusan harta peninggalan, pertanahan, kenotariatan, dan pengakuan badan hukum.

#### 2. Petunjuk Akses Arsip

#### a. Penggunaan Inventaris Arsip

Inventaris Arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969 merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis Departemen Kehakiman RI yang tersimpan di ANRI. Inventaris ini terdiri atas pendahuluan, uraian deskripsi arsip, penutup, daftar pustaka, lampiran yang memuat peraturan-peraturan terkait organisasi Departemen Kehakiman, daftar istilah, daftar singkatan, dan indeks. Inventaris ini memuat 1291 nomor arsip dan tersimpan dalam 102 boks.

Untuk efektivitas penelusuran arsip yang terdapat dalam Inventaris Arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969, sebaiknya pengguna arsip statis (*user*) di ANRI perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membaca seluruh pendahuluan inventaris arsip, karena dalam pendahuluan terdapat informasi mengenai sejarah arsip dan organisasi Departemen Kehakiman RI, serta pertanggungjawaban pembuatan Inventaris Arsip Departemen Kehakiman RI oleh Tim ANRI, yang didalamnya terdapat gambaran mengenai skema pengaturan arsip Departemen Kehakiman RI. Hal ini akan membantu pencarian arsip karena pengguna dapat mengetahui arsip yang dicari berada pada kelompok apa. Contohnya, untuk mengetahui arsip tentang pemberian grasi bagi narapidana, pengguna dapat melihat pada kelompok Pemasyarakatan.
- b. Memperhatikan daftar isi inventaris arsip secara keseluruhan, karena di daftar isi terdapat kelengkapan inventaris secara utuh sehingga pengguna tahu bahwa inventaris ini juga disertai lampiran yang berisi peraturan-peraturan terkait organisasi Departemen Kehakiman RI, daftar istilah, daftar singkatan, dan indeks yang dapat membantu pengguna dalam mencari informasi atas nama-nama, istilah-istilah dan singkatan-singkatan yang terkandung dalam arsip.
- c. Untuk mencari nama orang, nama lembaga, tempat, dan masalah yang terdapat dalam khazanah arsip dapat menggunakan indeks yang disusun secara alfabetis.

Contoh pencarian melalui indeks:

Aceh, 123, 467, 1207.

Gondokusumo, Djodi, 455.

Jawatan Pendaftaran Tanah, 36, 937.

Konferensi Afro-Asia, 842.

Nomor pada indeks tersebut merujuk pada nomor inventaris.

d. Untuk mengetahui kepanjangan suatu singkatan atau makna istilah tertentu yang terdapat dalam deskripsi arsip, dapat menggunakan daftar singkatan dan daftar istilah yang disusun secara alfabetis.

Contoh:

Kepanjangan istilah DPR pada daftar singkatan terdapat pada kelompok singkatan yang dimulai dengan huruf "D".

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

Makna istilah *Appel* pada daftar istilah terdapat pada kelompok istilah yang dimulai dengan huruf "A".

Appel : bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.

e. Untuk mengakses inventaris arsip ini melalui prosedur di Ruang Layanan (Ruang Baca) ANRI, pengguna hanya menuliskan judul inventaris arsip dan nomor inventaris arsip.

Contoh:

827 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Kepala Kantor Imigrasi pada Komisariat Agung Indonesia tentang pengawasan terhadap orang-orang asing yang menghadiri konferensi-konferensi di Indonesia.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

15 November 1950 tembusan, salinan 3 lembar

Penulisan di formulir peminjaman:

Departemen Kehakiman RI 1946-1969 Nomor 827.

## b. Petunjuk Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data

Arsip sebagai rekaman kegiatan dan peristiwa merupakan sumber data primer untuk penelitian ilmiah. Penulisan kutipan penggunaan arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969 yang terdapat dalam inventaris ini sebagai sumber data penelitian/penulisan karya ilmiah dilakukan sebagai berikut.

#### Contoh:

Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris Arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969, Jakarta, 2016, Nomor Inventaris...

#### Atau:

ANRI, Inventaris Arsip Departemen Kehakiman RI 1946-1969, Jakarta, 2016, No. Inventaris ...

#### DAFTAR PUSTAKA

- Assidhiqqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ellis, Judith. 1993. *Keeping Archives*. Australia: Thorpe.
- Jimerson, Randall. C. 2003. American Archival Studies: Readings in Theory and Practice. Chicago: SAA.
- Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Simanjuntak, P.N.H. 2003. Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan.
- Simorangkir, JCT. 1985. Sejarah Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1945-1985. Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Sugihastuti, dan Siti Saudah. 2016. Buku Ajar Bahasa Indonesia Akademik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trijono, Rachmat. 2016. Kamus Hukum. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Walch, Timothy, dan Maygene F. Daniels. 1984. A Modern Archives Reader: Basic Readings on Archival Theory and Practice. Washington: National Archives and Records Services, U.S. General Services Administration.

#### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis.

#### **LAMPIRAN**

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1948 TENTANG

#### SUSUNAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10

Mei 1948 dan tanggal 2 Juli 1948, perlu menentukan lapang pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian

Kehakiman dalam sebuah Peraturan.

Mengingat: akan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948.

Mendengar: akan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 1 Agustus 1947 Nomor

M.30.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

# PERATURAN TENTANG LAPANG PEKERJAAN, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN.

#### Pasal 1

#### Lapang pekerjaan

Lapang pekerjaan Kementerian Kehakiman terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengenai Tata Hukum dan penyelidikan terhadap hal itu;
- b. Soal-soal Kewarganegaraan;
- c. Permintaan merubah nama;
- d. Memperlakukan peraturan bagi golongan Eropah untuk orang-orang yang tidak dikuasai oleh peraturan tersebut;
- e. Urusan Notaris;
- f. Urusan pengakuan sebagai badan hukum, dan persetujuan anggaran dasar Persekutuan Sero dan Koperasi;
- g. Urusan Pencatatan Jiwa;
- h. Urusan Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- i. Pengumpulan bahan-bahan statistik kejahatan dan pelanggaran;
- j. Urusan Harta Peninggalan dan Pusat Pendaftaran Surat Wasiat;

- k. Urusan Kepenjaraan, Urusan Pendidikan paksa dan Reklasering;
- 1. Urusan Pendaftaran Tanah;
- m. Kantor Milik Perindustrian;
- n. Daktiloskopi.

#### Susunan

Kementerian Kehakiman terdiri atas:

- 1. KANTOR PUSAT KEMENTERIAN yang dibagi-bagi atas bagian-bagian berikut:
  - A. Bagian Sekretariat Umum;
  - B. Bagian Hukum Tata Negara;
  - C. Bagian Hukum Sipil;
  - D. Bagian Hukum Kriminil;
  - E. Bagian Urusan Pegawai;
  - F. Bagian Perbendaharaan;
  - G. Bagian Undang-Undang.
- 2. JAWATAN-JAWATAN, ialah:
  - A. Jawatan Pengadilan;
  - B. Jawatan Kejaksaan;
  - C. Jawatan Kepenjaraan;
  - D. Jawatan Harta Peninggalan;
  - E. Jawatan Pendaftaran Tanah.
- 3. KANTOR-KANTOR ialah:
  - A. Kantor Milik Perindustrian;
  - B. Kantor Pusat Daktiloskopi.

#### Pasal 3

#### **Pimpinan**

Pimpinan Kementerian Kehakiman diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948.

#### Pasal 4

#### Tugas Kewajiban.

#### KANTOR PUSAT KEMENTERIAN.

- A. Bagian Sekretariat Umum:
  - I. Seksi Urusan Umum, mengurus:
  - a. Legalisasi dan legitimasi;
  - b. Koordinasi pekerjaan Kementerian;

- c. Dokumentasi dan penyimpanan surat-surat rahasia.
- II. Seksi Tata Usaha mengurus:
  - a. Penerimaan, pendaftaran dan pembagian surat-surat masuk;
  - b. Pendaftaran dan pengiriman surat-surat keluar;
  - c. Pengetikan dan arsip;
  - d. Pemungutan bea meterai dan bea legalisasi;
  - e. Perbendaan.
- III. Taman Pustaka.
- B. Bagian Hukum Tata Negara:
  - I. Seksi Umum mengurus:
    - 1. Penyelesaian soal-soal Hukum Tata Negara yang diserahkan kepada Kementerian Kehakiman:
    - 2. Penyelidikan soal-soal susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
  - II. Seksi Warga Negara mengurus:
    - 1. Permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (W.N.I.) dengan jalan naturalisasi;
    - 2. Pernyataan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia
    - 3. A. Pernyataan suka menjadi Warga Negara Indonesia Kembali;
      - B. Pernyataan tidak suka menjadi Warga Negara Indonesia lagi;
    - 4. Penerimaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai Warga Negara Indonesia;
    - 5. Permintaan perubahan nama bagi golongan Eropah, juga bagi golongan penduduk, yang menunjukkan diri seluruhnya atau sebagian kepada hukum sipil Eropah atas kemauan sendiri;
    - 6. Permintaan perubahan nama bagi golongan Bumiputera;
    - 7. Perlakuannya peraturan bagi golongan Eropa untuk orang-orang, yang tidak dikuasai oleh peraturan tersebut;
    - 8. Penyelidikan peraturan-peraturan, yang mengenai status Bumiputera, Timur Asing dan Eropah, yang selama belum ada kesatuan hukum masih berlaku.
- III. Seksi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat mengurus:

Segala sesuatu yang mengenai pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

- C. Bagian Hukum Sipil:
  - I. Seksi Hukum Sipil Umum.
    - A. Cabang Seksi Umum mengurus:
      - a. Hukum Intern;
        - 1. Hukum Sipil (termasuk agraria);
        - 2. Hukum Dagang (termasuk Pailit, asuransi laut);
        - 3. Hukum Islam;

- 4. Hukum Sipil Intergentiel;
- b. Hukum Sipil Internasional;
- c. Undang-Undang yang ada hubungannya dengan sekaliannya itu.
- B. Cabang Seksi Notariat mengurus:
  - a. pengangkatan, pemberhentian, izin beristirahat
  - b. cap, paraf, tanda tangan.
- Seksi Badan Hukum mengurus: II.
  - a. pengakuan perhimpunan sebagai badan hukum;
  - b. permohonan persetujuan atas anggaran dasar persekutuan sero (N.V., I.M.A.) dan koperasi (Stbl. 1933 Nomor 108).
- III. Seksi Pencatatan Jiwa mengurus:
  - 1. Pemberian petunjuk tentang kesulitan-kesulitan dalam hal pencatatan:
    - a. kelahiran;
    - b. kematian;
  - c. pengakuan nama;
  - d. pengakuan anak;
  - e. perkawinan;
  - f. perceraian.
  - 2. Upah (honorarium) pegawai-pegawai dan pendapatan dari kantorkantor Pencatatan Jiwa:
  - 3. Penyelidikan daftar-daftar di kantor Pencatatan Jiwa;
  - 4. Penyelidikan pencatatan jiwa buat seluruh Warga Negara Indonesia.

#### D. Bagian Kriminil mengurus:

Penyusunan dan usaha memperteguh organisasi negara, yang pengaturannya perlu dikuatkan dengan sanctie pidana dan yang berhubungan dengan tugas itu; bagian kriminil berkewajiban memberantas kriminaliteit dalam masyarakat (juga yang mempunyai sifat internasional) dengan tidak mengurangkan hak dan kewajiban kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta dimana perlu bekerja bersama-sama dengan lain-lain Kementerian, terutama Kementerian Kemakmuran, Sosial, Pertahanan, Dalam dan Luar Negeri.

- I. Seksi Hukum Kriminil Umum mengurus:
  - a. pembentukan peraturan-peraturan, pengeluaran maklumat-maklumat atau instruksi-instruksi;
  - b. pemberian usul atau nasehat kepada lain instansi.
- II. Seksi Grasi mengurus;

Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

III. Seksi Penyelidikan mengurus:

Penyelidikan peraturan pidana dari lain instansi.

IV. Seksi Statistik mengurus:

Pengumpulan bahan-bahan statistik kejahatan/ pelanggaran.

#### E. Bagian Urusan Pegawaian terdiri dari:

#### Seksi:

- I. Pegawai Kementerian, Pengadilan, Pendaftaran Tanah;
- II. Pegawai Kejaksaan dan Kantor lain;

#### Mengurus:

- 1. Surat-surat tentang hal-hal umum yang mengenai urusan pegawai;
- 2. Menyelenggarakan:
  - a) Pengangkatan;
  - b) pemberhentian;
  - c) kenaikan pangkat/gaji;
  - d) pemindahan;
  - e) pemberian istirahat;
  - f) pemberian uang kurinia dan lain-lainnya;

untuk semua pegawai dalam lingkungan Kehakiman.

Hakim dan Jaksa Tinggi diangkat/diberhentikan oleh P.J.M. Presiden atas usul Kementerian dengan nasehat Ketua Mahkamah Agung (untuk para Hakim) dan Jaksa Agung (untuk para Jaksa Tinggi).

Usul-usul (kenaikan pangkat dan mutasi) yang mengenai pegawai-pegawai dari Pengadilan-pengadilan harus melalui Pengadilan Tinggi dan yang mengenai Pegawai-pegawai dari Pendaftaran Tanah harus melalui Kantor Pejabatan Pendaftaran Tanah untuk nasehat.

Usul-usul yang mengenai para Jaksa harus melalui Kejaksanaan Agung (Kantor Cabang Kejaksaan Agung) sedangkan yang mengenai pegawai-pegawai lainnya hingga sekarang langsung ke Kementerian Kehakiman.

- Pengangkatan/pemberhentian, kenaikan golongan/gaji pekerja ditetapkan oleh Ketua/Pemimpin kantornya masing-masing Surat-surat penetapan harus dikirim kepada Kementerian (Urusan Pegawai) untuk diperiksa dan dijalankan.
- 4. Dokumentasi:

Mencatat segala mutasi-mutasi dari pegawai dan pekerjaan dalam:

- a) kartu-kartu pegawai (kartsystem); dan
- b) surat-surat riwayat.
- F. Bagian Perbendaharaan.

Seksi I (Anggaran) mengerjakan:

- a) anggaran pengeluaran dan pendapatan;
- b) pengawasan kredit anggaran yang diberikan;
- c) laporan bulanan, tahunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan anggaran.

#### Seksi II (pengeluaran) mengurus:

Segala pembayaran dengan Spmu. pada sesuatu Kas Negara/Kantor pos, memeriksa dan mendaftarkan daftar perhitungan beserta surat bukti (kwitansi-kwitansi) dari pemegang Kas kantor-kantor dan mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan pengeluaran.

Seksi III (pendapatan) mengurus:

- a) pemeriksaan dan pendaftaran laporan bulanan tentang pendapatan;
- b) laporan tahunan kepentingan anggaran penerimaan;
- c) segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan.

#### G. Bagian Undang-Undang mengurus:

Hal-hal yang diperintahkan oleh Menteri, mengenai (pembentukan) Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain, baik yang bersangkutan dengan Kehakiman sendiri, yang tidak termasuk kewajiban Bagian-bagian Hukum Tata Negara, Sipil, Kriminil, maupun yang datang dari Kementeriankementerian lainnya untuk diberi pertimbangan.

#### JAWATAN-JAWATAN:

- A. Pengadilan, menyelenggarakan tugas kewajiban yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
- B. Kejaksaan, menyelenggarakan tugas kewajiban yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
- C. Kepenjaraan, mengurus dan mengawasi penjara-penjara dengan perusahaannya.
  - I. Bagian Urusan penetapan tempat dan pendaftaran orang-orang hukuman:
    - 1. Menetapkan tempat dimana hukuman harus dijalankan dan hari habisnya hukuman;
    - 2. melakukan pendaftaran orang-orang hukuman;
    - 3. menyelidiki laporan bulanan;
    - 4. Melepaskan orang-orang hukuman;
    - 5. mencatat daftar-daftar hukuman disiplin guna pertimbangan pemberian ampun;
    - 6. Mengurus pelarian orang-orang hukuman;
    - 7. Memberi keterangan-keterangan tentang orang-orang hukuman yang akan dilepas dengan perjanjian;
    - 8. Menyelidiki dan mengerjakan usul-usul tentang pemberian pembebasan atau peringanan hukuman sebagai pengampunan (remissie);
    - 9. Memperlengkapi daftar-daftar cap jari (daktiloskopi);

- 10. Mengerjakan lain-lain hal yang mengenai penetapan tempat pendaftaran orang-orang hukuman.
- II. Bagian Perbendaan mengurus:
  - 1) perlengkapan rumah-rumah penjara dan pendidikan negara;
  - 2) pengumpulan dan pembagian bahan-bahan keperluan rumah-rumah penjara, pendidikan negara dan perusahaan-perusahaannya;
  - 3) penetapan harga dan pembagian hasil perusahaan tersebut;
  - 4) hal-hal lain yang berhubungan dengan perbendaan.
- III. Bagian Urusan Pegawai:mengerjakan segala sesuatu yang mengenai pegawai.
- IV. Bagian Statistik dan Dokumentasi: mengerjakan segala hal yang berhubungan dengan statistik dar dokumentasi kepenjaraan dan pendidikan paksa.
- V. Bagian Perusahaan:
   Mengerjakan segala hal yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan oleh jawatan kepenjaraan.
- VI. Bagian Keuangan:

  Memeriksa dan mengawasi tata usaha keuangan dari rumah penjara dan pendidikan negara.
- VII. Bagian Pendidikan Paksa dan Reklasering:
  - rumah-rumah 1. Mengurus dan menguasai pendidikan negara (Landopvoedingsgestichten) dengan perusahaan-perusahaannya, mengenai rumah-rumah pendidikan partikelir dan keluarga-keluarga yang merawat anak-anak yang diserahkan oleh hakim kepada Pemerintah, semuanya itu sebagai teratur dalam "Dwangopvoedingsregeling". (Stbl. 1917 Nomor 741 jo. 1925 Nomor 223 dan 656 dan 1926 Nomor 278);
  - 2. mengurus rumah-rumah pendidikan orang-orang dewasa yang segan bekerja, dengan perusahaan-perusahaannya (Landswerkinrichtingen termasuk dalam Herzien Inlandsch Reglement pasal 234a dan Stbl. 1936 Nomor 160 dengan perubahan-perubahannya);
  - 3. Mengurus semua hal reklasering.
- D. Urusan Harga Peninggalan dan Pusat Pendaftaran Surat Wasiat mengurus:
   Hal-hal yang mengenai golongan Eropah, Tionghoa, Arab dan lain golongan Timur Asing, perihal:
  - I. Segala kepentingan yang mengenai, baik dirinya maupun harta bendanya:
  - a. anak yang masih dibawah umur;
  - b. orang yang didalam perhubungan hukum oleh Hakim dicabut kekuasaannya untuk mengurus diri dan harta bendanya (dalam pengampunan).

- II. a. Harta dari orang yang didalam arti hukum tidak ada;
  - b. Peninggalan yang menurut hukum tidak ada ahli warisnya;
  - c. Pengampunan (curateele) seluruhnya didalam urusan pailit;
  - d. Harta Peninggalan dari seorang Warga Negara Negeri asing.
- III. Kepentingan diri anak yang masih didalam kandungan dan ayahnya meninggal dunia.
- IV. Segala sesuatu yang mengenai soal anak golongan Eropah dan Tionghoa yang belum dewasa didalam hubungannya hukum antara orang tua dan anak (ouderlijke macht, voogdij), didalam soal mana kepentingan anak tahadi mengharuskan Jawatan U.H.P. untuk campur tangan, selaku Badan Perwakilan (Voogdij Raad).
  - V. Pendaftaran surat-surat wasiat.
- E. Pendaftaran tanah mengurus:
  - 1. Pembuatan dan pemeliharaan surat-surat hak milik;
  - 2. Pengukuran persil dan pemberian surat ukur;
  - 3. Pemberian surat keterangan ahli ukur;
  - 4. pemberian keterangan dan kesempatan melihat turunan atau ketikan dari peta, register dan surat-surat yang tersimpan dalam kantor Pendaftaran Tanah;
  - 5. Segala hal yang mengenai pendaftaran hak milik yang diperintahkan oleh Pemerintah atau Menteri Kehakiman.

#### ORGANISASI-ORGANISASI LAINNYA.

- A. Kantor Milik Perindustrian:
  - a. Bagian pendaftaran cap dagang mengurus:
    - 1. Pendaftaran cap dagang;
    - 2. Pembaharuan pendaftaran cap dagang;
    - 3. Pemindahan hak atas pendaftaran cap dagang;
    - 4. Penghapusan hak atas pendaftaran cap dagang;
    - 5. Pengumuman tentang pendaftaran, pembaharuan, pemindahan dan penghapusan pendaftaran cap dagang;
    - 6. Pemberian penerangan dengan tulisan tentang cap dagang yang telah didaftarkan.
  - b. Bagian perlindungan atas pendapatan-pendapatan baru (octrooi) mengurus:
    - Pemeriksaan dan pemberian keputusan tentang boleh atau tidaknya sesuatu pendapatan baru diberi hak paten (octrooi).
- B. Kantor Pusat Daktiloskopi bertugas:
  - 1. Menetapkan syarat-syarat teraan jari (classificeeren);

- 2. Memeriksa (verifieeren) teraan jari dan memberikan hasil pemeriksaanpemeriksaan itu kepada pihak yang bersangkutan;
- 3. Menyimpan teraan tiga jari;
- 4. Memberikan laporan tentang teraan-teraan yang disampaikan kepadanya.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan Di Yogyakarta,

Pada Tanggal 30 Oktober 1948 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> Ttd. **SOEKARNO**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd. SOESANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan Pada Tanggal 30 Oktober 1948

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd. A.G. PRINGGODIGDO

## KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG

## TUGAS DAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEHAKIMAN NOMOR J.S. 4/4/4

#### MENTERI KEHAKIMAN

**Menimbang**: a. bahwa tugas dan organisasi Departemen Kehakiman perlu disesuaikan dengan pokok-pokok organisasi aparatur Pemerintahan Negara dan pedoman tata-kerdja;

b. bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak, sambil menunggu Keputusan Presiden jang dimaksud pada pasal 29
 Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1962 (disempurnakan) dan pasal 32 ajat 1 Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1962 (disempurnakan), maka tugas dan organisasi Departemen Kehakiman diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman;

**Mengingat**: a. Pasal 17 Undang-Undang Dasar;

b. Peraturan Presiden No. 4 dan 5 Tahun 1962 (disempurnakan);

c. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1963.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan**: TUGAS DAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEHAKIMAN sebagai berikut:

#### TUGAS

Tugas Departemen Kehakiman ialah membina kehakiman, penghukuman dan kehukuman, dan turut serta membangun dan mewujudkan masjarakat sosialis Indonesia jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

#### **ORGANISASI**

#### Pasal 1

Departemen Kehakiman dipimpin oleh seorang Menteri dibantu oleh tiga orang Pembantu Menteri dan terdiri atas :

- A. Kabinet Menteri.
- B. Staf Perentjana.
- C. Bagian Pengawas Keuangan.
- D. Direktorat-direktorat.
- E. Bagian Pembinaan Materiil, Personil dan Idiil.

- F. Badan-badan Pengadilan.
- G. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Direktorat dibagi dalam bagian-bagian, tiap bagian dibagi dalam seksiseksi dan tiap seksi dibagi dalam sub-sub seksi.

Pembagian dan pemberian tugas seksi-seksi dan sub-sub seksi dilakukan oleh Kepala Direktorat dengan persetudjuan Pembantu Menteri jang bersangkutan.

#### Pasal 3

Dalam lingkungan Departemen dapat dibentuk Lembaga dan Panitia.

## TATA – KERDJA

## Pasal 4

#### Menteri

Menteri Kehakiman bertugas:

- a. Menetapkan kebijaksanaan politik dalam bidang kehakiman, penghukuman dan kehukuman dengan mengindahkan kebidjaksanaan pemerintah jang ditetapkan oleh Presiden;
- b. Memimpin dan mengkoordinir pekerdjaan para Pembantu Menteri dalam menuniakan tugasnja sehari-hari/routine/administratip;
- c. Menjelesaikan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang ditugaskan oleh Presiden.

#### Pasal 5

#### Pembantu Menteri

Pembantu Menteri membimbing dang mengkoordinir Direktorat-Direktorat, untuk:

A. Pembantu Menteri Urusan Perundang-undangan;

Direktorat Pidana;

Direktorat Perdata;

Direktorat Perundang-undangan;

Direktorat Tata-negara.

B. Pembantu Menteri Urusan Pelaksanaan Teknis:

Direktorat Pemasjarakatan;

Direktorat Imigrasi;

Direktorat Milik Perindustrian;

Bagian Pembinaan Materiil, Personil dan Idiil.

C. Pembantu Menteri Urusan Administrasi :

Direktorat Administrasi.

## Pasal 6 Kabinet Menteri

- 1). Kabinet Menteri bertugas:
- a. Mempersiapkan surat-surat dan menjelenggarakan urusan-urusan jang bersifat chusus untuk Menteri Kehakiman, menjusun Atjara Kerja, perdjaanan, upatjacara dan protokol, mengerdjakan urusan politik, mengadakan hubungan masjarakat melalui segala alat penerangan, hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakjat, Madjelis Permusjawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Sekretariat Negara;
- b. mengurus dan menghimpun bahan-bahan jang diperlukan dalam membantu Menteri Kehakiman dalam pekerdjaannja jang berhubungan dengan Badan Pemerintah Tertinggi;
  - c. mengurus daerah perbatasan.
- 2) Kepala Kabinet bertanggung djawab langsung kepada Menteri Kehakiman.

## Pasal 7 Staf Perentjana

Staf Perentjana, jang terdiri dari para Pembantu Menteri, para Kepala Direktorat dan seorang Sekretaris, bertugas menampung bahan-bahan, mengolah dan merentjanakan hingga merupakan gagasan-gagasan untuk dilaksanakan baik atas prakarsa sendiri maupun atas perintah Menteri.

#### Pasal 8

#### **Bagian Pengawas Keuangan**

Bagian Pengawas Keuangan atas nama Menteri Kehakiman mengadakan pengawasan atas pemeliharaan dan penggunaan anggaran belandja dan perbendaan.

## Pasal 9 Direktorat

Direktorat bertugas melaksanakan sehari-hari policy Menteri.

#### Pasal 10

Direktorat Pidana dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas memelihara perundang-undangan serta menjelesaikan urusan sehari-hari dalam lapangan hukum pidana.

Direktorat Pidana terdiri dari:

- a. Bagian hukum pidana;
- b. Bagian grasi;
- c. Bagian Pengampunan lain-lain;
- d. Bagian daktiloskopi.

#### Pasal 11

Direktorat Perdata dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas memelihara perundang-undangan serta menjelesaikan urusan sehari-hari dalam lapangan hukum perdata.

Direktorat Perdata terdiri dari:

- a. Bagian hukum perdata;
- b. Bagian notariat;
- c. Bagian tjatatan sipil;
- d. Bagian badan-badan hukum;
- e. Bagian harta peninggalan, perwalian dan pendaftaran pusat wasiat;
- f. Bagian asuransi djiwa.

#### Pasal 12

Direktorat Perundang-undangan dikepalai oleh seseorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas memelihara perundang-undangan, mentjiapkan rantjangan undang-undang serta meneliti rantjangan perundang-undangan dari alin-lain instansi.

Direktorat Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Bagian hukum;
- b. Bagian dokumentasi dan research;
- c. Bagian hubungan departemen-departemen dan instansi-instansi.

#### Pasal 13

Direktorat Tata-negara dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas memelihara perundang-undangan serta menjelesaikan urusan sehari-hari dalam lapangan hukum tata-negara.

Direktorat Tata-negara terdiri dari:

- a. Bagian hukum tata-negara dan hukum antar Negara;
- b. Bagian urusan peradilan;
- c. Bagian kewarga-negaraan;
- d. Panitia Pemilihan Indonesia jang bertugas menjelenggarakan pemilihan umum untuk M.P.R. dan D.P.R.

Direktorat Pemasjarakatan dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas menjelenggarakan pemasjarakatan para narapidana dan anak piara Negara.

Direktorat Pemsjarakatan terdiri dari:

- a. Bagian umum;
- b. Bagian kepegawaian;
- c. Bagian pendidikan pegawai;
- d. Bagian keuangan;
- e. Bagian pengawasan keuangan;
- f. Bagian statistik, dokumentasi dan research;
- g. Bagian perlengkapan;
- h. Bagian bangun-bangunan;
- i. Bagian keamanan;
- j. Bagian kesehatan dan pengobatan;
- k. Bagian bimbingan sosial dan agama;
- 1. Bagian bimbingan sosial luar (extra mural);
- m. Bagian pendidikan;
- n. Bagian bimbingan dan pendidikan chusus (anak-anak dan pemuda);
- o. Bagian tata-usaha technis pemasjarakatan;
- p. Bagian operasi perusahaan;
- q. Bagian pengawasan dan perkembangan perusahaan;
- r. Bagian pengawasan dan perkembangan perusahaan;
- s. Bagian sekretariat Kepala Direktorat Pemasjarakatan;
- t. Bagian penerangan;

#### Pasal 15

Direktorat Imigrasi dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas :

- 1. menjaring masuknja orang asing ke Indonesia baik sebagai pengundjung maupun sebagai tenaga ahli jang diperlukan oleh Negara dan masjarakat;
- 2. memberantas pemasukan orang-orang asing ke wilajah Indonesia setjara tidak sah;
- 3. mengusut perbuatan-perbuatanb mengenai keluarnja orang-orang dari wilayah Indonesia;
- 4. menjelenggarakan pendaftaran dan statistik dari dan mengawasi orangorang asing jang berada di Indonesia.

Direktorat Imigrasi terdiri dari:

- A. a. Bagian inspektorat dinas urusan dalam;
  - b. Bagian inspektorat dinas urusan luar;

- B. a. Bagian purel;
  - b. Bagian research;
  - c. Bagian pendidikan;
  - d. Bagian kesedjahteraan pegawai;
  - e. Bagian keuangan;
  - f. Bagian perlengkapan dan bangunan;
  - g. Bagian urusan pegawai;
  - h. Bagian urusan sekretariat;
  - i. Bagian visa;
  - j. Bagian izin tinggal;
  - k. Bagian kewarga-negaraan dan exit/reentry-permit;
  - l. Bagian hukum;
  - m. Bagian arsip dan dokumentasi;
  - n. Bagian statistik;
  - o. Bagian pengawasan dan pengenjahan;
  - p. Bagian penahanan dan pengusutan.

Direktorat Milik Perindustrian dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil serta suatu Dewan Patent, dan bertugas menjelenggarakan undang-undang dan peraturan-peraturan jang mengatur perlindungan Milik Perindustrian serta menjelesaikan soal-soal jang berhubungan dengan milik perindustrian.

Direktorat Milik Pewrindustrian terdiri dari:

- a. Bagian administrasi;
- b. Bagian pendaftaraan merek;
- c. Bagian patent.

#### Pasal 17

Direktorat Administrasi dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas menjelesaikan urusan administrasi.

Direktorat Administrasi terdiri dari:

- a. Bagian sekretariat;
- b. Bagian kendaraan bermotor;
- c. Bagian kepegawaian;
- d. Bagian rumah tangga;
- e. Bagian pendidikan dan research;
- f. Bagian kesedjahteraan pegawai;
- g. Bagian keuangan.

#### **Bidang Chusus**

Bagian Pembinaan Materiil, Personil dan Idiil dikepalai oleh seorang kepala bagian dan bertugas membina bidang materiil, personil, idiil dan menjelenggarakan pertahanan sipil, indoktrinasi dan pemberian tanda-tanda kehormatan.

#### Pasal 19

Badan-badan pengadilan jang melakukan tugas peradilan diatur dalam peraturan tersendiri.

#### Pasal 20

Lembaga Pembinaan Hukum nasional bertugas:

- A. menyiapkan rantjangan-rantjangan peraturan perundang-undangan:
  - a. untuk meletakkan dasar-dasar tata-hukum nasional;
  - b. untuk menggantikan perundang-undangan jang tidak sesuai dengan tata-hukum nasional;
  - c. untuk masalah-masalah jang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- B. menjelenggarakan segala sesuatu jang diperlukan untuk menjusun peraturan dalam keadaan perundangan.

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 21

Semua pelaksanaan tugas jang masih didasarkan pada organisasi dan tatakerdja lama disesuaikan dengan tugas dan organisasi jang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini.

#### Pasal 22

Dengan berlakunja Keputusan Menteri Kehakiman ini, maka semua peraturan mengenai tugas dan organisasi Departemen Kehakiman tidak berlaku lagi.

#### Pasal 23

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini dilaksanakan menurut djiwa keputusan ini sambil menunggu keputusan lebih landjut.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta, pada tanggal 12 Pebruari 1964

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(A. ASTRAWINATA)

## Salinan disampaikan kepada:

- 1. Wakil Perdana Menteri I, II, III;
- 2. Semua Menteri Koordinator;
- 3. Semua Menteri;
- 4. Sekretariat Negara;
- 5. Badan Pengawas Keuangan;
- 6. Lembaga Administrasi Negara;
- 7. Kantor Urusan Pegawai;
- 8. Semua Direktorat dan kantor-kantor dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

## KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN

## NO. J.S. 4/4/24

#### **TENTANG**

#### TUGAS DAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEHAKIMAN

#### MENTERI KEHAKIMAN

Menimbang

- : a. bahwa guna menyempurnakan cara kerja dalam pelaksanaan tugas-Kewajiban Departemen Kehakiman perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 12 Pebruari No. J.S. 4/4/4;
  - b. bahwa berhubungan dengan keadaan jang mendesak, sambil menunggu Keputusan Presiden jang dimaksud pada pasal 29 Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 (disempurnakan) dan pasal 32 ajat 1 Peraturan Presiden No.5 tahun 1962 (disempurnakan), maka Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman;

Mengingat

- : a. Pasal 17 Undang-Undang Dasar;
  - b. Peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);
  - c. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: TUGAS DAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEHAKIMAN sebagai berikut:

## Pasal 1 TUGAS DEPARTEMEN

Tugas Departemen Kehakiman ialah melaksanakan kebidjaksanaan Pemerintah dalam membina Kehakiman kearah terwujudnja Masjarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur berazaskan Pantjasila.

## Pasal 2 ORGANISASI DEPARTEMEN

Departemen Kehakiman dipimpin oleh seorang Menteri dengan dibantu oleh :

- Pembantu Menteri urusan Hukum;
- Pembantu Menteri urusan Pelaksanaan Tehnis;
- Pembantu Menteri urusan Administrasi;
- Pembantu Menteri urusan Chusus.

Departemen Kehakiman terdiri dari:

- A. Staf Perentjana.
- B. Direktorat-Direktorat:
  - Direktorat Pidana:
  - Direktorat Perdata;
  - Direktorat Perundang-undangan;
  - Direktorat Tatanegara;
  - Direktorat Urusan Pengadilan;

- Direktorat Pemasjarakatan;
- Direktorat Urusan Patent;
- Direktorat Daktiloskopi.

#### C. Biro-biro:

- Biro Menteri:
- Biro Politik dan Hubungan Masjarakat;
- Biro Pembinaan Materiil, Personil, dan Idiil;
- Biro Sekretariat dan Urusan Umum;
- Biro Keuangan;
- Biro Kepegawaian dan Kesedjahteraan Pegawai;
- Biro Pendidikan, Research dan Statistik.
- D. Badan-badan Pengadilan;
- E. Badan Pengawasan Keuangan;
- F. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional;
- G. Lembaga-lembaga Perguruan Tinggi.

#### Pasal 3

Direktorat dan Biro dibagi dalam Bagian-bagian, tiap Bagian dibagi Seksi-seksi dan tiap Seksi dalam Sub-sub Seksi.

Direktorat untuk mengadakan tugasnja dapat mengadakan satuan organisasi lainnja dengan persetudjuan Menteri.

Pembagian dan pemberian tugas Bagian-bagian, Seksi-seksi dan Sub-sub Seksi dilakukan oleh Kepala Direktorat/ Kepala Biro dengan Persetudjuan Meneteri.

Pembagian dan pemberian tugas Badan-badan dan Lembaga-lembaga ditetapkan oleh masing-masing kepalanja dengan persetujan Menteri.

#### Pasal 4

Dalam lingkungan Departemen oleh Menteri dapat dibentuk Panitya-panitya, Dewan-dewan dan Badan-badan.

## Pasal 5 MENTERI

Menteri bertugas memimpin Departemen dengan menetapkan kebidjaksanaan politik dan adminstrasip dalam bidang Kehakiman, dengan mengindahkan kebidjaksanaan Pemerintah.

## Pasal 6 PEMBANTU MENTERI

Pembantu Menteri bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas Menteri sebagai termaksud dalam pasal 5.

Pembantu Menteri mengkoordinir dan mengawasi Direktorat-dierktorat, Birobiro dan satuan-satuan organisasi lainnja.

- A. Pembantu Menteri Urusan Hukum mengkoordinir dan mengawasi:
  - 1. Direktorat Pidana;

- 2. Direktorat Perdata;
- 3. Direktorat Perundang-undangan;
- 4. Direktorat Tatanegara.
- B. Pembantu Menteri Urusan Pelaksanaan Teknis mengkoordinir dan mengawasi :
  - 1. Direktorat Pemasjarakatan;
  - 2. Direktorat Urusan Patent;
  - 3. Direktorat Daktilaskopi;
  - 4. Lembaga-lembaga Perguruan Tinggi.
- C. Pembantu Menteri Urusan Administrasi mengkoordinir dan mengawasi :
  - 1. Biro Sekretariat dan Urusan Umum;
  - 2. Biro Keuangan;
  - 3. Biro Kepegawaian dan Kesedjahteraan Pegawai;
  - 4. Biro Pendidikan, Research dan Statistik;
  - 5. Badan Pengawasan Keuangan.
- D. Pembantu Menteri Urusan Chusus mengkorrdinir dan mengawasi :
  - 1. Direktorat Urusan Pengadilan;
  - 2. Biro Menteri;
  - 3. Biro Politik dan Hubungan Masjarakat;
  - 4. Biro Pembinaan Materiil, Personil dan Idiil.

## Pasal 7 STAF PERENTJANA

Staf Perentjana terdiri dari Menteri sebagai Ketua, para Pembantu Menteri sebagai Wakil-wakil Ketua, Kepala-kepala Direktorat/Biro/Lembaga/Badan-badan serta pendjabat-pendjabat lainnja jang ditundjuk oleh Menteri sebagai anggota.

Staf Perentjana bertugas mengumpulkan bahan-bahan mengolahnja dan mempersiapkan rentjana-kerdja Departemen Kehakiman.

## Pasal 8 DIREKTORAT, BIRO, BADAN DAN LEMBAGA

Kepala-kepala Direktorat, Biro, Badan dan Lembaga bertugas memimpin pelaksanaan kebidjaksanaan Menteri untuk Direktorat, Biro, Badan dan Lembaga-lembaga masing-masing dan bertanggungdjawab langsung kepada Menteri.

## Pasal 9 DIREKTORAT PIDANA

Direktorat Pidana dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas memelihara perundang-undangan serta menjelesaikan urusan sehari-hari dalam lapangan Hukum Pidana.

Direktorat Pidana terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Hukum Pidana;
- c. Bagian Grasi;

d. Bagian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

## Pasal 10 DIREKTORAT PERDATA

Direktorat Perdata dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas memelihara Perundangan-undangan serta menjelesaikan urusan sehari-hari dalam lapangan Hukum Perdata.

Direktorat Perdata terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Hukum Perdata;
- c. Bagian Notariat;
- d. Bagian Tjatatan Sipil;
- e. Bagian Badan-badan Hukum;
- f. Bagian Harta Penimnggalan dan Perwalian.

## Pasal 11 DIREKTORAT PERUNDANG-UNDANGAN

Direktorat Perundang-undangan dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas membina, memelihara perundang-undangan, mejiapkan rentjana undang-undang serta meneliti rantjangan perundang-undangan dari lain-lain instansi.

Direktorat Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagain Hukum;
- c. Bagian Dokumentasi dan Research;
- d. Bagian Hukum Departemen-departemen dan Instansi-instansi.

## Pasal 12 DIREKTORAT TATANEGARA

Direktorat Tatanegara dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas memelihara perundang-undangan serta menjelesaikan urusan sehari-hari dalam lapangan Hukum Tatanegara.

Direktorat Tatanegara terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Hukum Tatanegara dan Antar Negara;
- c. Bagian Pewarganegaraan;
- d. Bagian Dwi-Kewarganegaraan;
- e. Panitya Pemilihan Indonesia.

## Pasal 13 DIREKTORAT URUSAN PENGADILAN

Direktorat urusan pengadilan dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas menjelesaikan segala sesuatu jang dan berguna

bagi kelentjaran djalannja tata-usaha pengadilan umum serta pengadilan-pengadilan chusus.

Direktorat Urusan Pengadilan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Susunan Pengadilan;
- c. Bagian Perlengkapan/Keuangan dan personalia;
- d. Bagian Hubungan Pengadilan-pengadilan Chusus termasuk Pengadilan-pengadilan Landreform.

#### Pasal 14

#### **DIREKTORAT PEMSJARAKATAN**

Direktorat Pemasjarakatan dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh tiga orang Pengawas umum dan bertugas menjelenggarakan Pemasjarakatan para Narapidana dan Anak piara Negara.

Tiap-tiap Pengawasan Umum dibantu oleh dua orang Asisten jang mengkoordinir bagian-bagian tertentu dari Direktorat Pemanjarakatan.

Direktorat Pemasjarakatan terdiri dari:

- 1. Kantor Kepala Direktorat Pemasjarakatan;
- 2. Kantor Urusan Pusat Direktorat dan Bagian-bagian:
  - 1. Tata Usaha Umum;
  - 2. Kepegawaian;
  - 3. Pendidikan Pegawai;
  - 4. Keuangan dan Perbendaan;
  - 5. Pengawasan Keuangan;
  - 6. Bangun-bangunan;
  - 7. Keamanan dan Tata-Tertib Narapidana dan Tahanan;
  - 8. Perawatan Narapidana dan Tahanan;
  - 9. Pendaftaran dan Pentjatatan Narapidana dan Tahanan;
  - 10. Bimbingan Sosial dan Agama bagi Narapidana dan Tahanan;
  - 11. Pendidikan Narapidana dan Tahanan;
  - 12. Pemasjarakatan Chusus, Dewasa-Muda, Pemuda dan Anak-anak piara Negara;
  - 13. Operasi Perusahaan;
  - 14. Pengawasan Perkembangan Perusahaan;
  - 15. Administrasi Perusahaan;
  - 16. Pertanian dan Perternakan (Farm Operation);
  - 17. Transmigrasi;
  - 18. Pekerdjaan Umum dan reservasi.

Dalam menjelenggarakan Pemasjarakatan para Narapidana dan anak-anak piara Negara, Direktorat Pemasjarakatan mempunjai satuan-satuan organik terdiri dari :

- 1. Wilajah Inspeksi Pemasjarakatan;
- 2. Daerah Pemasjarakatan;
- 3. Lembaga-lembaga Pemasjarakatan.

## Pasal 15 DIREKTORAT URUSAN PATENT

Direktorat Urusan Patent dikepalai oleh seorang Kepaa Direktorat dengan dibantu oleh seorang wakil dan bertugas menjelenggarakan peraturan peraturan mengenai perlindungan penemuan dan pentjiptaan.

Direktorat Urusan Patent terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian keuangan;
- c. Bagian Pegawai;
- d. Bagian Pendaftaran Merk;
- e. Bagian Patent dan Hak Tjipta;
- f. Bagian Hukum.

## Pasal 16 DIREKTORAT DAKTILOSKOPI

Direktorat Daktiloskopi dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas menjelenggarakan penjidikan djari dan melajani permintaan keterangan pengenal (indentifikasi) tentang seseorang.

Direktorat Daktiloskopi terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Pegawai;
- d. Bagian Umum;
- e. Bagian Sidik Djari;
- f. Bagian Fotografi.

## Pasal 17 BIRO MENTERI

Biro Menteri dikepalai oleh seorang Kepala Biro dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas :

- a. memperisapkan surat-surat dan sebagainja dan menjelenggarakan urusan-urusan jang bersifat chusus untuk Menteri, menjusunatjara perdjalanan, upatjara dan protokol, mengadakan hubungan dengan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.
- mengurus dan menghimpun bahan-bahan jang diperlukan dalam membantu Menteri Kehakiman dalam pekerdjaannja jang berhubungan dengan Badan Pemerintahan Tertinggi;
- c. menjelenggarakan urusan daerah perbatasan;
- d. urusan hubungan luar negeri.

Biro Menteri terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Hubungan Luar Negeri;
- c. Bagian Hubungan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi;
- d. Bagian Urusan Daerah Perbatasan dan Irian Barat.

#### BIRO POITIK DAN HUBUNGAN MASJARAKAT

Biro Politik dan Hubungan Masjarakat dikepalai oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas menjelenggarakan hal-hal jang berhubungan dengan politik dan mengadakan hubungan dengan masjarakat, Front Nasional, Partaipartai Politik dan Organisasi-organisasi Massa lainnja.

Biro Politik dan Hubungan Masjarakat terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Politik;
- c. Bagian Dokumentasi;
- d. Bagian Hubungan Masjarakat.

#### Pasal 19

#### BIRO PEMBINAAN MATERIIL, PERSONIL DAN IDIIL

Biro Pembinaan Materiil, Personil dan Idiil dikepalai oleh seorang Kepala Biro dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas membina bidang materiil, personil dan idiil serta menjelenggarakan urusan pertahanan sipil, indoktrinasi dan urusan pemberian tanda-tanda kehormatan.

Biro Pembinaan Materiil, Personil dan Idiil terdiri dari:

- a. Bagian Materiil;
- b. Bagian Personil;
- c. Bagian Idiil;
- d. Bagia Pertahanan Sipil;
- e. Bagain Pemberian Tanda-tanda Kehormatan.

#### Pasal 20

#### BIRO SEKRETARIAT DAN URUSAN UMUM

Biro Sekretariat dan Urusan Umum di kepalai oleh seorang Kepala Biro dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas menjelenggarakan Tata Usaha Departemen pada umumnja dan pengurusan/pelaksanaan soal-soal umum.

Biro Sekretariat dan Urusan Umum terdiri dari:

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Kendaraan bermotor.

#### Pasal 21

#### **BIRO KEUANGAN**

Biro Keuangan dikepalai oleh seorang Kepala biro dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas perentjanaan, pengurusan dan pelaksanaan keuangan.

Biro Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Anggaran;
- c. Bagian Otorisasi;
- d. Bagian Perlengkapan/Perbendahraan Umum.

#### BIRO KEPEGAWAIAN DAN KESEDJAHTERAAN PEGAWAI

Biro Kepegawaian Kesedjahteraan Pegawai dikepalai oleh seorang Kepala Biro dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas melaksanakan dan menjelenggarakan urusan kepegawaian dan kesedjahteraan Pegawai.

Biro Kepegawaian dan Kesedjahteraan Pegawai terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Penetapan Gadji;
- c. Bagian Pemberhentian dan Pensiun;
- d. Bagian Usaha;
- e. Bagian Kesehatan dan urusan Sosial;
- f. Bagian Olah Raga; Kerochanian dan Kesenian/Rekreasi.

#### Pasal 23

#### BIRO PENDIDIKAN, RESEARCH DAN STATISTIK

Biro Pendidikan dan Research dan Statistik dikepalai oleh seorang Kepala Biro dengan dibantu oleh seorang Wakil dan bertugas mengadakan usaha-usaha pendidikan dan latihan-latihan jang berentjana serta mengadakan penelitian-penelitian untuk mempertinggi mutu serta kemampuan kerdja para pegawai didalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Biro Pendidikan, Research dan Statistik terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Pendidikan;
- c. Bagian Perpustakaan;
- d. Bagian Research dan Statistik.

#### Pasal 24

#### BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

Badan Pengawasan Keuangan dikepalai oleh seorang Kepala dengan dibantu oeh seorang Wakil dan bertugas melakukan pengawasan umum terhadap pengurusan dan pemeriksaan keuangan dalam lingkungan Departemen.

Badan Pengawasan Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Pengawasan.

#### Pasal 25

#### LEMBAGA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dikepalai oleh seorang Kepala dan bertugas melaksanakan pembinaan Hukum Nasional sebagaimana jang dikehendaki oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam ketetapan No. II/MPRS/1960 dengan tudjuan mentjapai suatu tata hukum Nasional, jaitu dengan :

1) Menjiapkan rantjangan-rantjangan peraturan, perundang-undangan dengan berpedoman kepada :

- a. Ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;
- b. Kebidjaksanaan politik Menteri Kehakiman dalam pembinaan Hukum Nasional;
- 2) Menjelenggarakan research dan dokumentasi serta segala sesuatu jang diperlukan untuk menjusun peraturan perundangan.

# Pasal 26 KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Semua pelaksanaan tugas jang masih didasarkan pada organisasi dan tata-kerdja lama disesuaikan dengan tugas dan organisasi jang ditentukan dalam Keputusan Menteri kehakiman ini.

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman ini, maka semua peraturan mengenai tugas dan organisasi Departemen Kehakiman sebelumnja tidak berlaku lagi.

#### Pasal 28

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini dilaksanakan menurut djiwa keputusan ini sambil menungu keputusan lebih landjut.

#### Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

# Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 27 Djanuari 1965

#### MENTERI KEHAKIMAN

# Ttd. (A. ASTRAWINATA)

Salinan disampaikan kepada:

- 1. Wakil Perdana Menteri I, II, III;
- 2. Semua Menteri Koordinator;
- 3. Semua Menteri;
- 4. Sekretariat Negara;
- 5. Badan Pengawas Keuangan;
- 6. Lembaga Administrasi Negara;
- 7. Kantor Urusan Pegawai;
- 8. Semua Pembantu Menteri Kehakiman;
- 9. Semua Direktorat, Biro, dan Kantor-kantor dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

# **DAFTAR ISTILAH**

Abolisi

: Penghapusan oleh Presiden terhadap tuntutan, terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, terdakwa yang bersalah melakukan delik.

Agresi Militer

: Penyerangan suatu negara terhadap negara lain dengan menggunakan kekuatan militer.

Amnesti

: Penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu; Pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.

Appel

: Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.

Asimilasi

: Pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok.

Banding

: Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi.

Berita Negara

: Terbitan pemerintah, umunya memuat pemberitahuan pemerintah dan publik, misalnya pendirian badan hukum. Dengan diumumkannya suatu hal dalam Berita Negara, dianggap masyarakat luas sudah mengetahui hal tersebut dan oleh karenanya telah diikat secara umum.

Congestie

: Penumpukan kapal di pelabuhan.

Ekstradisi

: Penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminaltas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antar negara yang bersangkutan.

Errata

: Kesalahan tulis/cetak.

Exit-reentry permit

: Izin masuk kembali ke Indonesia bagi Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas.

Garis Demarkasi

: Garis pemisah yang ditentukan dalam perundingan gencatan senjata oleh pihak yang berperang.

Grasi

: Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Hak Eigendom

: Hak untuk menikmati dengan bebas dan menguasai mutlak sesuatu benda, asal tidak dipergunakan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan-peraturan lain dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, kesemuanya itu sekedar tidak diadakan pencabutan hak milik (*onteigening*) oleh Negara untuk kepentingan umum.

Hak enquete : Hak anggota badan legislatif untuk

mengadakan penyelidikan sendiri.

Hak *erfpacht* : Hak guna usaha.

Hak Immuniteit : Hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan

para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka

pengadilan.

Hukuman perjanjian : Dapat disebut juga dengan pidana bersyarat,

adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada

syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.

Kasasi : Upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan

Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi

diajukan kepada Mahkamah Agung.

Kennisgeving : Pemberitahuan.

Kodifikasi : Pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam

kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh

pemerintah.

Landbouw-concessie : Konsesi pertanian.

Likuidasi : Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum

yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa

kepada para pemegang saham (persero).

Merek

: Tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Militaire Bijstand

: Bantuan militer.

Nasionalisasi

: Proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri.

Naturalisasi

: Proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.

Obligasi

: Surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman (modal).

Orang hukuman

: Disebut juga Narapidana atau Terpidana, adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pampasan Perang

: Pembayaran yang secara paksa ditarik oleh pemenang perang kepada negeri yang kalah perang sebagaiganti rugi atas kerugian material. Pelepasan bersyarat

: Disebut juga pembebasan bersyarat, adalah bebasnya narapidana atau orang hukuman setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Pengadilan Negeri

: Pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing).

Pengadilan Tinggi

Pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) sesuatu perkara perdata dan/atau perkara pidana, yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama.

Penyitaan

Serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Perampasan

: Upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.

Persil

: Bidang tanah yang bentuk dan ukurannya menurut rencana untuk tempat mendirikan bangunan.

Rederij

Perusahaan pelayaran.

Rehabilitasi : Pemulihan harkat dan martabat seseorang yang

menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan,

atau hak-hak lain.

Repatriasi : Kembalinya suatu warga negara dari negara

asing yang pernah menjadi tempat tinggal

menuju tanah asal kewarganegaraannya.

Restitusi : Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau

pihak ketiga kepada korban atau keluarga korbn yang merupakan ahli warisnya, dapat berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk

tindakan tertentu.

Retribusi : Pungutan uang oleh pemerintah kepada

masyarakat yang menggunakan fasilitas yang

disediakan oleh negara.

Revisie : Bandingan perkara pidana dari Pengadilan

Negeri ke Pengadilan Tinggi.

Staats van Oorlog and Beleg : Keadaan Darurat/Keadaan Bahaya.

Tahanan Militer : Anggota tentara yang ditahan karena diduga

melakukan tindak pidana.

Tahanan Politik : Seseorang yang ditahan di rumah tahanan atau

tempat pembuangan (kamp konsentrasi) misalnya dalam kasus tahanan rumah, karena memiliki ide-ide atau pandangan yang dianggap menentang pemerintahan atau

membahayakan kekuasaan negara.

Tembakau Jenis Virginia : Tembakau asal Lombok yang kualitasnya

terbaik ketiga di dunia.

Testamenten : Wasiat, surat wasiat, kehendak terakhir, suatu

akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi

terhadap harta peninggalannya, setelah ia

meninggal dunia.

Unifikasi Hukum : Suatu langkah penyeragaman hukum atau

penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara

tersebut.

Verzet : Upaya hukum terhadap putusan yang

dijatuhkan di luar hadirnya tergugat.

Zoutmonopolie-Ordonnantie : Ordonansi Monopoli Garam.

#### DAFTAR SINGKATAN

A.A. : Afro-Asia

A.V.B. : Algemeene Volkscredietbank

ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

ALRI : Angkatan Laut Republik Indonesia

AOOR : Algemene Oorlogsongevallen Regelings

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B.E.P.R.I. : Badan Ekonomi Pedjoang RI

B.P.M : Bataafsche Petroleum Mij.

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bipora : Biro Pengawasan Orang Asing

BKM : Badan Keselamatan Masyarakat

DEPANRI : Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik

Indonesia

DPDS : Dewan Perwakilan Daerah Sementara

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRDS : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara

DPR-GR : Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

E.C.A : The Economic Cooperation Administration

GASBI : Gabungan Serikat Buruh Indonesia

GIA : Garuda Indonesia Airways

HIR : Herzien Inlandsch Reglement

HONET : Hotel Negara dan Tourisme

I.C.P.C. : International Criminal Police Commission

I.I.B.A.P.P.I. : Ikatan Importir Bahan-bahan dan Alat-alat Pertanian dan

Perikanan Indonesia

I.M.A. : Indonesis Maatschappy op Aandelen

IBP : Ikatan Boeroeh Perkeboenan

ICW : Indonesische Comptabiliteits Wet

ILO : Internasional Labour Organization

K.G.A. : Kursus Guru A

K.I.M. : Kartu Izin Menetap

KAMI : Kepanduan Angkatan Muda Islam

KLM : Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

KMB : Konferensi Meja Bundar

KPM : Koninklijke Paketvaart MaatschappijKPPN : Kantor Pusat Perbendaharaan Negara

M.A.I : Maskapai Andil Indonesia

MPRS : Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

NIT : Negara Indonesia Timur

NKRI : Negara kesatuan Republik Indonesia

NTB : Nusa Tenggara Barat

NTT : Nusa Tenggara Timur

NV : Naamloze Vennootschap

P.D.G.I. : Persatuan Dokter Gigi Indonesia

P.O.A. : Pendaftaran Orang Asing

P3R : Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat

Pangti : Panglima Tinggi

Pemilu : Pemilihan Umum

Perak NV : Persatuan Ekonomi Rakyat Kadipaten NV

Perbeta : Persatuan Bekas Tawanan

Perbum : Persatuan Buruh Minyak

Perpeni : Perhimpunan Penerbangan Indonesia

PKI : Partai Komunis Indonesia

PMD : Pembangunan Masyarakat Desa

PMI : Palang Merah Indonesia

PN : Perusahaan Negara

PNI : Partai Nasional Indonesia

PNPKK : Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PP : Peraturan Pemerintah

PP dan K : Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan

PPPTIT : Panitia Penyelenggara Perubahan Tata Negara Indonesia

Timur

PT : Perseroan Terbatas

R.T.D : Ruang Tanya Djawab

RI : Republik Indonesia

RIPPI : Rukun Ichtiar Perdagangan dan Pelajaran Indonesia

RIS : Republik Indonesia Serikat

RRI : Radio Republik Indonesia

RRT : Republik Rakyat Tiongkok

RUU : Rancangan Undang-Undang

S.B.D.P.P.K. : Serikat Buruh Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan

Kebudayaan

S.B.L.G.I. : Serikat Buruh Listrik & Gas Indonesia

S.B.P.K.B. : Serikat Buruh Perusahaan Kaju/Bangunan

S.P.M.A. : Sekolah Pertanian Menengah Atas

S.S.T.D. : Sourabaya Society of Teachers of Dancing

SMA : Sekolah Menengah Atas

SOB : Staats van Oorlog and Beleg

SPMA : Sekolah Pertanian Menengah Atas

SPSI : Serikat Pelajar Seluruh Indonesia

UU : Undang-undang

WNI : Warga Negara Indonesia

#### **INDEKS**

#### A

Abdulgani, Roeslan, 732.

Abednego, 988.

Abidin, Zainal, 293.

Abimanju Trading Company Limited, NV, 1220.

ABRI, 759.

Abuhanifah, 929.

Aceh, 124, 467, 1207.

Aceh Utara, 419.

Achmad, 438.

Achmad, H.Z.A., 621.

Achmadi, R, 302.

Achmadie, S, 906.

Adikarto, 767.

Affandi, Ali, 181, 245.

Agresi Belanda, 472.

Agresi Militer, 467.

Akademi Bahasa Asing Indonesia, 263.

Akademi Biologi, 724.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 626.

Al Gidjah Nahdi, S. Abud bin Umar, 923

Algemeen en Architecten en aannemings Mij. Roelands-Klaasen, NV, 1129.

Algemeen en Architecten, NV, 1200.

Algemeene Volkscredietbank, 548.

Alling, W.B.F.H., 1282.

ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia), 421.

Altena, van, 969.

Ambarawa, 321.

Ambon, 219, 775.

Amelz, 291.

Amerika, 828, 837.

Amerika Serikat, 652, 811.

Amsjah, Ali, 816.

Amsterdam, 1280.

Ang Kiem Go, 887.

Ang Uwie Kun, 844.

Angkatan Darat, 738.

Angkatan Kepolisian, 757.

Angkatan Kepolisian Negara, 758.

Angkatan Laut, 845.

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), 421.

Angkatan Perang, 574, 619.

Angkatan Udara, 1210.

Angkutan "Ubata", NV, 1199.

Anshary, M. Isa Anshary, 511.

Antara, 514.

Apotheek Rachmati, NV, 1236.

Apotheek Widjaja, NV, 1032.

Arab, 669, 761, 808, 809.

Architecten, Ingenieurs en Handelsbureau "Hoan Sie", NV, 1021.

Asean Games, 342.

Asia, 1050.

Asia Perusahaan Pekerjaan Kerajinan Karet, NV, 1162.

Assurantie Maatschappij de Nederlanden van 1845, NV, 946.

Australia, 728, 811.

Autedienst en Transportonderneming Bintang, 1014.

Azis, Andi, 469.

# В

B.P.M (Bataafsche Petroleum Mij.), 383.

B.P.M. Tanjung, NV, 942.

Badan Baitul Maal Banyuwangi, 992.

Badan Ekonomi dan Keuangan, 755.

Badan Ekonomi Pedjoang RI (B.E.P.R.I.), 1191.

Badan Penerbit "Pedoman", Perseroan Terbatas, 1083.

Badan Pengawasan Rahasia Negara RI, 284.

Badan Pengurus Serikat Pelajar Seluruh Indonesia, 372.

Badan Perniagaan Merdeka, NV, 1231.

Badan Pertimbangan Kebudayaan, 687.

Badan Pertimbangan Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi, 745.

Bagan Siapi-api, 523.

Bagat, Hasan, 523.

Bajasut, A., 809

Bajoangin, Kaliamas, 939.

Balai Harta Peninggalan, 122, 170, 731, 880, 884, 894, 896, 907, 913, 924, 925, 927.

Balai Perancang Tata Bumi, 388.

Bali, 11, 422, 1289.

Balikpapan, 78, 817.

Bandung, 74, 116, 119, 156, 170, 373, 456, 511, 695, 722, 889, 892, 898, 901, 904, 910, 934, 951, 955, 968, 977, 978, 985, 990, 1021, 1038, 1054, 1055, 1066, 1071, 1079, 1087, 1088, 1117, 1118, 1123, 1134, 1151, 1169, 1181, 1182, 1235, 1252, 1276.

Bangil, 256.

Bangka, 1, 1285.

Bangkalan, 57, 318, 490, 862.

Banjarmasin, 203, 237, 993, 1043, 1198.

Banjarnegara, 188.

Bank Indonesia, 146, 384, 700, 719.

Bank Negara Indonesia, 700.

Bank Pembangunan Indonesia, 700.

Bank Rakyat Indonesia, 172, 607.

Bank Tabungan Pos, 568.

Banyuwangi, 420, 992, 1017, 1137, 1224, 1291.

Bappenas, 749.

Barabai, 1043.

Barang, ZB, 421.

Barisan Demokrasi Baru, 835.

Barisan Sukarela, 588.

Bartstra, S, 910.

Basad Trading Company, NV, 1181.

Batavia, 901, 911.

Batraco, NV, 1160.

B'Bero, 860.

Bekasi, 467.

Belanda, 86, 89, 133, 298, 301, 354, 500, 652, 772, 764, 773, 783, 854, 916.

Belawan, 295.

Belitung, 1.

Bengkalis, 219.

Bengkulu, 177, 874, 1078.

Berge, Victor, 935.

Bergmeyer, W., 1097.

Berita Nasional ANTARA, 342.

Bien Sang Hang, NV, 1101.

Bijaksana, NV, 423.

Bilall, Sjiech, 418.

Billiton, 53, 1097

Billiton Maatschappij, NV, 1097.

Bima, 71, 255.

bin Abdat, Salim bin Awwab, 914.

bin Amir Baloewel, Achmad, 953.

bin Buang, Lim (Haji), 498.

bin Naser Albakri, Husin, 947.

bin Salim Abdat, Said bin Awad, 914.

bin Salim, Sajid Moehdar Bin Moehamad bin Akil, 920.

bin Salim, Sharifah Fatmah binti Agil bin Moehamad bin Agil, 920.

bin Umar Al Gidjah, Nahdi, S. Abud, 923.

Bintang Tunggal, PT, 1284.

binti Haji Saunin, Haji Ungi, 498.

Bipora, 820.

Biro Arsitek-Insinjur dan Anemer "Djayatama", 1266.

Biro Pemberantasan Penderitaan Rakjat-Djelata, 1264.

Biro Perancang Negara, 314.

Biro Rekonstruksi Nasional, 393.

Biro Usaha-usaha Pejuang Kemerdekaan Makassar, 998.

BKM (Badan Keselamatan Masyarakat), 234.

Blangkejeren, 247.

Blitar, 74, 1017, 1209.

Bloemenhandel Mevrouw Pesch, NV, 1205.

Blomkring, NV, 1169.

Bogor, 51, 157, 249, 406, 695, 709, 1183, 1185.

Bojonegoro, 164, 324, 926.

Bond van Melkveehouders Surabaya, 991.

Bondowoso, 399, 572.

Borsumy Surabaya, NV, 1237.

Bouw Maatschappij Henriette, NV, 1134.

Bouw Maatschappij Loyens & Volkmaars, NV, 1120.

Bouwen Handel Maatschappij Low Guan Bie, 917.

Boyolali, 129.

Brasseur, S., 1188.

Braun, Werner, 33.

Brawidjaja Trading Company, Persekutuan Dagang (NV), 1025.

British Embassy, 343.

Broonsgeest, 968.

Budaya, Mardi, 424.

Budiman, J., 805.

Buko, 1213.

Buol, 412.

```
\mathbf{C}
```

Campen, H. (Dr.), 377.

Centrale Stichting Wederopbouw, 647.

Ceylon, 346.

Chang Choon Trading Company (Limited), NV, 1102.

China, 349.

Chung Hua Tsing Nien Hui (Chung Hua), 989.

Chung Hua Tsung Hui, 997.

Ciamis, 864, 1011.

Cianjur, 1005, 1140.

Cikajang, 1187.

Cimahi, 891.

Cipinang, 82.

Cirebon, 87, 426, 879, 891, 1022, 1023, 1039, 1051, 1069, 1135, 1142, 1158.

Colombo Plan Exhibition, 348.

Consulat de Suisse, 347.

Cornetraedt, Cornelia Henriette Antoinette, 919.

Crefeld, J.W., 898.

Cultuur en Handel Maatschappij Tjihuni, NV, 1007.

Cultuur en Veeteeltmaatschappij Neusoe Oost, NV, 1172.

Cultuur Handel en Industrie Bank, 902.

Cultuur Maatschappij "Bukit Lawang", NV, 1273.

Cultuur Maatschappij Bajoelor, NV, 1017.

Cultuur Maatschappij Padabeunghar en Tedja, NV, 1158.

Cultuur Mij. Tempur Sewu, NV, 1240.

Cultuur My Koebang Kangkoeng, NV, 1066.

Customs Cooperation Council, 355.

# D

D.K.A., 302.

D.V.G Reglement, 352.

Dadapan, 1225.

Daerah Istimewa Yogyakarta, 304, 373.

Dagang dan Industri Hin Hia Jambi, NV, 379.

Dalits, J.L, 888.

Damai, PT, 1282.

Damen, B. (Dr.), 133.

Dardo, R., 86.

Darjatmi, 40.

Datawu, Asia, 938.

Dd., Moeljadi, 993.

de Bruin, Johannes, 875.

de Javasche Bank, 119, 123, 681, 901.

de Korte, J.Ph., 1197.

de Koste, W.F. Sornsen, 121.

de Wolff, J.D. Arendsen, 951.

Deli, 496, 943.

Delmaar, Johannes Adrianus Jacob Gerardus Willem, 950.

Demak, 1167.

Denpasar, 16, 71.

Departemen PP dan K, 959.

Depok, 184.

Dewan Ekonomi Indonesia Pusat, 300.

Dewan Ekonomi Keuangan, 670.

Dewan Exhibition Indonesia Pusat, 370.

Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa, 364.

Dewan Menteri, 6, 272, 275, 293, 304, 309, 354, 355, 363, 547, 549, 551, 554, 562, 568, 577, 586, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 599, 603, 604, 605, 606, 607, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 620, 676, 717, 732, 733, 770, 806, 807, 810, 840, 847, 1002, 1225.

Dewan Pembantu Penguasa Militer Tertinggi, 367, 622.

Dewan Pemerintah Daerah Sementara, 310, 956.

Dewan Penerbangan, 582.

Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia, 747.

Dewan Pengawas, 568.

Dewan Pengawas Keuangan, 157, 163, 169.

Dewan Pengurus Yayasan Karet Rakyat Pusat, 701.

Dewan Pertahanan, 676.

Dewan Perumahan Pusat, 365.

Dewan Perwakilan Rakyat, 290, 366, 511, 651, 808.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara, 564.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 758.

Dewan Perwalian, 930.

Dewan Pimpinan Gabungan Petani Kelapa Indonesia, 412.

Dewi Sri Sumatera, NV, 1093.

Dezentje, Willem, 875.

Dimita Moulding Industries Limited, 1259, 1268.

Dirdjosoebroto, Soetedjo, 282.

Direktorium Pelajaran, 407.

Djajadiredja, I., 87.

Djajak, 1196.

Djojodiguno, Sri Soenarni, 51.

Djokomardejo, 879.

DPD, 688.

DPDS, 722.

DPR, 274, 358, 359, 360, 361, 544, 557, 558, 560, 575, 585, 601, 602, 621, 624, 637, 697, 721, 722, 767, 807, 945.

DPRD, 263, 310, 673, 711.

DPRDS, 323, 683, 688.

DPR-G, 264.

DPR-GR, 746.

Drop, Johan Theodoor, 931.

Drop, Reinhard Diederik Govert, 931.

#### $\mathbf{E}$

E.C.A., 652.

Ekspor-Import Serich Scheineman, 296.

Electriciteit Maatschappij Bali en Lombok, NV, 741.

Ende, 1282.

Eng Choen, NV, 1018.

Eng Hoo Trading Company Ltd., NV, 1133.

Erikemmy Industrial Company Limited, NV, 1246.

Eropa, 392, 561, 801, 824, 870, 876.

Escomptobank NV, 473, 902.

Ex P.P.N. Sindoro-Sumbing, NV, 1217.

Export-Import Bank of Washington, 593, 594, 651.

# F

Fatah, Amir, 469.

Favoriet, NV, 1276.

Firma "Kwong Teng Jie", 817.

Firma Agence Générale, NV, 1188.

Firma Liem, 145.

Firma Parlin, 1210.

Front Marhaenis, 264.

# $\mathbf{G}$

Gabungan Ahli Gigi Tionghoa Perantauan Sumatera, 981.

Gabungan Pemborong Indonesia (G.A.P.I.), NV, 1252.

Gabungan Perserikatan Buruh Tani Tionghoa Diseberang Lautan, 834.

Gabungan Perusahaan Rokok Sunda Kecil, 1105.

Gabungan Petani Kelapa Indonesia Buol, 412.

Gadang, Bujung, 177.

Gapura, NV, 1015.

Garut, 1187.

GASBI, 971.

Geati, NV, 1281.

Geneva Convention, 347.

Gerakan Pemuda Ansor, 374.

Gereja Kristen Tionghoa, 988.

Geurtsen, A., 948.

GIA (Garuda Indonesia Airways), 300.

Gie Yoe, NV, 1189.

Gilchrist, H., 811.

Ginting, Nerus, 290.

Glodok, 428, 506.

Gombong, 1189.

Gondokusumo, 350.

Gondokusumo, Djodi, 455.

Gorontalo, 698, 938, 995, 1213.

Gresik, 669.

Grevelink, J.W.J., 270.

Grobogan, 876.

Gromyko, 732.

Gunung Sitoli, 1166.

# H

Hammacher, Hermanus G., 955.

Handel en Industrie Maatschappij "Jawa Baroe NV", 1238.

Handel en Industrie Maatschappij Branta-Sena, NV, 1270.

Handel en Industrie Mij Khing Hong, NV, 1085.

Handel Maatschappij "Djaga Satroe" merk Lam Seng, NV, 1051.

Handel Maatschappij "Mijtog", NV, 1088.

Handel Maatschappij "Seek An", NV, 1080.

Handel Maatschappij Guan Lie Chan, NV, 1229.

Handel Maatschappij Gwan Gwan, NV, 1224.

Handel Maatschappij Heng Hong, NV, 1053.

Handel Maatschappij Hoo Sing Liong, NV, 1155.

Handel Maatschappij Lie Pie Houw, NV, 1008.

Handel Maatschappij Liong Seng, NV, 1116.

Handel Maatschappij Nidya, NV, 1005.

Handel Maatschappij Serdit, NV, 1175.

Handel Maatschappij Thong Sing, NV, 1006.

Handel Maatschappij Tjin Guan Lie, NV, 1177.

Handel Maatschappij Toko Jakarta Company, NV, 1115.

Handel Maatschappij vh. Sin King en Co., NV, 1136.

Handel Maatschappij voorheem Wevery Audit, NV, 1123.

Handel Mij Pan Kie, NV, 1148.

Handel Mij Tay Lam Siong Hang, NV, 1142.

Handel Mij Ye Gwan Liong, NV, 1156.

Handelmaatschappij Liauw Njie Hap, NV, 1027.

Harahap, Hajat, 405.

Hardjosoemitro, 423.

Hardjowerdojo, 363.

Hari Bahari Nasional, 264.

Harian Rakjat, 339.

Harmsen Verwey dan Dunlop, NV, 1052.

Harta Pusaka, NV, 1211.

Hazairin (Dr.), 363, 949.

Het Indische Veem, NV, 1029.

Het Warenhuis, NV, 1122.

Hevea Latex and Rubber Works, NV, 1022.

Himpunan Saudara, NV, 1282.

Hobein, NV, 1098.

Hogerzeil, J.H, 883.

Hohmann-Huster (Nyonya), 825.

Holaubek, Josef, 743.

Hongaria, 352.

Hongkong, 675, 830, 845.

Hotel Dharma Nirmala, 921.

Hotel My Rietema, NV, 1044.

Hotelbedrijven Indonesia, NV, 1098.

Hua Chiao Ching Nien Lien Ho Hui (Ching Lien), 979.

```
Ι
```

I.M.A. Pamah Segedang, 1004.

Ibraco, NV, 1151.

Ibrahimy, M. Nur, 291.

Idham, 437.

Ikatan Boeroeh Perkeboenan, 971.

Ikatan Importir Bahan-bahan dan Alat-alat Pertanian dan Perikanan Indonesia (I.I.B.A.P.P.I.), 824.

Ikatan Penderitan Tjatjat Indonesia., 329.

ILO, 147.

Import Bahan Industrie, PT, 1241.

India, 612, 819.

Indonesia Kendaraan Motor, NV, 1150.

Indonesia Wood Corporation, NV, 1165.

Indonesia, NV, 1182.

Indonesian Agricultural Technical and Trading Company Pedatti, 1033.

Indonesian Import-Export & Trading Corporation, NV, 1047.

Indonesian Produce Trading Limited, NV, 1235.

Indonesian Trading Corporation "Samy", NV, 1079.

Indonesis Maatschappy op Aandelen (I.M.A.) "Sudara", 1004.

Indoswedia, NV, 1178.

Industrie en Handel Maatschappij Hap Goan, NV, 1019.

Industriebank, NV, 456.

Inggris, 254.

Inkenmo, NV, 1150.

Inpro, NV,1235.

Intag, NV, 1209.

Internasional Criminal Police Organization, 1002.

International Agencies, NV, 1209.

International Trading Company Limited, NV, 1024.

Intraco Ltd., NV, 1024.

Irian Barat, 341, 361, 757, 760, 777, 785, 789.

Iskandardinata, Oto R, 461.

# Istana Negara, 342.

# J

J.E. Bousche, 887.

Jacobson van den Berg & Co., NV, 1028.

Jakarta Llyod, 281.

Jalink, C.D, 931.

Jambi, 379, 659, 854, 956, 1160.

Jamblang, 1158.

Jamy, NV, 892.

Jansma, J. Andre, 991.

Jatinegara, 82, 498.

Javasche Administratie Mij., NV, 955.

Jawa, 285, 940.

Jawa Barat, 26, 70, 683.

Jawa Canning Company, NV, 1152.

Jawa Tengah, 27, 68, 148, 233, 512, 673, 857, 976.

Jawa Timur, 31, 60, 72, 191, 324, 393, 710, 726.

Jawatan Hubungan Perburuhan, 999, 1262.

Jawatan Imigrasi, 73, 259, 545, 635, 765, 811, 812, 816, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 828, 837, 841, 844.

Jawatan Kepenjaraan, 103, 280, 370, 502, 503, 508, 513, 517, 518, 521, 522, 524.

Jawatan Kepolisian Negara, 579.

Jawatan Kereta Api, 136.

Jawatan Koperasi Pusat, 1194.

Jawatan Pajak, 721.

Jawatan Pegadaian Negeri, 678.

Jawatan Pelayaran, 281, 583.

Jawatan Pendaftaran Tanah, 36, 937.

Jawatan Penempatan Tenaga, 680.

Jawatan Penempatan Tenaga Pusat, 706.

Jawatan Penerangan Pemerintah, 332.

Jawatan Perindustrian, 730.

Jawatan Perjalanan, 693.

Jawatan Perjalanan Negeri, 164.

Jawatan Transmigrasi, 680, 693.

Jawatan Urusan Umum Pegawai, 118, 273.

Jember, 899, 1156.

Jepang, 432, 708, 778, 780, 840.

Jepara, 59.

Jerman, 33, 825.

Jerman Timur, 821.

Jorgensen, 90.

Jumena, Musa Surianata, 815.

Jungschlaeger, 354.

Jusuf, H., 419.

# K

Kabinet Ali Sastroamidjojo, 364.

Kabinet Ampera, 362.

Kabinet Perdana Menteri, 108, 283, 352, 410, 665.

Kabinet Presiden, 34, 269, 396, 410, 416, 618, 641, 666, 703, 704, 1264.

Kadiman, R., 1064, 1150.

Kadipaten, 1193.

Kairupan, G.J.F.P., 970.

Kajuagung, 819.

Kalimantan, 28, 237, 317, 322, 581, 682, 1263.

Kalimantan Barat, 682.

Kalimantan Selatan, 238, 278.

Kalimas, NV, 1202.

Kamang Ltd., 1275.

Kandangan, 920.

Kantor Asuransi O.W.J. Schlenker, 918.

Kantor Berita A.P.B., 178.

Kantor Berita Antara, 335.

Kantor Besar Kehutanan, 302.

Kantor Besar Pos dan Telegrap, 199.

Kantor Catatan Sipil, 122.

Kantor Milik Perindustrian, 66.

Kantor Pemberitaan "Antara", 638.

Kantor Pemilihan, 99.

Kantor Pemilihan Daerah, 373.

Kantor Pendaftaran Tanah, 121, 165, 944, 947.

Kantor Pusat Daktiloskopi, 66.

Kantor Pusat Pembelian, 296.

Kantor Pusat Perbendaharaan, 166.

Kantor Securitas, NV, 1248.

Kantor Tata Usaha Peterongan, PT, 1239.

Kantor Urusan Pegawai, 90, 115, 308, 667.

Kapo Trading Company Ltd., NV, 1174.

Kapojos, H.E.F., 507.

Karachi, 728.

Karanganyar, 877.

Kartohadiprodjo, R. Sudiman, 100.

Kasan, 181.

Kasim, M Djapar, 438.

Kasiran, 69.

Kassim, Mohamad, 813.

Kebumen, 517.

Kediri, 659, 710, 907, 948.

Kedu, 963.

Kejaksaan Agung, 69.

Kejaksaan Negeri, 499.

Kejaksaan Tentara Agung, 79.

Kemayoran, 820.

Kementerian Agama, 166, 271, 425, 812, 988.

Kementerian Agraria, 312, 624.

Kementerian Dalam Negeri, 120, 286, 313, 544, 669, 712, 767, 812, 892.

Kementerian Keamanan Dalam Negeri, 333.

Kementerian Kesehatan, 725.

Kementerian Keuangan, 123, 146, 270, 389.

Kementerian Luar Negeri, 38, 311, 336, 708, 815, 821, 839, 892.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, 297, 410.

Kementerian Pelayaran, 736.

Kementerian Penerangan, 282, 295, 337, 340, 341, 372, 641, 759.

Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, 41, 268, 403, 550, 731.

Kementerian Perburuhan, 285, 379.

Kementerian Perekonomian, 714, 730, 1194.

Kementerian Perhubungan, 55, 394, 396, 664, 812, 1198.

Kementerian Pertahanan, 425, 553, 623, 734.

Kementerian Pertanian, 299, 306, 395, 940.

Kementerian Sosial, 950.

Kementerian Urusan Veteran, 413.

Kepala Percetakan Negara, 1052.

Kepanduan Angkatan Muda Islam (KAMI), 996.

Kepolisian Indonesia, 267.

Kepolisian Negara, 301, 338, 411, 840.

Kepolisian RI, 372.

Kepulauan Karimun, 459.

Kepulauan Riau, 11.

Khouw Hoey Tin, 989.

Kian Hoat, NV, 1073.

Kilang Papan Indonesia-Tionghoa, NV, 1154.

Kindangan, J.A, 294.

Kingma, Jacobus Lambertus, 910.

Kipinta, NV, 1154.

Kirana, Kartika Chandra, 264.

Klaten, 175, 454.

Klungkung, 741.

KMB, 115, 361.

Ko Siok Hie, 1202.

Kodratsamadikoen, R., 1213.

Koesoemo, Wirjono, 363, 949.

Kohler, K.E., 297.

Kolff's Offset Drukkerij, NV, 1256.

Koloniale Golfclub Palembang, 994.

Komisariat Agung Indonesia, 827.

Komisaris Agung Kerajaan Belanda, 892.

Komisi Antar Kementerian Sementara Guna Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat, 282.

Komisi Penyelesaian Masalah Keturunan Arab, 809.

Komite Olimpiade Indonesia, 306.

Komite Rakyat, 952.

Konferensi A.A., 843.

Konferensi Afro-Asia, 842.

Konferensi Dinas Kehakiman, 260.

Konferensi ILO, 147.

Konferensi Keamanan, 307.

Konferensi Komite Perkebunan, 147.

Konferensi Pemerintahan dan Keuangan, 322.

Kongres Persit Kartika Chandra Kirana, 264.

Kongres Veteran, 262.

Konstituante, 315, 358, 555.

Kontak Biro Umum, 373.

Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Sekitar Afro-Asia, 843.

Koperasi Pedagang-Pedagang Indonesia U.A., 1247.

Koperasi Pelajaran Indonesia Sulawesi "Kopis", 1269.

Koperasi Persatuan Kebun-kebun Getah Rakyat Labuhan Batu U.A., 1206.

Koperasi Perusahaan Kapur Nasional (Koperasi Pekana) (U.A.), 1075.

Koperasi Suluh Perekonomian Rakyat G.A. (Super), 1232.

Koppes, H.J., 1097.

Korea, 821.

Korps Ahli Imigrasi, 1157.

Kota Nopan Trading Company Limited, NV, 1168.

Kotanopan, 98.

KPM, 414.

KPPN, 98, 154, 155, 156, 159.

Ksiueh Sheng Tse Chih Hui, 401.

Kuala Kuran Pegatan, 238.

Kudus, 859, 997.

Kulon Progo, 767.

Kupang, 71, 157, 855.

Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan, 62.

Kutaraja, 165, 247, 917, 1172.

Kutoarjo, 959.

# $\mathbf{L}$

Labuhan, 496.

Lampung, 287.

Land en Tuinbow onderneming Tjitajam, NV, 1203.

Langsa, 1207.

Lawang, 881, 973.

Lawijan, Naib, 415.

Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, 346, 384.

Lembaga Pertahanan Nasional, 756.

Lembaga Timbangan Kilogram Indonesia, 616.

Lembaga Ukuran Meter Indonesia, 616.

Lho Seumawe, 1148.

Lie Gie Po, 65.

Lie Kiem Kiok, 968.

Lie Seng Liong, 968.

Lie Sien Koei, 817.

Liem Kiem Ling & Co Trading Company NV, 1056.

Liem Siauw Hien, 911.

Liem Sik Tjo, 897.

Liem Tiong Gwan, 895.

Lim Hong Kian, 822.

Loing, A. Th., 934.

Lombok, 740.

Lompobattang, NV, 1111.

London, 869.

Lubukpakam, 945.

Lucas, J.P., 394.

Lumangkun, B.T., 17.

# M

M. Brouwer, 887.

M.A.I. Sarintan, 1127.

Maathuis, C., 1200, 1129.

Maatschappij tot Werkeloosheid Bestrijding, 273.

Macaré, 953, 957, 958.

Macaré, Emilie, 944.

Maclaine, Watson & Co., NV, 1277.

Madiun, 427, 442.

Madjalah Pegawai, 427.

Madura, 922, 1286.

Magelang, 137, 912, 941.

Magetan, 248.

Mahidin, P. Maiduty, 819.

Mahkamah Agung, 20, 21, 22, 23, 24, 45, 46, 51, 54, 59, 64, 65, 89, 276, 279, 307, 311, 401, 417, 442, 489, 490, 495, 514, 572, 576, 631, 637, 668, 683, 722, 803, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838, 940, 942, 943.

Mahkamah Agung Indonesia, 60, 707, 1068.

Mahkamah Pelayaran, 583.

Majalah "Medan Bahasa", 268.

Majelis Tiong Hwa Kie Tok Kauw, 988.

Makarsad, NV, 1272.

Makassar, 77, 205, 307, 709, 835, 880, 998, 1009, 1101, 1149, 1192, 1197, 1199.

Malang, 32, 74, 276, 669, 890, 891, 926, 973, 1061, 1121, 1254, 1211.

Maluku, 16.

Maluku Tengah, 323.

Maluku Utara, 972.

Manado, 17, 219, 698, 891, 970, 1033, 1090, 1106.

Manfred, Ernest F, 350.

Mangoenkoesoemo, R.M.T. Soemardi, 671.

Mangunsarkoro, S., 703.

Manila, 786.

Mantiri, K., 970.

Marbaja, Ismael, 187.

Mardingding, 1004.

Marif, NV, 1087.

Martokoesoemo, M. Besar, 269.

Martokusumo, Besar, 708.

Masjkoer, A., 415.

Maskapai Andil Indonesia (M.A.I.) "U.P.P.E.R.I.", 1215.

Maskapai Dagang "Setudju", P.A., 1135.

Maskapai Dagang Dinas Otobis dan Perusahaan Pengangkutan Mascot, Perseroan Terbatas, 1055.

Maskapai Dagang Kwong Njan Hin, NV, 1062.

Maskapai Dagang Liem Kiem Ling & Co, 1056.

Maskapai Perkebunan (*Cultuur*) Industri, Dagang dan Angkutan H.D. "Sukamanah" (I.M.A.), 1108.

Maskapai Perniagaan Tay Lam Siong Hang, 1142.

Massabouw, NV, 1013.

Matahari Film Exchange, NV, 1170.

Medan, 98, 154, 166, 236, 260, 316, 423, 505, 834, 888, 891, 894, 937, 981, 983, 1044, 1092, 1093, 1119, 1131, 1147, 1161, 1162, 1163, 1164, 1168, 1176, 1229, 1234, 1236, 1247, 1255, 1274.

Medan Bahasa, 268.

Menteri Pertanian, 283.

Mimbar Indonesia, 333.

Minahasa, 440, 711.

Misi Pampasan RI, 357.

Mliwis, NV, 1049.

Mollemaar, M., 215.

Morpheus Goan Tjiang & Co., NV, 1180.

Motor Import Company, NV, 1201.

MPRS, 362, 759.

Muara Trading Company Ltd., 1145.

Muhammadiyah, 387.

Muhiddin, Muhammad, 543.

Mullemeister, J.Ph, 883.

Murian Trading Company, NV, 1124.

Muskee, 116.

Mustadjab, T, 505.

Mustika, NV, 1018.

Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional, 748.

Muzakar, Kahar, 469.

# N

Nagel, J.J.H., 1097.

Nainggolan, Mangara Tua, 509.

Nam An Kongsi, NV, 1176.

Narumonda, 1139.

Nasrum, Mohammad, 34.

Nederland, 361, 885, 889.

Nederland Helpt Indie, 121.

Nederlandsche Handel Maatschappij (Factory), 678.

Nederlandsche Handel Maatschappij, NV, 1280.

Nederlandsch-Indische Drukkers en Uitgevers Maatschappij, NV, 1118.

Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereniging, 977.

Nerus Ginting, 290.

New York, 350, 772.

Ngawi, 248.

Nicolaas, Hubertus, 863.

NIT, 4.

Njoo Jan Nio (Ny.), 899.

Noor, C.A. (Drs.), 118.

NTB, 16.

NTT, 16.

Nur Ibrahimy, M, 291.

Nurgani, 177.

Nusa Baru, NV, 1221.

Nusantara, NV, 1195.

# O

O Tjing Shoet, 836.

O.I. Cultuur en Handelsco, NV, 1017.

Oeng Beng Seng, 910.

Oliefabriek Ciamis, NV, 1011.

Olivier, Ketting, 928.

Ong King Liong, 824.

Ong Sing Bo, 909.

Ong Tambak Nio (Ny.), 895.

Ong Thiam Som, 887.

Oud (Java), NV, 1035.

Oudt, A. (Drs.), 652.

# P

P.A. Percetakan Wie Mie, 1159.

P.D. & Industrie M.A.I. "Hemat", 1043.

P.D. Permega, NV, 1236.

Paberik Barang-barang Logam dan Porcelein Kar Surabaya, NV, 1026.

Paberik Es Jakarta, NV, 1208.

Paberik Tenun Yoen Foh, NV, 1071.

Pabriek Rokok Seraju, NV, 1271.

Pabrik Gula Pagottan, 740.

Pabrik Gula Ponen Baru, NV, 1230.

Pabrik Mesin S "Sumber Mas", 1211.

Pabrik Tepung Kaspee (Kaspee Flour Company Limited), NV, 1230.

Pabutraco, NV, 1092.

Pacitan, 710.

Padalarang, 1003.

Padang, 61, 155, 159, 164, 180, 219, 232, 709, 878, 1125.

Padang Panjang, 1075.

Padangsidempuan, 175, 1184.

Pajakumbuh, 499.

Pakistan, 728.

Pakistan Welfare Association, 1001.

Palang Merah Indonesia, 326, 327, 329, 406, 672.

Palembang, 18, 698, 719, 803, 819, 882, 994, 1053, 1085, 1104, 1110, 1112, 1129, 1200, 1250.

Pameran "Indonesia Bangun", 368, 369.

Pandeglang, 97.

Pangkalan Dodek, 1154.

Pangkalpinang, 53, 1285.

Panitia Agraria, 608, 702.

Panitia Koordinasi Interdepartemental, 299.

Panitia Mardi Budaya, 424.

Panitia Nasionalisasi, 672.

Panitia Nederland Helpt Indie, 121.

Panitia Negara, 613, 762.

Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan (PNPKK), 618.

Panitia Pembantu Keamanaan Kota Jakarta, 319.

Panitia Pemilihan Indonesia, 35, 148.

Panitia Pemulihan Hak, 162.

Panitia Penyelenggara Negara Kesatuan "Bagian Kehakiman", 937.

Panitia Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Priok, 670.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, 295, 713.

Panitia Penyelesaian Urusan Pemilihan Hak, 918.

Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri, 400.

Panitia Persiapan Negara Kesatuan Sumatera Timur, 316.

Panitia Tahanan/Tawanan, 512.

Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, 90, 168, 286, 404, 924, 926, 936, 944, 956, 957, 1240.

Panitia untuk Penyelidikan Radio Activiteit, 309.

Pantai Buaya Trading Coy Ltd., NV, 1092.

Pantai Hambawang, 1127.

Pantai Timur Sumatera Tengah, 459.

Pantecostal Church of God of America, 972.

Papierfabriek Padalarang, NV, 1003.

Pare-pare, 230.

Pariaman, 232.

Paris, 779.

Paroehoem, H. Soetan Pane, 1044, 1147.

Partai Murba, 374.

Partai Republik Indonesia, 259.

Partatmo, R.M.,543.

PARTI, PT NV, 1107.

Pasir Kantjana, NV, 1048.

Pasuruan, 5, 462, 1237.

Pati, 58, 446, 870.

Pattipeiluku, Nicolas Charles, 910.

Pedoman, 1034.

Pekalongan, 310, 448, 513, 1153.

Pekanbaru, 219, 220.

Pelabuhan Bebas Sabang, 752.

Pelabuhan Daerah II, PN, 742.

Pelabuhan Palembang, PN, 719.

Pelabuhan Udara Kemayoran, 820.

Pemangkat, 1231.

Pembangunan Djati, NV, 1261.

Pembangunan Kebun Aceh, NV, 1207.

Pemborongan Pembangunan Borobudur, NV, 1126.

Pendowo Limo, NV, 1063.

Penerbit "Pantjawarna", NV, 1242.

Penerbitan dan Percetakan "Nusantara", NV, 1023.

Penerbitan Percetakan dan Dagang Semarang, NV, 1114.

Penerbitan Percetakan dan Perdagangan "Irrasco", NV, 1245.

Pengawas Rahasia Negara Republik Indonesia, 405.

Pengawas Teritorial Semarang, 501.

Penggilingan Beras "Sidodadi", NV, 1137.

Pengurus Besar Gabungan Pro Juventute, 518.

Penjara Cipinang, 145.

Penjara Glodok, 506.

Perak, NV, 1193.

Perbengkelan Nusantara dan perseroan Dagang, NV, 1195.

Perbum (Persatuan Buruh Minyak), 409.

Perceelen Maatschappij Karangwoelan, NV, 1173.

Percetakan "Kangaroo" M.A.B, 1233.

Percetakan Nasional (NV The National Press Ltd.), NV, 1041.

Percetakan Negara, 390, 1064.

Percetakan Orita, 390.

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, 723.

Perhimpunan Hwa Lien, 1018.

Perhimpunan Ilmu Alam Indonesia, 955.

Perhimpunan Koperasi "Koperasi Batik Surakarta W.A." (K.B.S.), 1216.

Perhimpunan Penerbangan Indonesia (Perpeni), 974.

Perhimpunan Reklasering Semarang, 524.

Perindustrian dan Perdagangan Makarsad, NV, 1272.

Perindustrian Pharmasi dan Perikanan Mico, NV, 1061.

Perkara Westerling, 477.

Perkebunan dan Perdagangan Setia (NV Setia), NV, 1140.

Perkebunan Tjimajak, NV, 1230.

Perkumpulan Budi Kemuliaan, 1000.

Perkumpulan Pusat Beras Jawa Tengah, 976.

Perkumpulan Rumah Sekolah Tionghwa Lawang, 973.

Persatuan Buruh Minyak, 409.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (P.D.G.I.), 990.

Persatuan Ekonomi Rakyat Kadipaten, NV, 1193.

Persatuan Pengangkutan Rakyat Indonesia, 983.

Persatuan Usaha Ekonomi, NV, 1070.

Persatuan Wanita Dharma Bakti, 351.

Persbureau "Aneta", 638.

Persekutuan Andil "Indonesia Asia Company", 1106.

Persekutuan Andil "Indonesia-China" (Indonesia-China Limited), 1082.

Persekutuan Andil "Liong Gwan", 1039.

Persekutuan Andil "Ozecu" (Ozecu NV), 1084.

Persekutuan Andil Kong Hoa (Indonesia), 1095.

Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Batanghari Trading Company", 1160.

Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Bintang Asia", 1050.

Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Lam Giok Hoo", 1171.

Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Nam Thay" (*Handel Maatschappij "Nam Thay" NV*), 1030.

Persekutuan Andil Maskapai Dagang "*Tai Tung Company Indonesia*" *Limited*, 1141, 1143.

Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Tja Bie", 1202.

Persekutuan Andil Maskapai Dagang Bie Sing Kongsie, 1144.

Persekutuan Andil Maskapai Dagang Mamlukat & Company, 1040.

Persekutuan Andil Paberik Minyak Bandung, NV, 1118.

Persekutuan Andil Perusahaan Paberik Kaju "Tjisarua", 1109.

Persekutuan Dagang Bogor, NV, 1185.

Persekutuan Dagang Sie Tay, NV, 1057.

Perserikatan Sekolah "Dr. Nomensen", 1139.

Perseroan Dagang "Muara", NV, 1145.

Perseroan Dagang "Pamitran", NV, 1179.

Perseroan Dagang Daben, NV, 1089.

Perseroan Dagang dan Biro Bangunan Tjeremai, NV, 1183.

Perseroan Dagang dan Industri "Tjibaliung", NV, 1265.

Perseroan Dagang dan Industri Wan Tjhiang, NV, 1253.

Perseroan Dagang dan Industrie Winahjoe, NV, 1077.

Perseroan Dagang dan Penggergajian Kayu Then Fo Sen, NV, 1227.

Perseroan Dagang dan Perindustrian Prajogo, NV, 1113.

Perseroan Dagang dan Perindustrian Tay Tong, NV, 1112.

Perseroan Dagang dan Usaha Mendut, NV, 1161.

Perseroan Dagang Gapura, 1015.

Perseroan Dagang Import & Export Tjin Lian Tjan, NV, 1223.

Perseroan Dagang Industrie dan Perkebunan Nusa Baru, NV, 1221.

Perseroan Dagang Nasional "Perdana", NV, 1090.

Perseroan Dagang Pantai Buaya, NV, 1092.

Perseroan Dagang Serangkai, NV, 1274.

Perseroan Dagang Sin Nam Hin, NV, 1130.

Perseroan Dagang Subur, NV, 1131.

Perseroan Dagang Sumatera Rubber Coy Ltd., NV, 1021.

Perseroan Dagang Tangerang, NV, 1219.

Perseroan Dagang Terbatas Brantas, NV, 1125.

Perseroan Dagang Tjin Tjiang, NV, 1186.

Perseroan Dagang Tjoo Sing, NV, 1094.

Perseroan Dagang Trio (NV Trio), NV, 1046.

Perseroan Dagang Veem, Ekspedisi dan Pengangkutan "Pagarrujung", NV, 1146.

Perseroan Dagang, Angkutan, Industri dan Perkebunan Ex Pegawai Perkebuan Sindoro-Sumbing, NV, 1217.

Perseroan Dagang, Industri dan Perwakilan Djajamulia Limited, NV, 1138.

Perseroan Industeri Spartan, NV, 1236.

Pertiss Trading Company, NV, 1078.

Perusahaan Antero Dagang *Import Export Trading Company* (P.A.D.I.E.), NV, 1149.

Perusahaan Dagang "Hadji Moenaf", NV, 1064.

Perusahaan Dagang & Industri Trisila, NV, 1249.

Perusahaan Dagang dan Industrie Paätsia, NV, 1196.

Perusahaan Dagang dan Perindustrian "Harta", NV, 1258.

Perusahaan Dagang Hoo Kwan Tihiang, NV, 1045.

Perusahaan Dagang Karang Sekar dahulu Firma Dharma Trading Company, 1222.

Perusahaan Dagang Kim Hin, NV, 1128.

Perusahaan Dagang Lian Tjoen, NV, 1190.

Perusahaan Dagang Negara, 750.

Perusahaan Dagang Pendowo Limo, NV, 1063.

Perusahaan Dagang Robinson, Perseroan Terbatas, 954.

Perusahaan Dagang Sing Bie Kongsi, NV, 1167.

Perusahaan Dagang, Expeditie dan Veem, dan Industri "Kamang", PT, 1275.

Perusahaan dan Dagang Bakti, NV, 1234.

Perusahaan dan Fabriek Roti Madju, NV, 1110.

Perusahaan Harta Tetap Lim Tjan, NV, 1058.

Perusahaan Industri, Perdagangan dan Pemborongan "Favoriet", NV, 1276.

Perusahaan Listrik Gebeo NV (Electriciteitmaatschappij Gebeo NV), 1054.

Perusahaan Mobil International, NV, 1091.

Perusahaan Pelajaran Majang, NV, 1070.

Perusahaan Penggilingan Karet "Kota Bumi", NV, 1250.

Perusahaan Perindustrian Dimita, NV, 1259, 1268.

Perusahaan Pharmasi dan Kimia Kazani (PT Kazani), 1243.

Perusahaan Sayuran dan Buah-Buahan Indonesia (NV Sabin), NV, 1254.

Perusahaan Veem Nasional " Masa Veem NV", 1257.

Peterlunger, Oswald (Dr.), 743.

Philipina, 786, 846, 847.

Piano Assembling Factory Djokolioe, NV, 1251.

Pinrang, 1215.

Pioga Veem, NV, 1260.

PKI, 332.

PNI, 264.

Polandia, 349.

Pontianak, 1227.

Pope, A, 356.

Pouw Peng Nio, 911.

Prajitno, S.K, 292.

Prajogo, NV, 1113.

Prawiranegara, Sjafruddin, 652.

Prawotokoesoemo, 180.

Prembun, 1189

Priangan, 320.

Prins, H.W, 1097.

Probolinggo, 844.

Pudolio, 319.

Pujung, 740.

Pulau Batu-Kora, 935.

Pulau Rupat, 933.

Puncak, 183.

Purbalingga, 179, 229, 688, 1059.

Purukjahu, 238.

Purwodadi, 54, 876.

Purwokerto, 229, 895, 927, 941

Purworejo, 318.

Pusat Badan Konferensi Bangsa Indonesia Turunan Arab, 808.

Pusat Ikatan Penderitan Tjatjat Indonesia, 328.

Pustaka dan Penerbit Endang, NV, 1086.

Pustaka Hwa Chiaw, NV, 1255,

Putra, NV, 1187.

# Q

Qalbi, Hasan, 878.

# R

R.K.O. Radio Films, NV, 1016.

Rabudin, 490.

Radio Activiteit, 309.

Radjin, NV, 1104.

Rajat Trading Company Ltd., NV, 1214.

Ramakers, M.H.H, 823.

Rangkasbitung, 175, 1265.

Rantau Prapat, 425, 489, 939, 1132.

Rapijan, 813.

Rasjidi, M. Ali, 996.

Rath, G.C, 881.

Rath, J.J.Th, 881.

Ratulangi, A, 970.

Reijerse, A.W, 882.

Rembang, 69.

Republik Rakyat Romania, 352.

Republik Rakyat Tiongkok, 627, 822.

Residen Priangan, 320.

Ribbers, H, 890.

RIPPI, NV, 1037.

Roem, Mohammad, 703.

Roeske, H, 900.

Rohmat (Nn), 1202.

Rothschild, E.A, 900.

Rotterdam, 948.

RRI, 261.

RRT, 338.

Rukun Ichtiar Perdagangan dan Pelajaran Indonesia, 1037.

Rumah Pendidikan Jiwa, 53.

Rumah Penjara, 82, 505, 513, 515, 520.

Rumah Penjara Bulu, 501.

Rumah Penjara Gang Tengah, 520.

Rumah Penjara Glodok, 428.

Rumah Penjara Medan, 505.

Rumah Penjara Struisjwik, 508.

Rumah Penjara Sukamiskin, 511.

Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Kedunghalang, 406.

Rumah Tahanan Labuhan-Deli, 496.

Rumania, 349, 352.

Runturambi, E, 17.

# S

's Gravenhage, 90, 900.

Sabang, 752.

Sabin, NV, 1254.

Sachroni, 73.

Safingi, T. Hadi, 415.

Sagoff, Said Mohd. (Tengku Djang) b, 933.

Sahelatua, Leonardus Ch, 865.

Said, H.M, 1264.

Salatiga, 54, 258, 648.

Saleh, Chairul (Dr.), 263.

Samanhudi (K.H.), 743.

Samarinda, 45, 78, 1046, 1186, 1257.

Samat, 860.

Sampagul, NV, 1184.

Sampit, 237.

San Fransisco, 281, 778.

Sangir, 847.

Sangkulirang, 467.

Santosa, NV, 1228.

Sao Paulo, 257.

Saparua Cigaret Factory and Trading Company, NV, 1164.

Saragih, Djapulung, 945.

Sarkies, E.L, 903.

Sarkoro, Narto, 53.

Sastroamidjojo, Ali, 364

Savitra Industrial Company Limited, NV, 1246.

Sawandi, Henricus, 1103.

Scheepswerf Antjol, NV, 1218.

Schlenker, O.W.J, 918.

Schmidt, 953, 957, 958.

School met de Bijbel, 975.

Sef Bin Ali Aliamri & Co, 1213.

Sekolah Kepandaian Putri, 77.

Sekolah Kerajinan Negeri Kutoarjo, 959.

Selatpandjang Trading Coy., NV, 1244.

Selebes Tengah, 1175.

Semarang, 69, 74, 83, 89, 442, 501, 524, 642, 883, 887, 892, 896, 927, 960, 963, 976, 1007, 1030, 1056, 1076, 1114, 1116, 1155, 1156, 1165, 1173, 1209, 1226, 1230, 1246, 1262, 1267, 1270, 1271, 1283.

Serang, 249, 288.

Serikat Buruh Daerah Autonom (SEBDA), 1262.

Serikat Buruh Islam Indonesia, 426.

Serikat Buruh Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (S.B.D.P.P.K.), 999.

Serikat Buruh Listrik & Gas Indonesia (S.B.L.G.I.), 999.

Serikat Buruh Perusahaan Kaju/Bangunan (S.B.P.K.B.), 999.

Serikat Dagang dan Perusahaan Seri Budi, 1121.

Serikat Pedagang Beras, 985.

Serikat Pelajar Seluruh Indonesia (SPSI), 44.

Serikat Sekerdja Kepenjaraan, 504.

Serikat Surat Kabar, 335.

Shin Sheng She, 980.

Shipping Company Ltd, 1198.

Siam, 854.

Siauw Giok Tjhan, 807.

Sibolga, 390, 1044.

Sibolga, P.H, 390.

Siborong-borong, 43.

Sie Khwan Djioe, 962, 1180.

Sie Khwan Ho, 908.

Sigaret tenfabriek Serajoe, NV, 1226, 1267.

Sihombing, Cornelius, 43.

Sin Hap Seng & Import-Export, NV, 1166.

Sindhu-Sanur, 422.

Singapore, 818, 933.

Singapura, 675.

Sinulingga, Nabari, 416

Sinulingga, Tenteng, 416.

Situbondo, 103, 515.

So Bo Soet, 1189.

Soedarjo, 57.

Soedarsono (Dr.), 708.

Soeharto (Jenderal), 264.

Soehindrijo, Slamet, 405.

Soemardjo, 41.

Soentpiet, A.J, 915.

Soeprapto, R.M, 909, 1267.

Soerojo, R.M, 911.

Soetardjo, 895.

Sosroatmidjojo, Soemiadji, 442.

Sourabaya Society of Teachers of Dancing (S.S.T.D.), 982.

South Asiatic Corporation Ltd., NV, 1100.

South Sea Trading Company NV, 1072.

Spangenberg, Frans, 491.

Sriaman, 205.

St. Borromeus Vereeniging, 978.

Staring, H.C.C, 119.

Sterrenkundige Vereniging voor Indonesie, 977.

Stichting Nederlandse Schoolvereniging Bangka, 1285.

Su Tung Hoa Kiauw Kung Nung Lian Hiap Chung Hui, 834.

Suburbaru Trading Company, NV, 1163.

Sudardjat, M, 195, 630.

Suermondt (Prof.), 38.

Sujadi, R, 912.

Sukabumi, 1108.

Sukono, R., 678.

Sulawesi, 16, 75.

Sulawesi Motor Company, NV, 1197.

Sulawesi Selatan, 278, 323, 592.

Sulawesi Tengah, 296.

Sulawesi Trading Company, NV, 1149.

Sulawesi Utara, 592, 723, 1213.

Suleiman, A., 929.

Sulimah, B., 859.

Sumatera, 29, 76, 981, 1119.

Sumatera Barat, 313, 766.

Sumatera Selatan, 53, 215, 819.

Sumatera Tengah, 2, 220, 233.

Sumatera Timur, 99, 316.

Sumatera Utara, 293, 423, 290, 293, 613, 714, 834.

Sumbawa, 11.

Sumber Bahagia, NV, 1031.

Sumenep, 74, 687, 1015.

Suminar, N. Ratna, 522.

Sun Ui, 949.

Sungai Penuh, 243.

Supomo (Prof.), 815.

Surabaya, 12, 57, 121, 129, 186, 190, 206, 252, 414, 590, 695, 741, 836, 883, 886, 891, 893, 897, 902, 903, 905, 908, 913, 927, 982, 987, 991, 999, 1026, 1031, 1035, 1036, 1045, 1047, 1049, 1060, 1067, 1072, 1074, 1091, 1094, 1099, 1102, 1111, 1113, 1124, 1152, 1155, 1202, 1214, 1221, 1223, 1237, 1238, 1249, 1253, 1266.

Surabayasche Planten-en Dieren-tuin, 987.

Surakarta, 129, 659, 861, 1024, 1032, 1077, 1216, 1233, 1242.

Surat Kabar Aneta, 334.

Surat Kabar Indonesia Raya, 340.

Suriname, 351, 781.

Surjokusumo, Indra, 191.

Swarha Building Plantation & Trading Corporation Ltd. van het NV Bouw en Handel Maatschappij Soenda, NV, 1117.

Sympati Motor NV, 1212.

## $\mathbf{T}$

Taher, Bujung, 177.

Tai Tong Trading Co., NV, 1281.

Taiwan, 821.

Talaud, 847.

Tan A Sioe, 887.

Tan Eng Kiam, 904, 934.

Tan Goan Nio, 968.

Tan Goe Djie Nio (Ny.), 915.

Tan Hwat Sioe, 907.

Tan Shen Trading Coy Ltd., NV, 1096.

Tan Sie Ing, 246.

Tan Siong Sioie, 883.

Tan Tek Liang, 954.

Tangerang, 218, 508, 518, 1219.

Tanjung, 942.

Tanjung Merawa, 943.

Tanjung Perak, 836.

Tanjung Pinang, 61, 1232.

Tanjung Priok, 204, 389, 397, 408, 670, 846, 1029.

Tanjungbalai, 277, 816.

Tanumidjaja, Memet, 333.

Tapanuli, 99, 509.

Tapanuli Tengah, 440.

Tapanuli Utara, 1139.

Tarutung, 1139.

Tebing Tinggi, 88, 943, 1154.

Technica, NV, 1099.

Technis Biro, NV, 1070.

Tegal, 157, 1014, 1269.

Telukbetung, 287, 979, 1018, 1073, 1080, 1107.

Temanggung, 137, 988.

Ten Cate, F.G, 930.

Teng Kong Hian, 907.

Teng Sioe Tjhan (Dr.), 924.

Ternate, 915, 972.

Tertib, PT, 1282.

Textielfabriek Sinar Mas, NV, 1010.

Textile Industrie Kian Seng and Company Limited, NV, 1038.

Thailand, 521.

Thambas, NV, 1192.

Than Gwan Kwie, 420.

The Celebes Overseas Trading Company (NV Celtraco Ltd.), NV, 1036.

The Suez Trading Company, NV, 1074.

The United Nations Economic and Social Council at Geneva, 343.

Tho Tee Kong Bio, 997.

Tiddens, J.P., 119.

Tiga Sekawan, NV, 1153.

Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee, 995.

Tionghwa Hwee Kwan, 993.

Tiongkok, 277, 627, 810, 822, 835.

Tjan Gwan Kie, 899.

Tjan Lioe Kien, 899.

Tjan Som Bo, 907.

Tjepat, NV, 1069.

Tjokroaminoto, HOS, 743.

Tjokrohadisurjo, Ishaq, 286, 455.

Toko Betawi merk Thay Seng, 1213.

Tokyo, 678, 708.

Toli-Toli, 459, 872, 1175.

Tomohon, 17, 1052.

Tondano, 723.

Trenggalek, 710.

Trisila, NV, 1249.

Trust Estat, 1009.

Tuban, 417.

Tulungagung, 710.

## U

Ulkinah, 62.

Uni Belanda-Indonesia, 652.

Uni Indonesia-Nederland, 671.

United Nations Special Committe on the Balkan, 811.

Universitas Airlangga, 590.

Universitas Gadjah Mada, 259.

Universiteit Indonesia, 815.

Untung, 735.

USA, 356.

Usaha Bersama (NV Uber), NV, 1067.

Usaha Penerbitan Gapura, 330.

Usaha Saudara, NV, 1147.

# $\mathbf{V}$

Vaillant, R.E., 1097.

van Altena, N.A., 1203, 1205.

van Blommestein, A.L.M., 899.

van de Bijlaardt, A.C (Ir.), 932.

van den Bos, T.E.J., 898.

van der Klits, Anna E.J. Drop (Ny.), 931.

van der Linden, J.J., 987.

van Dijk, N. (Mr), 987.

van Dooren, W.P.J., 1097.

van Eck, D., 883.

van Slooten, W., 1097.

van Tongeren, R.B., 187.

van Vendeloo, R, 905.

van Werkum, H.D, 886.

Veem Dempo, NV, 1081.

Veen, L.M., 823.

Vereniging van Vreemdelingen-Werknemers in Sumatra, 1119.

Vermeulen, Th. R.W, 893.

Vietnam, 349.

Visok Veem, PT, 1283.

Visser, J.L.A., 968.

Vonk, J.P.F., 856.

# W

W.A. Robertson & Co., NV, 1012.

Wadeson, Hermine Margerete, 932.

Warsono, 181.

Washington D.C., 651.

Watersportvereniging "Brantas", 986.

Wates, 871.

Widjaja Kesuma, NV, 1076.

Winarto, R.M., 1201, 1288.

Wiranto, R.M., 963

Wiriadinata, Loekman, 269.

Wirjono Koesoemo, 363.

Wisnu Art Galery, 422.

Witteveen, F.G, 922.

Wo Hang, 836.

Wong Djun Siong, 949.

Wongsonegoro, (Dr.), 343, 424.

Wongsonegoro, K. R. M. T, 120.

Wonogiri, 873.

Wonosobo, 83, 1217.

## $\mathbf{Y}$

Yayasan "Satria", 1290.

Yayasan Dharma Siswa Madura, 1286.

Yayasan Hatta, 1287.

Yayasan Kantor Berita Nasional ANTARA, 342.

Yayasan Kebaktian Pedjuang Daerah Bali, 1289.

Yayasan Perumahan Madura, 1286.

Yayasan Urusan Harta Peninggalan, 1291.

Yogyakarta, 83, 181, 223, 226, 245, 304, 373, 504, 642, 656, 658, 659, 680, 695, 767, 861, 901, 927, 963, 964, 980, 999, 1034, 1103, 1201.

Ysfabriek Labuhan Batu, NV, 1132.

# $\mathbf{Z}$

Zending Protestant Chung Hua Ja She Kauw Fi, 984.

Zitter, R.R. (Nyonya), 184.

Zjuhri (H.), 859.

#### II. URAIAN DESKRIPSI ARSIP

#### A. Kesekretariatan

#### 1. Perencanaan

### Rencana Kerja Anggaran

Surat pengantar dari Panitera Pengadilan Negeri Bangka dan Belitung kepada Kementerian Kehakiman tentang penyampaian anggaran biaya tahun 1950.

03 Januari 1950

asli

5 lembar

2 Berkas tentang anggaran belanja Kejaksaan Sumatera Tengah Tahun 1950.

05 September-27 Desember 1950

asli

1 sampul

3 Berkas tentang tambahan uang persediaan (anggaran) triwulan ketiga dan keempat di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1950-1953.

11 September 1950-04 Februari 1954

1 sampul

4 Surat dari Kementerian Kehakiman NIT kepada Menteri Kehakiman RI tentang pengiriman taksiran begroting tahun dinas 1951.

08 November-19 Desember 1950

asli

3 lembar

5 Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan kepada Kementerian Kehakiman tentang pengiriman tindasan kredit anggaran triwulan pertama tahun 1951 Pengadilan Negeri Pasuruan.

06 Desember 1950

asli

3 lembar

6 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dll tentang perhitungan tambahan anggaran belanja untuk urusan keamanan di seluruh Indonesia tahun 1955.

13-25 April 1955

asli

3 lembar

1 sampul

7 Berkas tentang rancangan anggaran tambahan Kementerian Kehakiman RI tahun dinas 1954.

31 Januari 1956 asli

8 Surat dari Perdana Menteri kepada para Menteri tentang pembukuan anggaran 1957.

01-09 Oktober 1956 asli 3 lembar

# Laporan Berkala

9 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dll, tentang pengiriman laporan-laporan triwulan bantuanbantuan luar negeri dan daftar pegawai yang sudah bertugas belajar di luar negeri.

> 06-25 Juni 1957 pertinggal 9 lembar

10 Laporan Kerja Triwulan II Departemen Kehakiman tahun 1967.

1967 pertinggal 1 sampul

## 2. Kepegawaian

## Analisa Kebutuhan Pegawai

11 Surat-surat tentang laporan adanya kekurangan tenaga hakim di beberapa daerah seperti Kepulauan Riau, Bali, Sumbawa, dll, yang mengganggu proses peradilan.

> 20 Desember 1950-01 Januari 1955 pertinggal, asli, salinan 1 sampul

Berkas tentang permohonan penambahan pegawai pada Kejaksaan Pengadilan Negeri Surabaya.

13 Februari 1953-17 Juli 1954 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

# Bezetting (Persediaan) dan Formasi Pegawai

Surat-surat tentang bezetting (persediaan) dan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1950-1953 dan 1955-1956.

> 20 Mei 1950-29 Februari 1956 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

## Pengadaan Pegawai

# Penerimaan Pegawai

14 Surat-surat tentang permohonan pekerjaan pada lingkungan Kementerian Kehakiman tahun 1950-1951.

23 Agustus 1950-14 Desember 1951 asli, salinan, pertinggal, tembusan 1 sampul

15 Surat-surat tentang permohonan pekerjaan pada lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1952-1955, 1957, dan 1965.

24 Maret 1952-10 Mei 1965 asli, salinan, pertinggal, tembusan 1 sampul

# Pengangkatan Pegawai

Berkas tentang pengangkatan pegawai di seluruh wilayah Kejaksaan
 Pengadilan Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan Denpasar.
 Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

17 Februari 1947-15 November 1955 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul

17 Berkas tentang pengangkatan pegawai-pegawai Kejaksaan di Tomohon dan Manado a.n. B.T. Lumangkun dan E. Runturambi.

21 Juli 1949-24 Januari 1951 asli, tembusan, salinan 1 sampul

18 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang kepada Menteri Kehakiman tentang tuntutan "pegawai pengadilan asli" untuk diangkat menjadi pegawai kehakiman.

2 Agustus 1950-09 Juli 1952

asli, pertinggal 1 sampul

Berkas tentang pengangkatan pegawai pada Pengadilan Tinggi Jakarta.
 14 Agustus 1950-07 April 1955
 asli, salinan, pertinggal
 1 sampul

20 Surat-surat tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung, Kantor Pusat Kementerian Kehakiman RI, dan beberapa kantor pengadilan dan kejaksaan tahun 1950.

30 September-07 Desember 1950 asli, salinan, pertinggal, fotokopi 1 sampul

21 Surat-surat tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung, Kantor Pusat Kementerian Kehakiman RI, dan beberapa kantor pengadilan dan kejaksaan tahun 1951.

02 Januari-21 November 1951 asli, salinan, pertinggal, fotokopi 1 sampul

22 Surat-surat tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung, Kantor Pusat Kementerian Kehakiman RI, dan beberapa kantor pengadilan dan kejaksaan tahun 1952-1953.

21 Januari 1952-18 November 1953 asli, salinan, pertinggal, fotokopi 1 sampul

23 Surat-surat tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung, Kantor Pusat Kementerian Kehakiman RI, dan beberapa kantor pengadilan dan kejaksaan tahun 1954-1958.

> 15 Januari 1954-23 Juni 1958 asli, salinan, pertinggal, fotokopi 1 sampul

24 Berkas tentang pengangkatan hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.

31 Oktober 1950-04 Juni 1957 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul 25 Berkas tentang pengangkatan pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta.

08 November 1950-24 Oktober 1955

asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi

1 sampul

26 Berkas tentang pengangkatan pegawai di seluruh wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri di Jawa Barat.

05 Januari 1951-15 November 1955 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul

27 Berkas tentang pengangkatan pegawai di seluruh wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah.

12 Februari 1951-19 November 1955 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul

28 Berkas tentang pengangkatan pegawai di seluruh wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri di Kalimantan.

01 Maret 1951-15 Oktober 1956 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul

29 Berkas tentang pengangkatan pegawai di wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri Sumatera.

08 Maret 1951-20 November 1956 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul

30 Berkas tentang pengangkatan pegawai di lingkungan Kejaksaan tahun 1951-1955.

23 April 1951-28 Desember 1955 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul

31 Berkas tentang pengangkatan pegawai di seluruh wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri di Jawa Timur.

25 April 1951-02 November 1955 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul 32 Surat Keputusan Direktur Kepenjaraan Daerah Malang tentang pengangkatan orang-orang hukuman sebagai tenaga pembantu pegawai pada Penjara Lowokwaru Malang.

11 Juni 1951 tembusan 7 lembar

33 Surat dari Kantor Milik Perindustrian Kementerian Kehakiman kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman tentang mempekerjakan seorang ahli hukum dari Jerman a.n. Werner Braun.

23 Juli-13 September 1951 asli 5 lembar

34 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman tentang penyampaian Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1951 mengenai pengangkatan Mr. Mohammad Nasrum sebagai Menteri Kehakiman.

17-26 November 1951 asli, pertinggal, salinan 4 lembar

35 Berkas tentang pengangkatan pegawai upah bulanan organik pada Panitia Pemilihan Indonesia di Jakarta.

01 Maret 1955-11 Januari 1956 asli 1 sampul

36 Berkas tentang pengangkatan pegawai pada Jawatan Pendaftaran Tanah Jakarta.

09 Agustus-05 Desember 1955 asli, salinan, pertinggal 1 sampul

#### Penempatan Pegawai

37 Berkas tentang penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

24 Januari 1950-19 Desember 1956 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

## Pembinaan Karir Pegawai

## Izin dan Tugas Belajar

38 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Luar Negeri tentang izin untuk memberikan materi Kuliah Hukum Antara Bangsa oleh Prof. Mr. Suermondt.

07 Juni-18 Juli 1951 asli, pertinggal 5 lembar

39 Surat-surat tentang pemberian ijin dan tugas belajar pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

01 Agustus 1951-22 Mei 1957 asli, pertinggal, tembusan, salinan 1 sampul

40 Surat dari Darjatmi kepada Bagian Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman tentang pemberitahuan bahwa Darjatmi telah menerima surat ijazah Sekolah Menengah Umum.

01 September 1951-02 September 1955 asli 1 sampul

41 Surat-menyurat antara Kepala Bagian Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman dengan Kepala Bagian Inspeksi Pengajaran Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, tentang pengesahan salinan ijazah Soemardjo.

30 November-22 Desember 1951 asli, pertinggal 5 lembar

#### Kursus

42 Berkas tentang kursus-kursus pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

02 Mei 1951-14 September 1955 asli, pertinggal 1 sampul

### Disiplin Pegawai

43 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Bagian Kepegawaian Kementerian Kehakiman tentang jabatan ganda Cornelius Sihombing sebagai Jaksa dan Wedana Siborong-borong.

27 Maret 1951 asli

3 lembar

44 Surat dari Serikat Pelajar Seluruh Indonesia (SPSI) kepada Menteri Kehakiman mengenai jam kerja di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

25 Mei 1951 asli, pertinggal 2 lembar

45 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang pengaduan mengenai Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang melanggar tatasusila.

07 November 1952 pertinggal 3 lembar

46 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung mengenai larangan terhadap pegawai negeri untuk menggunakan kekuasaannya dalam pesta Pemilu.

28 Agustus 1954 pertinggal 1 lembar

#### Penghargaan

47 Berkas tentang pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman.

26 Oktober 1950-31 Juli 1958 asli, pertinggal, tembusan, konsep 1 sampul

#### Mutasi

## Peninjauan Masa Kerja Pegawai

48 Berkas tentang penghitungan masa kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

28 Februari 1951-01 November 1955 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi 1 sampul

# Pemindahan Pegawai

49 Surat-surat tentang pemindahan pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1950-1953.

31 Agustus 1950-24 Desember 1953

asli, pertinggal, konsep, salinan, tembusan 1 sampul

50 Surat-surat tentang pemindahan pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1955 dan 1959.

05 Maret 1955-01 April 1959 asli, pertinggal, konsep, salinan, tembusan 1 sampul

51 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor kepada Ketua Mahkamah Agung tentang permohonan Sri Soenarni Djojodiguno, *acting*- Haki Pengadilan Negeri Bogor untuk tinggal di Jakarta.

13 Agustus 1957 pertinggal 1 lembar

52 Surat-surat tentang timbang terima (serah terima) jabatan di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

09 Juni 1952-05 Mei 1954

asli

7 lembar

## Penugasan Sementara

53 Surat Ketetapan Wakil Kementerian Kehakiman RI Provinsi Sumatera Selatan tentang penunjukan Narto Sarkoro sebagai pegawai yang bertanggung jawab atas keuangan mengenai Rumah Pendidikan Jiwa di Pangkalpinang dan Billiton.

06 Juni 1950 salinan 1 lembar

54 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Mahkamah Agung tentang penunjukan pengganti satu-satunya Panitera Pengadilan Kepolisian Salatiga yang pindah ke Pengadilan Negeri Purwodadi.

> 25 September 1950 pertinggal 3 lembar

Berkas tentang penyesuaian jabatan untuk pegawai yang akan diperbantukan ke Kementerian Perhubungan.

25 Oktober 1950-10 Februari 1951 asli, pertinggal, salinan

1 sampul

Berkas tentang pegawai yang diperbantukan (detasering) pada lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

03 Februari 1951-18 November 1960 asli, salinan, pertinggal, tembusan 1 sampul

57 Surat dari Jaksa Agung kepada Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman tentang permohonan Mr. Soedarjo, Jaksa pada Kejaksaan Pengadilan Negeri Surabaja, agar segera ditunjuk pengganti Ketua Pengadilan Negeri di Bangkalan yang telah meninggal, disertai

21 Maret 1951

asli 3 lembar

58 Surat dari Pengadilan Negeri Pati kepada Menteri Kehakiman tentang penunjukan wakil panitera Pengadilan Negeri apabila pejabat berhalangan.

18 Juni-19 Juli 1951 asli 2 lembar

59 Surat Penetapan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia tentang pembatalan semua penetapan atas penunjukan menjadi *Magistraat* Pembantu pada Kejaksaan Jepara dan pegawai-pegawai polisi.

13 Agustus 1951 pertinggal 2 lembar

60 Surat Penetapan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia tentang mencabut kembali penunjukan pegawai-pegawai Pamong Praja sebagai *Magistraat* Pembantu di Jawa Timur.

30 Januari 1952 asli 2 lembar

Surat-surat tentang penunjukan pegawai Pendaftaran dan Tukar Nama Kapal-kapal di Padang dan Tanjung Pinang.

19 Februari-04 September 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan

1 sampul

62 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengenai pemberian izin kepada Ulkinah untuk duduk sebagai dosen tidak tetap dalam Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan.

> 25 Agustus-13 September 1955 asli, pertinggal 3 lembar

63 Surat-menyurat antara Kepala Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman dengan *Acting* Hakim Pengadilan Negeri Klaten tentang permohonan agar segera ditunjuk panitera pengganti untuk panitera yang pindah di Pengadilan Negeri Klaten.

23 November-16 Desember 1955 asli, pertinggal 4 lembar

## Kenaikan Pangkat

64 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada Mahkamah Agung Indonesia di Jakarta.

07 Februari 1947-23 November 1955 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul

Berkas tentang permohonan kenaikan pangkat Pembantu Penerjemah kls.I pada Mahkamah Agung a.n. Lie Gie Po.

02 Agustus 1948-07 Oktober 1950 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai Kantor Milik Perindustrian dan Kantor Pusat Daktiloskopi.

21 Maret 1950-22 September 1952 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

67 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta.

04 Januari 1950-24 Agustus 1957 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul 68 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah.

> 24 Juni 1950-November 1955 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul

69 Surat-menyurat antara Kepala Cabang Kejaksaan Agung Semarang dengan Menteri Kehakiman RI tentang usul kenaikan pangkat pegawai Kejaksaan Pengadilan Negeri Rembang a.n. Kasiran.

> 04 Juli 1950-31 Agustus 1950 asli, pertinggal 1 sampul

70 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri Jawa Barat.

> 09 Oktober 1950-09 Mei 1955 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul

71 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri Bima, Kupang dan Denpasar.

18 Oktober 1950-29 Oktober 1954 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul

72 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri Jawa Timur.

> 05 Januari 1951-08 November 1955 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul

73 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Up/1/6/2 tanggal 12 Februari 1951 tentang kenaikan pangkat pegawai Jawatan Imigrasi Jakarta a.n. Sachroni.

> 12 Februari 1951-19 November 1955 pertinggal 2 lembar

74 Surat-surat tentang permohonan kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Negeri Bandung, Sumenep, Malang, Semarang, dan Blitar.

26 April 1951-14 Agustus 1954 asli, pertinggal, tembusan, salinan 1 sampul

75 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri di Sulawesi.

26 Agustus 1952-11 Juni 1955 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul

76 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri di Sumatera.

09 Oktober 1952-17 Desember 1956 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul

77 Berkas tentang pembatalan kenaikan pangkat Pegawai Pengadilan Tinggi Makassar karena ijazah Sekolah Kepandaian Putri yang tidak diakui sama dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama.

14 Desember 1953-24 Agustus 1954 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

78 Berkas tentang kenaikan pangkat pegawai pada wilayah Kejaksaan Pengadilan Negeri Balikpapan dan Samarinda.

13-15 Juni 1954 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul

79 Surat dari Kejaksaan Tentara Agung kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian kekurangan daftar lampiran surat penetapan Jaksa Tentara Agung Indonesia tanggal 27 Januari 1958 No. Kpts.-003/HM/1958 mengenai kenaikan pangkat pegawai.

27 Januari-24 Maret 1958 asli 2 lembar

### Penyesuaian Jabatan

80 Surat-surat tentang penyesuaian jabatan (*inpassing*) untuk pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

27 September 1950-Agustus 1957 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

## Administrasi Pegawai

### Tata Usaha Pegawai

81 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Menteri Pertahanan tentang pengumuman dan pembuatan surat keterangan kematian mengenai pegawai yang hilang. Nb. Rusak ringan.

16 Maret 1949-28 November 1951

asli, pertinggal

3 lembar

82 Surat dari Direktur Kelas I Rumah Penjara Cipinang Jatinegara kepada Kantor Biro Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman tentang perbaikan konsiderans pada surat ketetapan tanggal 19 Juli 1950 Nomor 62/BP/50.

25 September 1950

asli

1 lembar

83 Surat-surat tentang perjalanan dinas Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wonosobo, dll.

29 September 1950-30 Desember 1953

asli, pertinggal, tembusan

1 sampul

84 Surat-surat tentang keterangan lembur pegawai Kementerian Kehakiman tahun 1951-1952.

01 Agustus 1951-09 September 1952

asli, pertinggal

1 sampul

85 Surat-surat tentang keterangan lembur pegawai Kementerian Kehakiman tahun 1953, 1956-1957.

01 Agustus 1953-02 Desember 1957

asli, pertinggal

1 sampul

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Mr. R. Dardo, Hakim 86 Pengadilan Negeri Jakarta tentang penyampaian surat dari keluarganya di Belanda.

> 18 Maret 1952 pertinggal 4 lembar

87 Surat-menyurat antara Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Kepala Bagian Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman tentang permintaan surat keterangan bahwa pegawai Kejaksaan Pengadilan Negeri Cirebon a.n. I. Djajadiredja, pernah bertugas di Bagian Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman.

14 Juni-06 Agustus 1952 asli, pertinggal 1 sampul

88 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang pengiriman surat penetapan dan contohnya serta edaran mengenai penyerahan kekuasaan mengangkat/memberhentikan pegawai kepada Ketua Pengadilan Negeri.

28 November-22 Desember 1953 asli, pertinggal 4 lembar

89 Surat pengantar Ketua Pengadilan Negeri Semarang kepada Sekretaris Kementerian Kehakiman tentang penyampaian salinan surat Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengenai pemanggilan Ketua Pengadilan Negeri untuk menghadap ke Mahkamah Agung.

12 Desember 1953 asli 3 lembar

90 Surat dari Perwakilan RI di 's Gravenhage kepada Ketua Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang permohonan surat panggilan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk Jorgensen agar pengiriman kembali pegawai kehakiman tersebut dan istrinya dapat segera dilakukan.

03 Juli 1957 tembusan 1 lembar

#### Cuti Pegawai

91 Berkas tentang cuti pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.
10 Maret 1950-06 Juni 1957
asli, salinan, pertinggal
1 sampul

# Dokumentasi Identitas Pegawai

92 Surat-surat tentang pengiriman Kartu Tanda Pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

28 Maret 1951-10 Desember 1954 asli, pertinggal, fotokopi 1 sampul

## Kesejahteraan Pegawai

## Gaji dan Honorarium

93 Surat-surat tentang penetapan gaji dan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1950.

29 Agustus-23 Desember 1950 asli, salinan, pertinggal, tembusan 1 sampul

94 Surat-surat tentang penetapan gaji dan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1951.

02 Januari-31 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan 2 sampul

95 Surat-surat tentang penetapan gaji dan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1952-1953.

05 Januari 1952-15 Desember 1953 asli, salinan, pertinggal, tembusan 1 sampul

96 Surat-surat tentang penetapan gaji dan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1954-1957.

06 Januari 1954-14 Oktober 1957 asli, salinan, pertinggal, tembusan 1 sampul

97 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang permohonan jaksa di Pandeglang agar gaji jaksa dinaikkan.

09 Mei 1951 pertinggal

4 lembar

98 Surat dari Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Kotanopan kepada KPPN Medan mengenai permintaan gaji bulan April 1953 dan surat pemberian sepeda pegawai. .

> 02 April 1953 asli 3 lembar

99 Surat dari Anggota-anggota Kantor Pemilihan Tapanuli Sumatera Timur kepada Kementerian Kehakiman tentang permohonan agar pemberian honorarium pada anggota Kantor Pemilihan Tapanuli Sumatera Timur tidak dihentikan.

> 29 Oktober 1950 pertinggal 1 sampul

100 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Keuangan tentang honorarium Pengacara Negara penentuan tarif Kartohadiprodjo.

> 18 November 1950 pertinggal 2 lembar

101 Surat-surat tentang permohonan perbaikan nasib dan gaji pegawai.

> 13 Februari 1951-18 Maret 1959 asli, pertinggal 1 sampul

#### **Tunjangan**

102 Surat-surat tentang tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman.

> 02 Juni 1950-14 Februari 1958 asli, pertinggal, tembusan, konsep, salinan 1 sampul

#### Pakaian Dinas

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Panitera Pengadilan Negeri 103 Situbondo tentang permintaan pakaian opas kantor Jawatan Kepenjaraan.

30 September-27 Oktober 1950

asli, pertinggal 5 lembar

#### **Kesehatan**

104 Surat-surat tentang pemberian ganti rugi pengobatan (restitusi) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

> 19 Mei 1950-17 Maret 1960 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

## Perumahan

105 Surat-surat tentang perumahan untuk pegawai Kementerian Kehakiman

> 28 Februari 1951-03 Juni 1957 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

#### Pendidikan

106 Surat dari Menteri Kehakiman kepada seluruh Jawatan di lingkungan Kementerian Kehakiman tentang persediaan tempat disekolah untuk anak-anak pegawai negeri.

> 24 Mei 1951 pertinggal 1 lembar

#### Uang Pemulihan

107 Surat-surat tentang penetapan pemberian uang pemulihan pada pegawaipegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman.

> 19 Oktober 1951-23 Desember 1953 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

## **Koperasi**

108 Daftar pembelian anggota Koperasi Kabinet Perdana Menteri dan barang-barang yang dapat dibeli di Koperasi Kementerian Kehakiman Pusat.

> 31 Desember 1953 dan 1960 fotokopi 1 sampul

## Pemberhentian dan Pensiun

#### Pemberhentian

109 Surat-surat tentang pemberhentian pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1950.

19 Agustus-27 Desember 1950 asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi

1 sampul

110 Surat-surat tentang pemberhentian pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1951.

02 Januari-20 Desember 1951

asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi

1 sampul

111 Surat-surat tentang pemberhentian pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1952.

04 Januari-31 Desember 1952

asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi

4 lembar

112 Surat-surat tentang pemberhentian pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman RI tahun 1953-1957.

23 Januari 1953-11 Oktober 1957

asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi

1 sampul

Berkas tentang pemberhentian sementara pegawai (warga negara asing) di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.

13 September-21 Desember 1950

asli, salinan, fotokopi

1 sampul

#### Pensiun

114 Berkas tentang pemberian uang pensiun pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman.

23 November 1950-11 Juni 1959

asli, pertinggal, salinan, tembusan, fotokopi

1 sampul

Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada Menteri Kehakiman RI tentang aturan pemberian pensiun, uang tunggu, dan tunjangan bagi pegawai yang diberhentikan berdasarkan persetujuan KMB.

29 Juni 1951

asli

1 sampul

### Data Perorangan

Berkas tentang permohonan kejelasan "Positieregeling" Tuan dan Nyonya Muskee, Heilsofficier di Bandung.
 Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

09 Desember 1948-08 April 1952 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

117 Surat-surat tentang daftar riwayat hidup dan personal file pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman.

16 September 1950-19 Juni 1959 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

Surat dari Kepala Bagian Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian tentang penyampaian kutipan surat putusan Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai mengenai kedudukan Drs. C. A. Noor.

13 Januari 1951 pertinggal 4 lembar

Surat-menyurat antara Kepala Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman dengan Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan H.C.C. Starting tentang pengiriman formulir untuk transfer tabungan pada de Javasche Bank a.n. Tn. Mr. J.P. Tiddens. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

10 April-30 April 1952 asli, salinan, pertinggal 1 sampul

120 Surat dari Kementerian Kehakiman RI kepada Kementerian Dalam Negeri tentang penyampaian Daftar Riwayat Hidup Menteri Kehakiman K. R. M. T Mr. Wongsonegoro.

> 20-23 April 1951 pertinggal 8 lembar

121 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Panitia Nederland Helpt Indie tentang pemberitahuan alamat tinggal W.F. Sornsen De Koste, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Surabaya. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

> 14 November-06 Desember 1951 asli, konsep, pertinggal 3 lembar

## 3. Keuangan

#### Pencairan Anggaran

Surat-surat tentang pemberian uang persediaan di lingkungan Kantor Catatan Sipil, Pengadilan-pengadilan Negeri, dan Balai Harta Peninggalan.

> 30 September 1950-11 Februari 1953 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

Surat-surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada 123 semua Kementerian tentang pemberitahuan pembukaan kredit anggaran pada de Javasche Bank tahun 1951.

> 14 November-14 Desember 1950 salinan 2 lembar

124 Surat dari Kejaksaan Negeri Daerah Aceh kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian surat kawat mengenai permohonan otorisasi untuk ransum.

> 15 November 1950 asli 2 lembar

125 Surat-surat tentang permintaan kredit anggaran untuk belanja barang dari Kantor-kantor Pegadilan Negeri anggaran tahun 1950.

> 30 November-08 Desember 1950 asli, pertinggal 1 sampul

126 Daftar Uang Muka yang disediakan untuk keperluan dinas di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri, Pendaftaran Tanah, Imigrasi, 1951-1954

asli

1 sampul

## Pendapatan

#### Pajak

127 Surat-surat tentang pembayaran pajak di lingkungan Kementerian Kehakiman.

Nb. Sebagian rusak ringan.

07 Mei 1951-03 Januari 1961 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

#### Penerimaan Negara Bukan Pajak

Surat-surat tentang penyetoran uang denda dan ongkos-ongkos perkara. 128 Nb. Rusak ringan.

> 16 Oktober 1950-19 September 1956 asli, pertinggal 1 sampul

129 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Pengadilan Negeri Surakarta/Boyolali tentang aturan mengenai tarif Justitiekosten dan Salarissen.

> 09-25 November 1950 pertinggal 3 lembar

130 Surat-surat tentang bea materai untuk akta dan buku-buku catatan sipil.

> 30 Agustus 1951-19 Juni 1952 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 1 sampul

### Piutang

131 Surat-surat tentang pemberian pinjaman uang kepada pegawai.

> 10 Desember 1950-13 Mei 1957 pertinggal 6 lembar

132 Surat-surat tentang penagihan pembayaran hutang-hutang pegawai Kehakiman RI yang sudah pensiun kepada negara.

12 Desember 1950-28 Maret 1953 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

Surat-surat tentang penghitungan kembali atas pemotongan delegasi Dr.B. Damen yang telah dibayar di Belanda.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

21 Desember 1950-12 Maret 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan 9 lembar

134 Surat-surat dari Kepala Biro Perbendaharaan Kementerian Kehakiman kepada Kejaksaan tinggi tentang penagihan untuk pembayaran alat-alat kantor/tulis menulis dan gambar Presiden.

06 Januari-10 Mei 1951 asli 1 sampul

# Pengembalian Sisa Anggaran

135 Surat-surat tentang pengembalian sisa anggaran.

29 November 1951-06 Desember 1956 asli, pertinggal 1 sampul

## Pembelanjaan

#### Aturan

136 Surat-surat tentang usul Kepala Jawatan Kereta Api mengenai cara membayar biaya angkutan barang negara.

31 Oktober 1950-21 Februari 1951 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

137 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang/Temanggung tentang permintaan surat edaran KPP Nomor 7 tanggal 1 Maret 1951 dan Nomor 9/SE/KPP tanggal 16 Maret 1951.

22 Mei 1951 pertinggal 2 lembar 138 Surat dari Wakil Kepala Biro Perbendaharaan Kementerian Kehakiman tentang cara meminta dan membayar uang lembur pegawai.

> 29 Oktober 1951 fotokopi 4 lembar

139 Surat dari Menteri Keuangan kepada semua Kementerian tentang penyelesaian pengeluaran-pengeluaran berhubungan dengan adanya perubahan pada "Indonesische Comptabiliteitswet (ICW)".

> 11 Januari-15 Februari 1954 tembusan 4 lembar

## Pembayaran Pembiayaan

140 Surat-surat tentang pembayaran belanja barang dan jasa di lingkungan Kementerian Kehakiman.

> 06 Februari 1950-15 Desember 1960 asli, pertinggal, konsep, salinan, tembusan 1 sampul

141 Surat-surat tentang pembayaran sewa persil dan rumah oleh Kementerian Kehakiman.

> 09 Februari 1950-11 Januari 1952 asli, pertinggal 1 sampul

142 Surat-surat tentang pembayaran biaya perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Kehakiman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan rusak ringan.

18 September 1950-19 Mei 1958 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

143 Berkas tentang perhitungan ongkos ke luar negeri untuk pegawaipegawai perusahaan energi.

Nb. Rusak ringan dan sebagian Bahasa Belanda.

19 September-07 Oktober 1950 asli, pertinggal 1 sampul 144 Surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Kehakiman tentang permintaan penyelesaian pembelian di luar negeri dan pengawasan secara sentral dari kredit-kredit guna pembelian sertifikat-sertifikat devisen.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

22 November 1950-09 Juni 1951 pertinggal 1 sampul

145 Surat dari Kementerian Keuangan kepada Menteri Kehakiman tentang permohonan Firma Liem untuk mendapat tambahan harga beras untuk pembayaran pemasokan makanan ke Penjara Cipinang.

> 28 Desember 1950-02 Maret 1951 asli 8 lembar

146 Surat Perintah Membayar dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia untuk pembayaran sepeda pegawai. Nb. Rusak ringan.

> 29 Oktober 1953 tembusan 4 lembar

### Pemberian Sumbangan

147 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Panitia Penyelenggara Konferensi Komite Perkebunan tentang pemberian sumbangan kepada utusan-utusan luar negeri pada Konferensi ILO.

> 15 November-05 Desember 1950 pertinggal, konsep, asli 3 lembar

148 Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Jawa Tengah kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tentang uang duka. Nb. Rusak ringan.

> 01 Desember 1955 tembusan 1 lembar

#### Pembukuan

149 Kartu-kartu pembukuan keuangan mengenai Afwezig Eigenaren, Onkosten, en Schulden.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

20 Agustus 1948-31 Mei 1959 asli, pertinggal 1 sampul

150 Kartu-kartu pembukuan keuangan mengenai Baten Gedelegeerden, Kekayaan Nijverheid, dan Baten Tariefkosten. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

> 11 Juli 1952-29 Januari 1960 asli 1 sampul

# Pertanggungjawaban

Laporan

151 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di berbagai Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dll tahun 1950. Nb. Lampiran tidak lengkap.

> 11 Oktober-24 November 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

152 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan berbagai Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dll tahun 1951.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan sebagian rusak sedang.

01 Januari-05 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep, tembusan 1 sampul

153 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Catatan Sipil, dll tahun 1952. Nb. Lampiran tidak lengkap.

> 23 Januari-31 Desember 1952 asli 1 sampul

154 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri, Pendaftaran Tanah, Kantor Imigrasi, dan Balai Harta Peninggalan di wilayah KPPN Medan tahun 1952, 1953, 1955.

> 12 Mei 1952-15 November 1955 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

155 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri dan Kantor Pendaftaran Tanah di wilayah KPPN Padang tahun 1952, 1954, 1955.

> 22 September 1952-07 Desember 1955 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

156 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan Kantor Pendaftaran Tanah di wilayah KPPN Bandung tahun 1952-1954.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

22 Oktober 1952-28 Desember 1954 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

157 Surat-surat tentang pengiriman pertanggungjawaban Perwakilan Luar Negeri Kementerian Kehakiman, Kejaksaan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Kupang, dll, kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tahun 1952-1956.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

31 Desember 1952-28 Desember 1956 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

158 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di berbagai Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dll, tahun 1953. Nb. Lampiran tidak lengkap.

> 14 Januari-03 November 1953 asli 1 sampul

159 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan Kantor Imigrasi di wilayah KPPN Padang tahun 1953.

> 24 Maret-01 Juli 1953 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di beberapa
 Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dll, tahun 1955.
 Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

10 Januari-30 Desember 1955 asli, pertinggal, salinan, tembusan 1 sampul

 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan di beberapa Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dll, tahun 1956.
 Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak sedang.

> Januari-27 Desember 1956 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

Daftar pertanggungan jawab bulanan alat-alat kantor yang dipesan dan digunakan Panitia Pemulihan Hak Jakarta.

20 Oktober 1950-24 Februari 1960 asli, pertinggal 1 sampul

Surat-surat pengantar pengiriman daftar pertanggungan jawab dari Kementerian Kehakiman kepada Dewan Pengawas Keuangan. Nb. Lampiran tidak ada.

> 26 Oktober 1950-12 Juli 1956 pertinggal 1 sampul

164 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Jawatan Perjalanan Negeri tentang pengiriman surat-surat pertanggungjawaban biaya pengangkutan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Padang, dll.
Nb. Lampiran tidak lengkap.

07 Maret 1951

asli, pertinggal 8 lembar

Berkas pertanggungjawaban ongkos Kantor Pendaftaran Tanah Kuta Raja.

Nb. Rusak ringan

25 Juli 1952 asli 1 sampul

166 Surat dari Kepala Biro Perbendaharaan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama Bagian Perbendaharaan tentang pengembalian pertanggungjawaban keuangan Kementerian Agama yang salah dikirimkan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.

19 September 1953 pertinggal 3 lembar

Daftar pertanggungjawaban keuangan untuk biaya perayaan peringatan 17 Agustus 1957.

13 Agustus-14 September 1957 asli, pertinggal 1 sampul

# Pemeriksaan

168 Berkas tentang pemeriksaan pembukuan keuangan Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak oleh Akuntan Negara berhubung dengan pembubaran panitia tersebut.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

17 Januari 1949-14 Desember 1960 asli, tembusan 1 sampul

Surat dari Dewan Pengawas Keuangan kepada Menteri Kehakiman tentang keberatan atas penyelesaian laporan mengenai penggelapan uang, pencurian, dan kerugian yang diderita oleh negara.

24 November 1951-23 Juni 1955. asli 7 lembar

170 Berkas tentang pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Balai Harta Peninggalan Bandung tahun 1952.

01 Desember 1951-31 Desember 1952 asli, pertinggal 1 sampul

171 Surat-surat tentang pemeriksaan perijinan retribusi.

02 Januari 1953-14 Juni 1954 asli, pertinggal 5 lembar

172 Surat-menyurat antara Kepala Sub Biro Pemeriksa Pengeluaran Belanja Barang Biro Perbendaharaan Kementerian Kehakiman kepada Bank Rakyat Indonesia tentang pemeriksaan pengiriman uang yang tidak diketahui asal usulnya.

08 Juli-24 Desember 1953 asli, pertinggal 7 lembar

173 Surat dari Kantor Pusat Perbendaharaan Jakarta kepada Sub Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan pada Kementerian Kehakiman tentang penyampaian jawaban nota keberatan atas penyetoran sisa uang lebih.

16 April 1955 asli 2 lembar

### 4. Perlengkapan

## Pengadaan

Surat-surat tentang pengadaan alat tulis kantor dan keperluan rumah tangga di lingkungan Kementerian Kehakiman.
 Nb. Rusak ringan.

26 Januari 1950-25 Maret 1965 asli, salinan 1 sampul

175 Surat-surat tentang permintaan gedung kantor untuk Kejaksaan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Pengadilan Negeri Klaten, dan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang selama ini menumpang pada rumah pendeta dan rumah-rumah kepala daerah.

23 September 1950-03 Desember 1951 asli, pertinggal, tembusan 10 lembar 176 Surat dari Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah kepada Kementerian Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum tentang permohonan tambahan bangunan.

09 Oktober 1950 tembusan 1 lembar

177 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam Negeri dan saudara Nurgani, Bujung Taher, Bujung Gadang, dll tentang urusan perumahan kota Bengkulu.

06 November 1950 konsep, pertinggal 6 lembar

178 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Jaksa Agung dan Kepala Kantor Berita A.P.B. tentang pemeriksaan atas kegagalan permohonan Kantor Berita A.P.B. untuk mendapat kendaraan.

24 November 1950-08 Maret 1951 pertinggal, asli, salinan 1 sampul

179 Surat dari Gubernur Jawa tengah kepada Kementerian Kehakiman tentang perkakas kantor untuk Kantor Pencatatan Jiwa Purbalingga.

30 November 1950 asli

3 lembar

Surat dari Walikota Padang kepada Kepala Jawatan Urusan Perumahan Padang tentang permohonan rumah untuk Prawotokoesoemo, Ketua Pengadilan Negeri yang baru dipindahkan ke Padang, disertai lampiran.

> 18 Januari 1951 tembusan 3 lembar

181 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Kehakiman Yogyakarta tentang pemberitahuan bahwa telah tersedia rumah bagi Warsono, Kasan, dan Ali Afandi, yang akan berangkat ke Jakarta.

25 Januari 1951 pertinggal

Surat-surat tentang pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan sepeda, 182 sepeda motor, dan mobil serta perangkat-perangkatnya untuk pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman tahun 1951-1953.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan rusak ringan.

08 Februari 1951-28 Desember 1953 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

183 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Menteri Kehakiman tentang permohonan menyewa tempat beristirahat para pegawai di Puncak.

> 10 Maret 1951 asli 1 lembar

184 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Nyonya R.R. Zitter tentang permintaan agar Nyonya R.R. Zitter segera menyusul suaminya yang sudah dipindahkan ke Jakarta dan sudah disediakan rumah di Depok.

> 13 Maret 1951 konsep, pertinggal 2 lembar

185 Surat dari Kepala Jawatan Harta Peninggalan kepada Kepala Biro Anggaran Belanja Kementerian Kehakiman tentang pembelian (pengadaan) mesin tulis Continental untuk Jawatan Harta Peninggalan, disertai lampiran.

> 25 Mei 1951 asli 3 lembar

186 Surat-menyurat antara Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Sekretaris Jenderal dan Menteri Kehakiman tentang sewa-menyewa gedung untuk Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya.

> 01-18 Juni 1951 asli, pertinggal 8 lembar

187 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Urusan Perumahan Jakarta Raya tentang permintaan tempat tinggal untuk R.B. Van Tongeren (advokat dan pengacara di Jakarta) dan Ismael Marbaja (Pegawai Kementerian Kehakiman).

> 17 Oktober 1951-17 April 1952 pertinggal 8 lembar

188 Surat dari Jaksa Agung pada Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tentang permintaan gedung untuk Kejaksaan Banjarnegara.

16 Februari 1952

asli

1 lembar

189 Surat-surat tentang pengadaan lambang negara, ruang sidang, gedung negeri yang dipakai Angkatan Perang, dan rumah yang ditinggali jaksa. Nb. Rusak ringan

17 Mei 1952-28 Desember 1953

asli

6 lembar

190 Surat-surat tentang permintaan daftar blanko bergaris untuk tahun 1952 pada Kantor Catatan Sipil Surabaya. Nb. Arsip tidak lengkap.

> 21 Agustus-25 September 1952 asli, fotokopi, tembusan 3 lembar

191 Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Perekonomian Umum Jawa Timur tentang Penunjukan saudara Indra Surjokusumo sebagai juru pembagi yang bertanggung jawab dalam pembelian dan penjualan sepeda tahun 1953.

> 27 Maret 1953 tembusan 2 lembar

192 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Percetakan Negara tentang pemesanan beberapa nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

> 30 Maret 1954 pertinggal, konsep 2 lembar

193 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri Kepada Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri dll tentang penyewaan gedung-gedung dan rumah partikelir.

> 28 Desember 1954 asli, salinan 4 lembar

194 Surat-surat tentang sewa-beli sepeda dan mobil untuk pegawai Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

> 07 Oktober 1955-06 Agustus 1959 asli, salinan 1 sampul

195 Nota-nota M. Sudardjat kepada Menteri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman antara lain tentang permohonan kendaraan dinas berupa motor/Jeep, gedung kantor, rumah pegawai, dll.

> TT fotokopi 1 sampul

### Penggunaan dan Pemeliharaan

Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Komandan Corps Polisi 196 Militer tentang permintaan surat keterangan berjalan malam untuk pegawai Kementerian Kehakiman dalam rangka menjalankan tugas dalam hal pengangkutan dan kendaraan.

> 09-11 Januari 1951 konsep, pertinggal 5 lembar

197 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Menteri Kehakiman tentang pemeliharaan dan perbaikan kecil pada rumah para Menteri.

> 02 Maret 1951 salinan 1 lembar

198 Surat dari Kepala Jawatan Penjara kepada Kementerian Kehakiman tentang peminjaman gedung Penjara Bulu kepada tentara.

> 30 Maret 1951 asli, salinan 4 lembar

199 Surat dari Kepala Kantor Besar Pos dan Telegrap kepada Kementerian Kehakiman tentang memperbaiki kartu tanda tangan model T.8.

> 07 Juni 1951 asli 3 lembar

200 Surat-surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Menteri Penerangan dan Pemimpin Radio RI tentang permintaan peminjaman alat-alat geluidinstallaties (sistem suara).

> 09 Juli 1951 pertinggal 3 lembar

201 Surat dari Kepala Staf Umum Angkatan Darat kepada Kementerian Kehakiman tentang pengembalian Gedung Raad Semarang.

> 18 Juli 1951 asli 1 lembar

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Pertahanan dan Jaksa 202 Agung pada Mahkamah Agung tentang pemakaian asrama imigran.

> 04 September 1951 pertinggal 2 lembar

203 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada seluruh Kepala Bagian di Kementerian Kehakiman, dll, tentang akomodasi bagi para pegawai yang dipindahkan ke Banjarmasin.

> 18 Desember 1951 pertinggal 1 sampul

204 Surat-surat Kepala Jawatan Gedung-gedung Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Kepala Jawatan Imigrasi tentang pemberian sebagian gedung pemondokan para imigran di Tanjung Priok.

Nb. Rusak sedang.

14 Februari-15 Oktober 1952 tembusan 2 lembar 205 Surat dari Corps Polisi Militer Bn VII kepada Kapten/Infantri Sriaman Kep.D.B.T.T.VII tentang pengiriman berita acara timbang terima penyerahan Rumah Tahanan Militer di Makassar.

18 Februari 1952 asli 2 lembar

206 Surat dari Pemimpin Jawatan Gedung-gedung Surabaya kepada Kepala Jawatan Gedung-gedung Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga melalui Menteri Kehakiman tentang penguatan Gedung Kejaksaan Pengadilan Negeri Surabaya.

01 Maret-16 Mei 1952 tembusan 9 lembar

207 Surat-surat dari Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Jakarta kepada Menteri Kehakiman tentang pengumuman mengenai perumahan, laporan keadaan di gudang-gudang *Veemcombinatie* Jakarta dan Gedung Pengadilan Tinggi.

Nb. Sebagian rusak sedang.

09 Mei-17 November 1952 asli, salinan 8 lembar

208 Surat-menyurat antara Panitia Perumahan Pegawai Negeri dengan Kementerian Kehakiman tentang daftar pegawai yang mempunyai V.B. Nb. Rusak ringan

> 11 September 1952-04 Oktober 1952 asli, pertinggal, konsep 9 lembar

209 Surat-surat dari pegawai-pegawai Kejaksaan Agung kepada Kepala Bagian Pemeliharaan Pegawai Kementerian Kehakiman tentang permohonan peminjaman barang-barang di rumah dinas. Nb. Rusak berat.

> 07 November 1952-17 Desember 1952 asli 4 lembar

210 Berkas tentang pengiriman laporan bulanan mengenai pemakaian dan jumlah kilometer kendaraan bermotor di lingkungan Kementerian Kehakiman kepada Jawatan Perjalanan.

Nb. Sebagian rusak sedang.

28 November 1952-11 November 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

211 Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi kepada Kementerian Kehakiman tentang peninjauan kembali surat ijin tinggal hotel/mess.

> 06 Agustus 1953 1 lembar asli

212 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Kepala Bagian Lalu Lintas Jalan dan Sungai tentang pengangkutan pegawai dengan bis

02 November 1953

tembusan

1 lembar

213 Berkas tentang inventarisasi alat-alat perbengkelan pada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak yang hilang dalam tahun 1958 dan persediaan alat-alat perbengkelan untuk bulan Maret 1960.

> 02 April 1959-08 April 1960 asli 1 sampul

214 Daftar pemakaian bensin periode Maret 1960 disertai bon-bon pemakaian bensin untuk angkutan bermotor pada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

> 09 April 1960 asli 1 sampul

## Penyusutan

Surat-surat dari Petugas Penyelesaian Pembubaran Panitia Pemulihan Hak kepada Dinas Perindustrian Sumatera Selatan, M. Mollemaar, dll tentang permintaan pengiriman blanco untuk penyelenggaraan penjualan besi tua dan bangunan-bangunan bengkel, dll Nb. Rusak ringan.

> 24 Oktober 1960-21 April 1961 asli, pertinggal, konsep

## 5. Organisasi dan Tata Laksana

### Organisasi

## Pembentukan

216 Surat-surat tentang penunjukan agen-agen Jawatan Imigrasi.

18 Juli-09 Oktober 1950

asli

7 lembar

217 Berkas tentang pembentukan daerah hukum pengadilan negeri.

09 Agustus 1950-29 Agustus 1957

asli, pertinggal

1 sampul

218 Surat Penetapan Menteri Kehakiman No. J.P.2/113/23 Tahun 1950 tentang penetapan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari daerah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

21 Oktober 1950

fotokopi

1 sampul

219 Berkas tentang pembentukan kantor Imigrasi Pekanbaru, Ambon, Padang, Manado, dan Bengkalis.

03 November 1950-10 November 1956

asli

1 sampul

220 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Gubernur Sumatera Tengah tentang usul pembentukan Kantor Imigrasi di Pekanbaru berkaitan dengan dibukanya penerbangan di daerah tersebut oleh Garuda Indonesia Airways.

20 November 1950

tembusan

2 lembar

221 Surat dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehakiman RI tentang pembentukan dinas *intelligence* dan *security*.

06 Februari 1952

asli

4 lembar

222 Memo-memo tentang tambahan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tentara, Kejaksaan, Kepolisian, dll.

TT pertinggal 1 sampul

#### Perubahan

223 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1950 tentang perluasan daerah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

03 Juni 1950 salinan 1 lembar

224 Berkas tentang struktur, organisasi, tata kerja dan kedudukan Kementerian Kehakiman RI.

25 Agustus 1950-12 Agustus 1957 asli 1 sampul

Berkas tentang Kedudukan Kejaksaan di Indonesia.Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

13 November 1950-06 September 1956 konsep, asli, pertinggal 1 sampul

226 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Tentara Tinggi tentang tempat kedudukan Kejaksaan Tentara Tinggi Yogyakarta dan daerah hukumnya.

> 09 Januari 1951 pertinggal 1 lembar

227 Berkas tentang kedudukan, penghapusan dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tentara.

23 Januari-17 Oktober 1951 asli 7 lembar

228 Berkas tentang tata laksana dan status Kepolisian di pemerintahan.

21 Februari-19 Desember 1951 asli 5 lembar

229 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri di Purwokerto kepada Menteri Kehakiman tentang usul penggabungan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Purbalingga.

> 03 Juli 1951 asli 1 lembar

230 Berkas tentang usul menaikkan kedudukan Pengadilan Negeri Pare-pare dari kelas IV menjadi kelas III.

12 Mei-07 September 1953 asli, pertinggal 1 sampul

Berkas tentang penyesuaian wilayah Jaksa Tentara dengan wilayah pengawasan Kejaksaan.

15 Agustus-26 September 1953 asli 3 lembar

232 Surat dari Jaksa Kepala pada Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Jaksa Agung tentang susunan Kepala Cabang Kejaksaan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Padang.

27 Agustus 1953 tembusan 4 lembar

233 Surat-surat Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang pemberitahuan pernyataan keberatan Persatuan Pegawai Polisi RI di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Tengah atas rencana pengorganisasian Kepolisian di bawah Kementerian Kehakiman.

12-14 November 1953 asli, pertinggal 1 sampul

234 Surat dari Kepala Jawatan Kepenjaraan kepada Ketua Yayasan Badan Keselamatan Masyarakat (BKM) tentang Pengoperan BKM oleh Jawatan Kepenjaraan.

01 Februari 1954

tembusan 1 lembar

### Pembubaran

235 Berkas tentang Pembubaran Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

21 Agustus 1951-30 Maret 1961 asli, fotokopi, konsep 1 sampul

236 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Pengadilan Tinggi di Medan tentang penghapusan Pengadilan Adat.

27 Oktober 1951 tembusan 1 lembar

237 Surat dari Kejaksaan Kabupaten Kotawaringin di Sampit kepada Pengawas Kejaksaan Provinsi Kalimantan di Banjarmasin tentang penghapusan dan pemindahan Pengadilan atau Kejaksaan Swapradja Kalimantan.

> 06 Juni 1952-20 Juni 1955 asli 1 sampul

238 Surat Putusan Menteri Kehakiman tentang penutupan sementara Penjara Kuala Kuran Pegatan dan Purukjahu di Kalimantan Selatan.

> 07 April 1954 asli 1 lembar

### Tata Laksana

239 Surat dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehakiman tentang usul tidak diadakannya sidang perkara pidana dalam bulan Puasa.

29 Mei-16 Juli 1952 asli 2 lembar

240 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dll, tentang Instruksi Menteri Pertahanan tanggal 1 September 1953 No. III/H/16/53 mengenai Pemeliharaan Badan-badan Pengadilan dan Kejaksaan Ketentaraan.

01 September 1953-18 Februari 1954

pertinggal, fotokopi 2 lembar

241 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang pedoman pemakaian senjata api.

02 September 1953 pertinggal 1 lembar

242 Surat dari Kepala Bagian Hukum Pidana dan Ketentaraan Kementerian Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang pelaksanaan program pemerintah mengenai keamanan.

> 17 November 1953 asli 1 lembar

243 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang pemberhentian persidangan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh selama bulan puasa yang mengakibatkan berkas perkara menumpuk, disertai lampiran.

> 08-30 Desember 1955 pertinggal, salinan 3 lembar

### 6. Ketatausahaan

## Tata Naskah Dinas

244 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Jaksa Agung tentang usul diadakannya kesatuan "Cap Jawatan" Kejaksaan Sipil.

19 Oktober 1950-28 Februari 1951 asli, pertinggal 4 lembar

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Mr. Ali Affandi Kementerian Kehakiman di Yogyakarta tentang permohonan pemberian cap/tanda tangan pada surat-surat penetapan.

15 Januari 1951 pertinggal 3 lembar

## Tata Persuratan

246 Surat dari Sekretaris Jenderal kepada Kantor Panitia Penyelesaian Pemulihan Hak tentang permintaan pengembalian lampiran-lampiran surat kepada Tan Sie Ing.

14 Juni 1950 asli 2 lembar

247 Surat-menyurat antara Hakim Pengadilan Negeri Kutaraja di Blangkejeren dengan Sekretaris Kementerian Kehakiman tentang permintaan pengembalian surat dari Pengadilan Negeri Kutaraja yang seharusnya dikirimkan ke Pengatur Balai Pustaka di Jakarta.

18 November-23 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

248 Surat Edaran dari Panitera Pengadilan Negeri Ngawai/Magetan kepada Kementerian Kehakiman tentang tujuan surat-menyurat berhubung dengan penggabungan Pengadilan Negeri Ngawi dan Magetan.

21 Desember 1950 asli 2 lembar

249 Surat dari Kepala Jawatan Pajak kepada Kementerian Kehakiman tentang pemberitahuan agar surat untuk Kantor Penetapan Pajak di Serang dialamatkan ke Kantor Inspeksi Keuangan di Bogor.

09 Januari 1951 asli 1 lembar

250 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang anjuran agar surat-surat yang ditujukan kepada Pemerintah Agung (Perdana Menteri) ditandatangani oleh Jaksa Agung atau Kementerian Kehakiman.

> 20 Februari 1951 pertinggal, konsep 2 lembar

251 Surat dari Kepala Bagian Urusan Umum Bekas Kementerian Kehakiman Indonesia Timur kepada Menteri Kehakiman RI tentang pengiriman surat-surat yang dialamatkan ke Kementerian Kehakiman Indonesia Timur ditujukan ke Kementerian Kehakiman Jakarta.

> 04 Juni 1951 asli 1 lembar

252 Surat dari Kepala Catatan Sipil Surabaya kepada Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman tentang usul agar surat mengenai pengesahan tanda tangan ditujukan langsung ke Pengadilan Negeri di Surabaya.

01 Desember 1951-16 Januari 1952

asli

2 lembar

253 Buku agenda surat masuk dan surat keluar tahun 1951-1953.

1951-1953

asli

1 sampul

254 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang penyampaian surat-surat mengenai permintaan Kedutaan Inggris yang dianggap ditujukan ke Mahkamah Agung.

Nb. Lampiran tidak ada.

12 April 1952 pertinggal 1 lembar

255 Surat dari Jaksa Pengadian Negeri Raba (Bima) kepada Kementerian Kehakiman tentang pemberitahuan bahwa dalam surat-menyurat hendaknya dikirimkan pada Jaksa Pengadilan Negeri Raba saja bukan Bima.

Nb. Rusak ringan.

17 Oktober 1952 asli 1 lembar

256 Surat dari Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Bangil kepada Kejaksaan Agung tentang permintaan agar telegram yang dikirimkan ke Kejaksaan Pengadilan Negeri Bangil tidak menggunakan alamat singkatan.

03 April 1954

asli 1 lembar

257 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang penyampaian surat dari Sao Paulo.
Nb. Lampiran tidak ada.

15 September 1956 pertinggal 1 lembar

### Penyusutan

258 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, dan Mahkamah Agung, tentang permintaan izin Pengadilan Negeri Salatiga untuk membakar berkas-berkas perkara tahun 1877-1894.

17 Oktober-21 Desember 1953 asli 1 sampul

# 7. Hubungan Masyarakat

# Keprotokolan

## Acara Kedinasan

259 Surat-surat tentang undangan peresmian, pelantikan, pertandingan serta peringatan hari-hari besar antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Jawatan Imigrasi, dan Partai Republik Indonesia.

13 September 1950-06 September 1957 asli 1 sampul

260 Berkas tentang Konferensi Dinas Kehakiman di Medan.

29 November 1950-30 Januari 1951 asli, pertinggal 1 sampul

261 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Menteri Agama tentang penyampaian teks pidato "Memelihara Modal Perjuangan" yang disiarkan melalui Radio RRI.

> 23 Oktober-28 November 1953 asli, tembusan 1 sampul

Surat dari Perdana Menteri kepada Para Menteri tentang dispensasi kepada para pengunjung Kongres Veteran.

06 Desember 1956 tembusan 1 lembar

263 Sambutan J.M Wakil Perdana Menteri III Dr. Chairul Saleh pada Dies Natalis I Akademi Bahasa Asing Indonesia.

> 05 Januari 1966 asli 1 sampul

264 Kumpulan naskah Pidato Pejabat Presiden RI Jenderal Soeharto pada peringatan ulang tahun Pantja Windu PNI/Front Marhaenis ke-40, Kongres Persit Kartika Chandra Kirana ke IX, sidang DPR-G, dan pada Hari Bahari Nasional.

> 30 Juni-23 September 1967 fotokopi 1 sampul

## Kunjungan Dinas

265 Surat-surat tentang kunjungan dinas Presiden, Menteri dan pejabat pemerintah lainnya, dalam maupun luar negeri.

11 Oktober 1950-12 November 1956 asli, salinan, pertinggal, konsep 1 sampul

## Daftar Alamat Pejabat

Surat Pengantar Kabinet Presiden RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman tentang pengiriman daftar alamat petinggipetinggi negara RI di Jakarta (list of the highest Indonesian authorities at Jakarta).

30 Oktober 1950 asli 9 lembar 267 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Kepala Kepolisian Indonesia tentang permintaan alamat dan nomor telepon kantor dalam lingkungan Kementerian Kehakiman dalam rangka mempermudah koordinasi proses pekerjaan sehari-hari.

13-18 November 1950 asli, pertinggal 5 lembar

268 Surat-menyurat antara Sekretaris Kementerian Kehakiman dengan Balai Bahasa Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tentang permintaan alamat Jawatan-Jawatan pada Kementerian Kehakiman dalam rangka pengiriman majalah "Medan Bahasa".

> 28 Juli-07 Agustus 1951 asli, pertinggal 7 lembar

269 Surat-surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Direktur Kabinet Presiden, Perdana Menteri, dll, tentang pemberitahuan perubahan alamat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, M. Besar Martokoesoemo dan Menteri Kehakiman, Loekman Wiriadinata.

03 November 1951-25 Juli 1952

pertinggal 1 sampul

270 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Kementerian Keuangan tentang alamat Tuan J.W.J. Grevelink, pegawai Kementerian Kehakiman.

17 September 1952 asli, pertinggal 3 lembar

271 Surat-menyurat antara Sekretaris Kementerian Kehakiman dengan Kepala Bagian Penerbitan Kementerian Agama tentang pengiriman alamat Kepala Kantor dan organisasi di lingkungan Kementerian Kehakiman dalam rangka pembuatan Almanak Kagri tahun 1955.

04 September 30 September 1954 asli, pertinggal 6 lembar

272 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden, Perdana Menteri, dll, tentang penyampaian daftar alamat dan nomor telepon kantor dan rumah para Sekretaris Jenderal Kementerian-kementerian.

21 Januari 1958 asli 7 lembar

### Hubungan Kelembagaan

**Pusat** 

273 Surat-surat dari Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai kepada Kepala Bagian Urusan Pegawai Kementerian Kehakiman tentang pertanyaan mengenai kedudukan orang-orang yang bekerja pada *Maatschappij tot Werkeloosheid Bestrijding* apakah sebagai pegawai negeri atau swasta.

10 Oktober 1950-03 Februari 1951 asli 2 lembar

274 Berkas tentang susunan seksi DPR dan kerja sama antara Kementeriankementerian dengan seksi kehakiman, luar negeri, dalam negeri, pertahanan, perdagangan, perindustrian, dll.

> 25 Oktober-07 November 1950 salinan 1 sampul

275 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dll, tentang pengiriman Statement Pemerintah Tanggal 27 Desember 1950 mengenai aksi boikot dan mogok yang mengganggu ketentraman sosial.

> 28 Desember 1950 asli 2 lembar

276 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang permohonan Walikota Malang terhadap ukuran hukuman pelanggaran-pelanggaran peraturan-peraturan kota.

10 Januari 1951 pertinggal 1 lembar

277 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri RI tentang permintaan penduduk Tanjung Balai untuk mengibarkan bendera Tiongkok Nasionalis di samping bendera RI.

27 Januari-10 Juli 1951

asli, tembusan

1 sampul

278 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri tentang pembubaran Panitia Interdepartemental dalam Kasus Gerilya Sulawesi Selatan dan penyelesaian Perkara Tahanan-tahanan Kalimantan Selatan.

12-13 Februari 1951

tembusan

2 lembar

279 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang permintaan pertimbangan atas surat Jaksa Agung mengenai pemakaian lambang negara yang tidak pada tempatnya.

22 Februari 1951

pertinggal

1 lembar

280 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Kepala Jawatan Kepenjaraan tentang pertanyaan mengenai perbedaan istilah pegawai negeri dan buruh.

22 Mei-01 Agustus 1951

asli, pertinggal

5 lembar

281 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Jawatan Pelayaran tentang Kekuasaan memberi "certificate of nationality" untuk kapal Sanfransisco yang dibeli oleh Jakarta Lloyd.

23 Mei 1951

pertinggal, konsep

3 lembar

282 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan kepada semua Kementerian tentang penunjukan Soetedjo Dirdjosoebroto sebagai Wakil Kementerian Penerangan dalam Komisi Antar Kementerian Sementara Guna Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat.

02 Juni 1951

tembusan 1 lembar

283 Surat dari Menteri Pertanian kepada Kabinet Perdana Menteri tentang penolakan permintaan tenaga administrasi ke Menteri Pertanian.

21 Juni 1951 tembusan 1 lembar

284 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang penyampaian surat Kepala Polisian Indonesia Pusat mengenai Badan Pengawasan Rahasian Negara RI.

> 23 Juni 1951 pertinggal 4 lembar

285 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Perburuhan tentang catatan tenaga kerja untuk luar Jawa. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

> 27 Juni 1951 pertinggal 3 lembar

286 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Sekretaris Kementerian Dalam Negeri tentang penyampaian salinan Surat Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak mengenai pengembalian arsip Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo (Menteri Dalam Negeri).

03 Agustus 1951 asli, pertinggal 3 lembar

287 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang permintaan keterangan hasil penyelidikan mengenai surat Residen Lampung dan Kepala Kepolisian di Telukbetung mengenai perayaan 1 Mei yang tidak jadi diadakan.

22 Agustus 1951 pertinggal 1 lembar 288 Surat dari Kepala Bahagian Hukum Pidana dan Ketentaraan kepada Jaksa Agung tentang surat rahasia dari Bupati Serang.

> 06 September 1951 asli 1 lembar

289 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Pertahanan tentang permintaan diluputkan dari sensur dan pas-pas jalan.

> 26 September 1951 asli 1 lembar

290 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai permohonan Nerus Ginting untuk mendapatkan izin meninjau tahanan-tahanan di Sumatera Utara.

> 28 November-Desember 1951 asli, salinan 6 lembar

291 Surat-surat tentang Mosi tidak percaya terhadap anggota Parlemen M. Nur Ibrahimy dan Amelz.

> 19-20 Desember 1951 asli 8 lembar

292 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Pertahanan tentang pertanyaan S.K. Prajitno mengenai pegawai yang ditahan karena dituduh melanggar peraturan SOB.

> 13 Februari 1952 pertinggal 1 lembar

293 Surat-surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang pengumuman-pengumuman Dewan Menteri Republik Indonesia tahun 1953 dan 1955-1956 antara lain mengenai pengangkatan Zainal Abidin sebagai Gubernur Sumatera Utara.

> 22 September 1953-28 Desember 1953 asli, salinan 1 sampul

294 Surat dari Menteri Kesehatan kepada Menteri Kehakiman tentang keinginan pemindahan jenazah dari almarhum J.A Kindangan ke Makam Pahlawan.

> 26 September-05 Oktober 1953 tembusan

> > 3 Lembar

295 Surat-surat Kantor Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tentang penggantian keanggotaan Kementerian Penerangan dalam Panitia Harian dari Panitia Pusat dan penetapan upah buruh kapal di Belawan.

05 Februari 1951-08 Oktober 1953

tembusan

3 lembar

296 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Kantor Pusat Pembelian dan Kementerian Sosial tentang kesalahan pengiriman surat dari Perusahaan Ekspor-Import Serich Scheineman dan Acting Kepala Daerah Sulawesi Tengah.

Nb. Lampiran tidak ada.

24 Februari 1951-27 Oktober 1953 pertinggal, konsep 6 lembar

297 Surat dari K.E. Kohler kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang pemberhentian dirinya yang mendadak.

28 Oktober 1953

tembusan

1 lembar

298 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Jaksa Agung tentang pengibaran bendera di dalam taman-taman makam pahlawan Belanda.

> 29 Oktober 1953 tembusan 3 lembar

299 Surat dari Menteri Pertanian kepada Perdana Menteri tentang penunjukan pengganti tetap Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian sebagai anggota Panitia Koordinasi Interdepartemental.

> 10 November 1953 tembusan 5 lembar

300 Surat dari Dewan Ekonomi Indonesia Pusat kepada Menteri Perhubungan tentang usul keanggotaan penasehat dari Dewan Ekonomi Indonesia Pusat untuk Panitia Penyelesaian Kontrak GIA (Garuda Indonesia Airways).

> 10 November 1953 tembusan 1 lembar

301 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri, Menteri Kehakiman, dll, tentang pengiriman laporan mengenai kegelisahan bekas-bekas militer Belanda.

> 16 November 1953 asli 2 lembar

302 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Perhubungan tentang permohonan penjelasan mengenai cap D.K.A. yang tidak diakui sah oleh Kantor Besar Kehutanan.

> 18 Januari 1954 pertinggal 2 lembar

303 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang penyusunan statistik untuk pengembangan usaha-usaha di daerahdaerah.

> 08 Februari 1954 asli 2 lembar

304 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Menteri tentang jawatan-jawatan kembar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nb. Rusak sedang.

> 08 Februari 1954 tembusan 1 lembar

305 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri tentang hak dasar pegawai negeri.

> 31 Maret 1954 tembusan 1 lembar

306 Surat dari Kementerian Pertanian kepada seluruh jawatan/balai dan kantor di lingkungan Kementerian Pertanian tentang sokongan untuk Fonds Asiade kepada Komite Olimpiade Indonesia.

> 21 April 1954 tembusan 1 lembar

307 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang penyampaian Keputusan Bersama Konferensi Keamanan di Makassar.

> 28 Juni 1954 pertinggal 5 lembar

308 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Wakil Perdana Menteri tentang penolakan usul-usul kenaikan pangkat oleh Kantor Urusan Pegawai.

> 21 Juli 1954 tembusan 2 lembar

309 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum kepada Dewan Menteri tentang pengajuan seorang dari Jawatan Tenaga dalam Panitia untuk Penyelidikan Radio Activiteit.

> 30 September 1954 tembusan 2 lembar

310 Surat dari Jaksa Agung kepada Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Pekalongan tentang jaminan dalam hal penangkapan terhadap pegawai-pegawai dan hak immuniteit anggota DPRD.

> 25 Oktober 1954 tembusan 4 lembar

Surat dari Sekretaris Menteri Kehakiman kepada Mahkamah Agung 311 tentang arahan untuk menyampaikan surat-surat masuk untuk Kementerian Luar Negeri pada bagian Tata usaha.

> 28 Oktober 1954 pertinggal 1 sampul

312 Surat dari Kementerian Agraria Republik Indonesia kepada semua kementerian mengenai timbang terima pimpinan Kementerian Agraria.

> 23 November 1954 salinan 1 lembar

313 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kementerian Dalam Negeri tentang penyampaian Maklumat Kepala Daerah Sumatera Barat. Nb. Lampiran tidak ada.

> 10 Maret 1955 pertinggal 1 lembar

314 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Menteri Kehakiman tentang ralat atas laporan resmi Biro Perancang Negara mengenai Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.

> 27 Oktober 1955 asli 2 lembar

315 Surat edaran Jaksa Agung tentang perintah untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran penggunaan gambar-gambar presiden dan wakil presiden dalam kampanye pemilihan Konstituante.

> 02 Desember 1955 tembusan 2 lembar

## Daerah

316 Surat dari Ketua Panitia Persiapan Negara Kesatuan Sumatera Timur kepada Walikota Medan tentang penunjukan kepala-kepala daerah dan pegawai sementara.

> 20 September 1950 tembusan 1 lembar

317 Surat dari Panglima Tentara dan Territorium Kalimantan kepada Perdana Menteri tentang usul penambahan tenaga secara besar-besaran untuk kantor-kantor pemerintah di Kalimantan.

> 14 Maret 1951 tembusan

2 lembar

318 Surat-surat dari Kepala Jaksa Pengadilan Negeri Bangkalan, Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tentang sebutan titel "Raden".

27 Maret 1951-20 November 1951

asli

3 lembar

319 Surat Keterangan Panitia Pembantu Keamanaan Kota Jakarta tentang pemberhentian pegawainya a.n. Pudolio. Nb. Rusak sedang.

> 01 Juni 1951 asli 1 lembar

320 Surat Keputusan Residen Priangan tentang pemberian ijin kepada Kepala Daerah Kabupaten dan Kota-kota Besar di wilayah Karesidenan Priangan untuk melakukan pengumpulan uang dan barang yang bersifat umum.

> 27 November 1951 tembusan 1 lembar

321 Surat telegram dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Wedana Ambarawa tentang permintaan agar membeli daftar blanko ke Kementerian Kehakiman.

Nb. Arsip tidak lengkap.

23 Januari 1952 pertinggal 1 lembar

322 Surat dari Gubernur Provinsi Kalimantan kepada Perdana Menteri tentang pernyataan Konferensi Pemerintahan dan Keuangan seluruh Provinsi Kalimantan mengenai anjuran kepada pemerintah pusat untuk memperkuat pengawasan pengurusan keuangan.

> 18 April-09 Juni 1953 tembusan 5 lembar

Surat keputusan DPRDS Maluku Tengah tentang persetujuan 323 transmigrasi dari Sulawesi Selatan dengan sejumlah syarat.

> 10 Desember 1953 salinan

324 Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur tentang pemberian ijin kepada Residen Bojonegoro untuk membeli daun hijau krosok tembakau jenis virginia di seluruh Karesidenan Bojonegoro.

> 22 Januari 1954 tembusan 1 lembar

## Hubungan Kemasyarakatan

Surat-surat tentang tuntutan dan dukungan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan politik, serta legislatif daerah, terhadap Pemerintah tahun 1950-1966.

> 19 Oktober 1950-25 Januari 1966 asli, salinan, fotokopi 1 sampul

Surat-surat tentang tuntutan dan dukungan organisasi-organisasi 326 kemasyarakatan dan politik, serta legislatif daerah, terhadap Pemerintah.

> 19 Oktober 1950-25 Januari 1966 asli, salinan, fotokopi 1 sampul

327 Berkas tentang sumbangan darah dari pegawai di lingkungan Kementerian Kehakiman untuk Palang Merah Indonesia (PMI) dan permintaan perhatian sumbangan kepada PMI.

> 07 Juni-17 September 1955 asli, pertinggal 1 sampul

328 Surat-surat tentang permohonan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Nb. Sebagian rusak ringan

31 Agustus 1951-15 Februari 1954 asli 1 sampul

329 Surat dari Pusat Ikatan Penderitan Tjatjat Indonesia kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian keputusan kongres mengenai perubahan nama dan pengurus ikatan tersebut.

05 September 1951

asli 7 lembar

### Hubungan Perusahaan

330 Surat-surat dari Direktur Usaha Penerbitan Gapura di Jakarta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman tentang permintaan pengiriman kelengkapan untuk penerbitan "Almanak Nasional 1951".

15 September-28 Oktober 1950 asli 2 lembar

331 Surat-surat tentang penawaran iklan jasa dan barang dari berbagai instansi ke Kementerian Kehakiman.

02 Januari 1952-31 Desember 1958 asli 1 sampul

### Hubungan Media Massa

332 Surat-surat tentang artikel pada Jawatan Penerangan Pemerintah mengenai dokumentasi kudeta PKI di Madiun.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan Inggris.

18-28 September 1948 fotokopi 1 sampul

333 Artikel yang diajukan oleh Memet Tanumidjaja pada Mimbar Indonesia Nomor 35 tentang perlunya Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

> 02 September 1950 salinan 1 sampul

334 Surat pengantar dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehakiman tentang adanya berita pada Surat Kabar *Aneta* bahwa orang-orang buta huruf di Kecamatan Cinangka tidak dapat menikah.

31 Mei 1951 asli 2 lembar 335 Surat dari Sekretaris Serikat Surat Kabar kepada Kementerian Kehakiman tentang penyampaian resolusi-resolusi dan risalah Kantor Berita Antara mengenai kondisi pers di Indonesia.

> 25 September 1951 asli 1 sampul

336 Artikel Direksi Penerangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Indonesia di Mata Dunia (Suara Pers Luar Negeri Terhadap Tanah Air Kita).

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

29 September 1951 fotokopi 5 lembar

Surat-surat dari Kementerian Penerangan kepada Kementerian 337 Kehakiman tentang Permintaan Bahan Untuk Jawaban R.T.D (Ruang Tanya Djawab).

> 29 September 1951-31 Mei 1954 asli, pertinggal 1 sampul

338 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Menteri Kehakiman tentang pengawasan terhadap surat kabar asing dari RRT.

> 26 Februari 1952 asli 2 lembar

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang peristiwa 339 penurunan bendera Sang Dwi Warna dan bendera palu arit di Harian Rakjat.

Nb. Lampiran tidak ada.

26 September 1955 pertinggal 1 lembar

340 Surat Redaksi Pers Kementerian Penerangan tentang pengiriman kutipan Surat Kabar Indonesia Raya tentang Indonesia tidak akan menjadi komunis.

> 05 Oktober 1955 asli 2 lembar

341 Artikel Kementerian Penerangan yang berasal dari Radio PP 13 Desember 1955 mengenai penyelesaian damai dalam masaah Irian Barat.

> 13 Desember 1955 fotokopi 1 lembar

342 Artikel-artikel Berita Dalam Negeri oleh Yayasan Kantor Berita Nasional ANTARA Edisi Jumat 24 Agustus 1962 antara lain mengenai penerimaan Presiden terhadap para peserta dan panitia Asean Games ke IV di Istana Negara.

> 24 Agustus 1962 salinan 1 sampul

## Hubungan Luar Negeri

343 Surat dari First Secretary Information Departement British Embassy Jakarta kepada H.E. Dr. Wongsonegoro, Menteri Kehakiman, tentang penyampaian salinan pidato tentang Forced Labour yang disampaikan delegasi British pada acara The United Nations Economic and Social Council at Geneva 15 Agustus 1950.

Nb. Bahasa Inggris.

15 September 1950 asli 1 sampul

344 Surat-surat tentang pemberitahuan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri serta berita-berita internasional baik di bidang sosial budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan tahun 1950-1962.

> 27 September 1950-28 September 1962 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

345 Surat Pengantar Menteri Luar Negeri kepada Kementerian Kehakiman tentang pengiriman Landsberg, A Documentary Report. Nb. Lampiran tidak ada.

> 26 Februari 1951 asli 1 lembar

346 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri dan Kepala Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri tentang penyampaian Nota Konsulat Jenderal Ceylon mengenai pengurusan pembayaran untuk kreditur dari Ceylon.

Nb. Sebagian Bahasa Inggris.

16 Juli 1951 pertinggal 1 sampul

347 Surat pengantar dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang pengiriman salinan surat dari Consulat de Suisse di Jakarta mengenai Geneva Convention.

Nb. Sebagian Bahasa Inggris.

09 Agustus 1951 asli 3 lembar

Surat-surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman 348 tentang permintaan pertimbangan atas penyelenggaraan Colombo Plan Exhibition.

> 25 Agustus-05 September 1951 asli 1 sampul

349 Surat-surat tentang pengiriman buku, bulletin dan bahan cetak lainnya, antara lain Bulletin dari Duta Besar China, Vietnam, Polandia, Rumania dan buku tentang ekonomi.

> 25 September 1951-22 Juni 1965 fotokopi 1 sampul

350 Surat dari Sekretaris Menteri Kehakiman kepada Mr. Ernest F. Manfred di New York mengenai pemberian kartu yang disertai tanda tangan Menteri Gondokusumo.

Nb. Bahasa Inggris.

12 Desember 1953 pertinggal 4 lembar 351 Surat-surat dari Persatuan Wanita Dharma Bakti tentang gerakangerakan wanita di Suriname.

> 03 April 1954 asli, fotokopi 3 lembar

352 Surat-surat dari Kabinet Perdana Menteri RI kepada Kementerian Kehakiman RI tentang protokol perjanjian dagang antara Republik dengan Republik Rakyat Romania, Hongaria dan penyampaian memori penjelasan mengenai RUU Darurat tentang perubahan dan tambahan pada D.V.G Reglement.

> 05 Oktober 1954-16 Maret 1955 salinan 1 sampul

353 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang pertanyaan dari Kepala Bagian Perhubungan Pos mengenai aturan pengiriman keris ke luar negeri melalui pos.

Nb. Lampiran tidak ada.

23 Desember 1955 pertinggal 1 lembar

354 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang pengiriman jenazah Jungschlaeger ke Negeri Belanda.

> 24 April 1956 asli 1 lembar

355 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden, Wakil Presiden, dll, tentang pengiriman surat Menteri Keuangan mengenai saran untuk menjadi anggota Customs Cooperation Council.

18 Oktober 1956

asli

1 sampul

356 Surat-surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Pertama mengenai pemberian paspor diplomatik dan tentang turut campurnya Duta Besar USA terhadap peradilan A. Pope.

> 20 Oktober 1959-07 Januari 1960 tembusan 3 lembar

357 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Kepala Misi Pampasan RI tentang kontrak-kontrak pembelian dan jasa dalam rangka pampasan perang.

> 03 Desember 1959 tembusan 1 lembar

## Persidangan

# Sidang DPR

358 Risalah-risalah rapat pleno terbuka DPR tahun 1950-1952 antara lain tentang pertanyaan-pertanyaan anggota DPR mengenai konflik perusahaan gula tebu, penyelenggaraan haji, RUU Penghapusan Tanahtanah Partikelir, Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR, dan Anggaran Belanja Negara.

12 Oktober 1950-15 November 1952 asli, tembusan, salinan. 1 sampul

359 Risalah-risalah rapat pleno terbuka DPR tahun 1953-1957 antara lain pembahasan mengenai RUU Penempatan Tenaga Asing, Pelaksana Tugas Harian Presiden, dll.

23 Januari 1953-31 Desember 1957 asli, tembusan, salinan. 1 sampul

360 Berkas tentang pengiriman terbitan resmi DPR tahun sidang 1954-1955 antara lain mengenai rancangan-rancangan undang-undang anggaran belanja negara tahun 1955, perselisihan perburuhan, dll.

> 18 April-18 Mei 1955. pertinggal, salinan 1 sampul

361 Risalah-risalah rapat pleno terbuka DPR tahun 1958 antara lain pembahasan mengenai RUU Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perjanjian KMB, Rancangan Anggaran Belanja Negara tahun, Perjuangan Irian Barat, dll.

06 Februari-11 Desember 1958 asli, tembusan, salinan. 1 sampul 362 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Presidium Kabinet Ampera tentang tanggapan dan penilaian terhadap hasil karya Panitia Adhoc II, III, dan IV MPRS.

Nb. Lampiran tidak ada dan rusak ringan.

30 Juni 1967 pertinggal 1 lembar

### Sidang Kabinet

Memorandum dari Wirjono Koesoemo kepada Mr. Dr. Hazairin mengenai pandangannya terhadap surat Hardjowerdojo mengenai urusan militer dan keberatan-keberatannya terhadap tindakan pemerintah terhadap rakyat bekas militer, dianggap sebagai "kennisgeving" (pemberitahuan) tetapi perlu mendapat perhatian sepenuhnya dari Dewan Menteri, disertai lampiran.

13 Mei-24 November 1950 asli 1 sampul

364 Risalah-risalah dan bahan materi Sidang Kabinet tahun 1950-1957 antara lain tentang uang rampasan (bukti), keanggotaan Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa, dan putusan-putusan Rapat Kabinet Ali Sastroamidjojo.

04 November 1950-07 November 1957 asli, tembusan 1 sampul

## Rapat Terbatas

365 Surat dari Menteri Sosial kepada Menteri Kehakiman tentang pemberitahuan bahwa undangan rapat Dewan Perumahan Pusat diundur dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

06 November 1951 asli 3 lembar

366 Notulen-notulen Sidang ke 4-15 Rapat Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kesejahteraan Negara Nomor U.P.3/1955 tanggal 12 Januari 1955 antara lain membahas mengenai Undangundang Nomor 75 tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

12 Februari-30 April 1955 asli

1 sampul

367 Surat dari Kepala Sekretariat Penguasa Militer Tertinggi kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian resume Sidang ke-06 Rapat Dewan Pembantu Penguasa Militer Tertinggi tanggal 3 Agustus 1957.

09 Agustus 1957 asli 7 lembar

#### Pameran

368 Berkas mengenai potret untuk Pameran "Indonesia Bangun".

19 September 1951-19 Februari 1952

asli

1 sampul

369 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Penerangan tentang pengambilan gambar untuk pameran "Indonesia Bangun".

23 Februari 1952 pertinggal 4 lembar

370 Surat Pengantar dari Kepala Bagian Arsip Kementerian Kehakiman kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Jawatan Kepenjaraan tentang penyampaian surat Dewan Exhibition Indonesia Pusat mengenai usulan diadakan pekan raya tiap tahun dan penganggaran pekan raya di tiap-tiap kementerian.

14 November 1955 pertinggal, tembusan 6 lembar

### Penerbitan

371 Surat-surat tentang permintaan dan penjualan simbol-simbol negara seperti lambang negara dan gambar presiden.

14 Juni 1950-10 Juni 1954 asli, pertinggal

1 sampul

372 Surat-surat dari Badan Pengurus Serikat Pelajar Seluruh Indonesia, Kepolisian RI, dan Kementerian Penerangan kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian majalah-majalah dan artikel surat kabar.

Nb. Lampiran tidak lengkap.

25 September 1950-16 Januari 1954

asli 8 lembar

373 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kontak Biro Umum di Bandung tentang kalender Pemilihan Umum 1951 dan penyusunan buku almanak tahun 1951.

20 Desember 1950-13 Januari 1951 asli, pertinggal, konsep 8 lembar

374 Surat-surat dari Gerakan Pemuda Ansor dan Partai Murba kepada Menteri Kehakiman tentang permintaan majalah dan brosur-brosur dari Kementerian Kehakiman.

10 Januari-22 Oktober 1951 asli 5 lembar

## Perpustakaan

375 Surat-surat tentang pemberitahuan, permintaan, dan pengiriman bukubuku dan bahan cetak lainnya yang berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan tahun 1950.

> 15 September-30 Desember 1950 asli, tembusan 1 sampul

376 Surat-surat tentang pemberitahuan, permintaan, dan pengiriman bukubuku dan bahan cetak lainnya yang berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan tahun 1951.

> 03 Januari-21 Desember 1951 asli, tembusan 1 sampul

377 Surat dari Menteri kehakiman kepada Dr. H. Campen tentang penerbitan buku mengenai peraturan perundang-undangan.

10 Juli 1951 pertinggal 5 lembar

378 Surat-surat tentang pemberitahuan, permintaan, dan pengiriman bukubuku dan bahan cetak lainnya yang berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan tahun 1952.

28 April-12 Oktober 1961 asli, tembusan

1 sampul

379 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perburuhan tentang penyampaian surat dari NV Dagang dan Industri Hin Hia Jambi yang meminta terjemahan buku *Acte van Bevinding T 3121*.

09 November 1955 pertinggal 2 lembar

## Pemberitahuan

380 Kumpulan surat edaran di lingkungan Kementerian Kehakiman RI.
05 Mei 1950-10 November 1954
salinan, pertinggal
1 sampul

381 Surat-surat tentang pemberitaan dan pengumuman yang terkait dengan penetapan hari besar keagamaan, perubahan organisasi, siaran media, dll.

23 September 1950-04 November 1955 asli, tembusan, konsep, fotokopi 1 sampul

382 Surat-surat pemberitahuan dari lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan antara lain mengenai tanda tangan, perubahan cap, dan alamat kantor.

09 Oktober 1950-06 September 1955 asli, tembusan 9 lembar

383 Surat-surat tentang pemberitahuan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan fasilitas kesehatan a.l. Tentang keadaan di rumah sakit B.P.M (*Bataafsche Petroleum Mij.*), pendirian rumah sakit di Jakarta.

12 Oktober 1950-18 Desember 1953 asli, salinan 1 sampul

384 Kumpulan surat edaran dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri Bank Indonesia.

09 November 1950-30 Maret 1961 salinan 1 sampul 385 Surat-surat tentang pemberitahuan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan.

Nb. Lampiran tidak lengkap.

06 Desember 1950-12 Oktober 1955 asli, tembusan, pertinggal, fotokopi 1 sampul

386 Surat-surat tentang pemberitahuan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan.

> 09 Januari 1951-1958 asli, tembusan, salinan, fotokopi 1 sampul

387 Surat dari Sekretaris Pengurus Besar Muhammadiyah kepada Menteri Pengurus Kehakiman tentang susunan perwakilan Besar Muhammadiyah di Jakarta.

> 08 Maret 1951 asli 1 lembar

388 Surat Edaran Menteri Pertanian tentang penggantian Kepala Balai Perancang Tata Bumi.

> 08 Maret 1951 asli 4 lembar

389 Surat dari Kementerian Keuangan kepada Semua Kementerian tentang "Congestie" di pelabuhan Tanjung Priok.

> 18 April 1951 fotokopi 1 lembar

390 Surat dari P.H. Sibolga, Percetakan Negara di Sibolga, kepada Kementerian Kehakiman tentang riwayat percetakan Orita dengan peralatannya.

> 10 Juni 1951 asli 4 lembar

391 Surat-surat tentang pemberitahuan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan.

29 Juni 1951-01 Oktober 1955 asli, pertinggal, tembusan, fotokopi. 1 sampul

392 Surat dari Menteri Agama RI kepada Perdana Menteri RI tentang Kesulitan-kesulitan Warganegara turunan Eropa dan sebagainya di lapangan pengajaran.

> 02 Juli 1951 tembusan 1 lembar

393 Surat-surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penunjukan Kepala dan Ahli Teknik pada Kantor Cabang Biro Rekonstruksi Nasional Provinsi Jawa Timur.

> 17 Juli 1951 tembusan 4 lembar

394 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negri, Menteri Dalam Negeri, dll, tentang pemberitahuan bahwa Kementerian Perhubungan mengabulkan permohonan J.P. Lucas untuk memasukan/mendaftarkan pesawat terbangnya Auster Mark V di Indonesia.

20 Juli 1951 asli 1 lembar

395 Surat-surat tentang pemberitahuan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian a.l. Izin penggilingan padi keliling, bahan putusan Konferensi Inspektur Kementerian Pertanian.

03 Agustus 1951-26 Februari 1954 asli, pertinggal 1 sampul

396 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Kabinet Presiden, Perdana Menteri, dll, tentang pemberitahuan penunjukan petugas untuk mengurus pengiriman surat-surat penting sesudah waktu dinas ke Kementerian Perhubungan.

11 Agustus 1951

asli 3 lembar

397 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang Tanjung Priok daerah tertutup.

04 September 1951 asli 1 lembar

398 Surat-surat Keputusan Menteri-Menteri di lingkungan Pemerintah Indonesia antara lain mengenai pembentukan dan pembubaran panitia serta perubahan penugasan pegawai di lingkungan kementerian masingmasing.

15 September 1951-19 Agustus 1960 tembusan 1 sampul

399 Surat dari Kejaksaan Bondowoso kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian surat edaran mengenai singkatan Rupiah Indonesia.

21 November-04 Desember 1951 asli, salinan 1 sampul

400 Surat dari Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri kepada Perdana Menteri tentang peraturan sementera mengenai penetapan gaji pokok pegawai negeri menjelang peraturan gaji baru.

01 April 1952 tembusan 5 lembar

401 Surat dari Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Perdana Menteri tentang organisasi komunis "*Ksiueh Sheng Tse Chih Hui*" yang berada di setiap sekolah Tionghoa.

Nb. Lampiran tidak ada.

30 April 1952 tembusan 5 lembar

 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Jawatan, Bagian dan Biro di lingkungan Kementerian Kehakiman tentang penyampaian 1 buku rencana 10 tahun kewajiban belajar.
 Nb. lampiran tidak ada.

15 Mei 1952 pertinggal 1 lembar

403 Surat dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengosongan dan pengembalian rumah dinas pegawai Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.

> 25 Agustus 1952 tembusan 2 lembar

404 Surat-surat tentang pemindahan kantor Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

Nb. Bahasa Belanda

30 Agustus-03 Oktober 1952 asli 1 sampul

405 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Slamet Soehindrijo tentang pemberitahuan bahwa Pengawas Rahasia Negara Republik Indonesia bukan badan resmi Kementerian Kehakiman dan Hajat Harahap adalah seorang buronan.

> 12 November 1952 pertinggal 1 lembar

406 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang penunjukan Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Kedunghalang di Bogor sebagai rumah sakit pendidikan bagi perawat.

> 15 September 1953 tembusan 2 lembar

407 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Kehakiman tentang pemberitahuan pembentukan Direktorium Pelajaran.

> 09 Desember 1953 tembusan 3 lembar

408 Surat tentang rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok. Nb. Arsip tidak lengkap dan Bahasa Inggris.

07 April 1954

asli 3 lembar

409 Surat Pengumuman Pimpinan Pusat Perbum (Persatuan Buruh Minyak) tentang perubahan stempel Perbum.

> 08 September 1954 fotokopi 2 lembar

410 Surat dari Kepala Bagian Rumah Tangga Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, dll, tentang pengiriman daftar telepon Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 Jakarta.

> 29 November 1954 asli 7 lembar

411 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Menteri Kehakiman tentang pengumuman penerimaan calon siswa pada pendidikan Komandan Polisi.

> 06 Juli 1955 fotokopi 5 lembar

412 Surat pemberitahuan Dewan Pimpinan Gabungan Petani Kelapa Indonesia Buol kepada Kepala Daerah Buol bahwa gabungan ini telah dibentuk.

> 10 Oktober 1955 tembusan 2 lembar

Surat dari Kementerian Urusan Veteran kepada Semua Kementerian 413 tentang Surat pemberitahuan mengenai lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja veteran tanggal 22 Oktober 1958.

> 22 Oktober 1958 tembusan 2 lembar

Pengaduan

414 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian tentang pencatutan tiket KPM di Surabaya.

30 Oktober 1950 pertinggal 1 sampul

415 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Agama tentang pengaduan A. Masjkoer mengenai keberatan terhadap T. Hadi Safingi, Naib Lawijan.

03 Oktober 1951 tembusan 3 lembar

416 Surat dari Jaksa Agung kepada Direktur Kabinet Presiden RI tentang pernyataan dari Nabari Sinulingga cs tentang saudaranya bernama Tenteng Sinulingga.

05-21 November 1951 tembusan 4 lembar

417 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Mahkamah Agung tentang pengaduan rakyat Kabupaten Tuban mengenai kekecewaan terhadap Pengadilan Negeri Tuban.

> 06 Agustus 1953 pertinggal, salinan 3 lembar

418 Surat dari Sjiech Bilall kepada Walikota Jakarta Raya tentang tuntutan nasib pegawai rendah Kotapraja Jakarta Raya.

10 Agustus 1953 tembusan 2 lembar

419 Surat dari H. Jusuf kepada Kepala Sosial Kabupaten Aceh Utara tentang permohonan pertimbangan atas kerugian rumah H. Jusuf yang terbakar.

24 Januari 19554 tembusan 2 lembar 420 Surat dari Masyarakat Banyuwangi kepada Jaksa Pengadilan Negeri tentang pertanggungjawaban serta tindakan tegas pemerintah terhadap Notaris Mr. Than Gwan Kwie.

14 April 1954 asli 3 lembar

421 Surat pengaduan dari Z.B. Barang kepada Menteri Kehakiman tentang pemberhentian dirinya dari Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) oleh karena tersangkut perkara hukum.

Nb. Tidak lengkap.

01 Agustus 1955 asli, tembusan 2 lembar

422 Surat dari Pemilik Toko Wisnu Art Galery kepada Papelreda Daerah Tingkat I Bali tentang laporan kebakaran Toko Wisnu Art Galery di Sindhu-Sanur.

30 November 1965 tembusan 6 lembar

### Ucapan

423 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Hardjosoemitro, NV Bijaksana, Gubernur Sumatera Utara Medan, dll, tentang ucapan terima kasih atas bantuan dan perhatiannya kepada Kementerian Kehakiman.

06 November 1950-29 Agustus 1956 pertinggal 1 sampul

424 Surat-menyurat antara Panitia Mardi Budaya dengan Wongsonegoro tentang pemberitahuan pendirian Panitia Mardi Budaya dan ucapan selamat atas terbentuknya panitia tersebut.

08-20 Februari 1951 asli, pertinggal 4 lembar

425 Surat-surat dari Pengadilan Negeri Rantauprapat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dll kepada Kementerian Kehakiman tentang ucapan-ucapan selamat tahun baru dan selamat hari raya.

12 Juli 1951-1956

asli

1 sampul

426 Surat-surat dari Serikat Buruh Islam Indonesia dan Kejaksaan Pengadilan Negeri Cirebon kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian ucapan terima kasih atas perhatian Kementerian Kehakiman.

23 November 1953-05 Januari 1954

asli

2 lembar

427 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Pemimpin Administrasi Majalah Pegawai tentang permintaan pemuatan ucapan Selamat Hari Buruh pada majalah.

> 02-20 April 1954 asli, pertinggal 3 lembar

428 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Direktur Rumah Penjara Glodok tentang ucapan terima kasih atas pemberian tanda mata.

> 26 Oktober 1955 asli 2 lembar

### B. Peradilan

# Administrasi Peradilan

429 Surat dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang penyampaian berkas perkara Abdullah alias Haji Djalil alias Prajitno, yang telah turut ditandatangani oleh Menteri Kehakiman.

Nb. Lampiran tidak ada dan rusak ringan.

21 Agustus 1950 pertinggal 2 lembar

430 Berkas tentang pelaporan daftar bulanan perkara dan kutipan-kutipan putusan pengadilan dari kantor-kantor pengadilan guna statistik peradilan.

Nb. Lampiran tidak lengkap, rusak ringan dan Bahasa Belanda.

20 September 1950-16 Juli 1959 pertinggal, asli, salinan, tembusan 1 sampul 431 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Pengadilan Tentara Jakarta tentang pengembalian surat keterangan Pengadilan Tentara. Nb. Lampiran tidak ada.

30 Juni 1951 pertinggal 1 lembar

432 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung, tentang permintaan Komisariat Agung Kerajaan Belanda untuk mendapatkan salinan keputusan dalam perkaranya orang-orang Jepang.

11 Juli 1951-26 November 1953 pertinggal 4 lembar

433 Laporan Jawatan Kepolisian Negara tentang ikhtisar kejahatan antara lain terhadap polisi, pegawai negeri dan orang asing serta keamanan dalam perkebunan tahun 1951-1952.

Nb. Sebagian rusak ringan dan sedang.

20 Agustus 1951-04 Juni 1952 fotokopi 1 sampul

434 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Kejaksaan Ternate tentang aturan mengenai pengumuman keputusan Pengadilan Negeri Ternate dalam Berita Negara.

19 Desember 1951 pertinggal 1 lembar

435 Surat-surat tentang permintaan salinan putusan-putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Tomohon.

06 November 1952-04 Agustus 1953 asli, pertinggal 7 lembar

436 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang penyampaian ikhtisar putusan Pengadilan Negeri Situbondo atas perkara Lie Kok Sing.

Nb. Lampiran tidak ada.

10 November 1953 pertinggal

1 lembar

437 Surat Menteri Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri tentang permintaan Kedutaan Besar India untuk mendapat salinan keputusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Idham.

28 Agustus 1954 pertinggal 1 lembar

438 Surat-surat Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang permintaan Kepala Pusat Jawatan Perikanan Laut agar diberikan ikhtisar putusan Pengadilan Negeri Pontianak terhadap M. Djapar Kasim dan Achmad untuk kepentingan Jawatan.

02 Desember 1954-18 Mei 1955 pertinggal 2 lembar

439 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Panitera Mahkamah Agung tentang penyampaian laporan kunjungan pegawai Kementerian Kehakiman a.n. Basirun Sastrowidjojo ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Nb. Lampiran tidak ada.

30 Juni 1955 pertinggal 1 lembar

### Tata Peradilan

440 Surat-surat tentang keadaan pengadilan di Tapanuli Tengah dan Minahasa yang belum berjalan dengan semestinya.

27 September-26 Oktober 1950 asli, konsep, pertinggal, tembusan 1 sampul

441 Surat-surat tentang perkara tahanan-tahanan lama yang belum diadili. Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

26 Oktober 1950-01 Desember 1956 asli, salinan, tembusan, pertinggal 1 sampul 442 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dan Soemiadji Sosroatmidjojo (Kantor Imigrasi Rayon Madiun) tentang aturan mengenai hukuman pelanggaran peraturan perusahaan-perusahaan atau tindak pidana ekonomi.

10 Januari 1951-07 Juli 1955 pertinggal 10 lembar

443 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam Negeri tentang kewenangan Mantri Polisi Muda membuat proses verbal dalam pengusutan perkara.

09 Mei 1951 pertinggal 3 lembar

444 Surat-surat tentang pemberian hak pengusutan pelanggaran hukum tertentu bagi pegawai negeri sipil dan anggota militer.

Nb. Lampiran tidak lengkap, dan rusak ringan.

30 Mei 1951-07 November 1955 salinan, tembusan, pertinggal 1 sampul

445 Berkas tentang perdebatan kewenangan penahanan pengawatan telegram yang berkaitan dengan perkara hukum, antara kepala daerah, jaksa dan kepolisian.

05 Juni-11 September 1951 asli, pertinggal 7 lembar

446 Surat dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian surat dari Kepala Keresidenan di Pati mengenai permohonan penjelasan aturan bagi orang-orang yang meminjam uang, menurut *Staatsblad* 1938 Nomor 523.

18 Juni 1951 asli 2 lembar

447 Surat-surat tentang aturan pemeriksaan perkara-perkara sederhana di muka hakim.

27 November 1951-25 Januari 1952 pertinggal, asli, salinan, tembusan

5 lembar

448 Surat pemberitahuan dari Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Menteri Kehakiman tentang tempat dan waktu persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan bulan September-Desember 1952.

01 Agustus 1952 asli 1 lembar

449 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Tentara Agung dan Ketua Mahkamah Agung tentang persoalan peradilan militer antara lain mengenai penyelesaian perkara in-subordinatie AURI, status anggota CTN dan tidak berlakunya lagi peraturan-peraturan militer.

> 12 November 1952-06 April 1955 pertinggal 8 lembar

450 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang permintaan pertimbangan persoalan hukum peradilan antara lain mengenai pemberlakuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1952 dan *Rijstordonantie* 1948, kebijaksanaan penuntutan didaerah yang berlaku peradilan asli, dan tape-recorder sebagai saksi.

16 Desember 1952-15 Desember 1956 pertinggal 1 sampul

451 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri tentang aturan umum mengenai penangkapan, pemeriksaan, dan pengasingan orang-orang tahanan.

11 Juni 1953 pertinggal 1 lembar

452 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua-ketua Pengadilan Negeri dan Kepala-kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri tentang penyampaian peraturan Nomor 1 tahun 1954 dari Mahkamah Agung Indonesia mengenai aturan permohonan kasasi dan grasi.

14 Juli 1954 pertinggal 2 lembar 453 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Jaksa Agung tentang permohonan penjelasan mengenai cara melakukan pemeriksaan perkara kepada seorang pengadu atau terdakwa.

17 Juni-09 Agustus 1955 asli, pertinggal 6 lembar

454 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang penyelesaian perkara pada Kejaksaan Pengadilan Negeri Klaten.

07 November 1955 pertinggal 1 lembar

455 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang sikap atas perkara hukum yang menimpa Mr. Ishaq Tjokrohadisurjo (Menteri Perekonomian Periode 1953-1955) dan Mr. Djodi Gondokoesoemo (Menteri Kehakiman periode 1953-1955).

25 Juli 1956 pertinggal 1 lembar

### Perkara-Perkara

Pidana

456 Berkas tentang pemeriksaan pembukuan perusahaan *NV Industriebank* dan *NV Javafruit* oleh akuntan negeri atas dugaan melanggar hukum pidana.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

26 Mei-27 September 1950 asli, pertinggal, salinan, konsep 8 lembar

457 Surat-surat tentang perkara-perkara kriminal antara lain pembunuhan, pencurian, pemalsuan, dan perjudian.

Nb. Lampiran tidak lengkap, rusak ringan dan Bahasa Belanda.

28 Agustus 1950-31 Maret 1958 asli, pertinggal, salinan, tembusan. 1 sampul

458 Surat-surat tentang pengaduan, penuntutan, dan pelaporan perkaraperkara korupsi, kecurangan, dan kesewenang-wenangan oknum aparatur negara.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

26 Oktober 1950-21 April 1959 asli, tembusan, pertinggal, salinan

1 sampul

459 Surat-surat tentang perkara-perkara penyelundupan barang terlarang dan hasil pertanian seperti senjata api, candu, kopra, kina dan getah di beberapa daerah antara lain di Pantai Timur Sumatera Tengah, Kepulauan Karimun, dan Toli-Toli.

Nb. Sebagian rusak ringan, sedang, Bahasa Inggris, dan Belanda.

16 November 1950-24 Agustus 1956 asli, salinan, pertinggal 1 sampul

460 Surat-surat tentang perkara-perkara mengenai obat-obat berbahaya dan candu.

Nb. Lampiran tidak ada dan sebagian rusak ringan.

24 Februari 1951-23 Desember 1955 pertinggal, tembusan 1 sampul

461 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Direktur Kabinet Presiden tentang hilangnya R. Oto Iskandar di Nata. Nb. Lampiran tidak ada.

> 17 Mei 1951 pertinggal 1 lembar

462 Surat-surat tentang perkara-perkara penghinaan antara lain penghinaan terhadap agama, kepala negara, kepala daerah, kelompok tertentu dan lagu kebangsaan.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan sebagian rusak sedang.

22 Agustus 1951-24 Desember 1956 asli, pertinggal, salinan, tembusan 1 sampul

463 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang penyampaian surat Kepala Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri mengenai pembunuhan seorang warga Inggris di rumah makan Capitol. Nb. Lampiran tidak ada.

> 29 Agustus 1956 pertinggal 1 lembar

### Perdata

464 Surat-surat tentang pemeriksaan tanda domo dan teraan jari dalam perkara perdata.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

24 Juni 1950-03 Januari 1952 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

Surat-surat tentang perkara-perkara perdata antara lain hutang-piutang, sengketa tanah, sewa menyewa, dan tuntutan ganti rugi keperdataan.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

24 Agustus 1950-18 Oktober 1956 asli, tembusan, pertinggal, salinan 1 sampul

# Gangguan Keamanan

466 Surat-surat tentang upaya-upaya menjaga keamanan daerah dan penyelidikan beberapa perkara gangguan keamanan di beberapa daerah. Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

> 22 November 1950-15 Desember 1956 asli, tembusan, pertinggal, salinan 1 sampul

467 Surat-surat tentang penyelidikan terhadap beberapa peristiwa dan kejadian di beberapa daerah semasa Agresi Militer Belanda II, seperti Peristiwa Aceh, Peristiwa Bekasi, dan kejadian-kejadian di Sangkulirang.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

15 Mei 1951-22 Desember 1956 pertinggal, asli 1 sampul

468 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri tentang penyelidikan terhadap banyaknya orang-orang yang diduga melarikan diri dari Selebes Selatan dan Kalimantan ke Inderagiri Hilir.

> 22 September-24 Oktober 1951 pertinggal 4 lembar

469 Surat-surat tentang penyelidikan dan penahanan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan Kahar Muzakar, Andi Azis, Amir Fatah, dll.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

09 Januari 1952-30 Juni 1955 pertinggal, asli, salinan 1 sampul

## Dampak Peperangan

470 Surat-surat tentang tuntutan penggantian kerugian atas dampak peperangan (Aksi Militer Belanda) antara lain oleh Kantor Claim Kerugian Perang Ikatan Nasional Indonesia Pusat Balikpapan, Pengacara C.H. Overduin, Gubernur Kalimantan, Lurah Namorubei Ulu, dan Gubernur Jawa Barat.

Nb. Sebagian rusak ringan.

20 September 1950-19 Juli 1951 asli, pertinggal 1 sampul

471 Berkas tentang perkara pembayaran Slotrehabilitatie en AOOR (Algemene Oorlogsongevallen Regelings).

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

08 Maret-10 April 1951 asli, tembusan, pertinggal 7 lembar

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Agama tentang 472 pengiriman surat permohonan Mucharror kepada Pengadilan Agama Pusat untuk dapat merubah keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar terkait ganti rugi penyelematan mesin tulis milik Jawatan Pengadilan Agama semasa Agresi Belanda II. Nb. Rusak ringan.

> 18 Maret 1952 pertinggal 3 lembar

Berkas tentang permohonan A.H. Nierop untuk mendapat rehabilitasi 473 dari Pemerintah Negeri Belanda.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan rusak ringan.

22 November 1954-21 Juli 1955 asli, pertinggal 1 sampul

## Jurnalistik

474 Surat-surat tentang penyelidikan terhadap artikel-artikel pada surat kabar yang memuat kasus-kasus hukum tertentu dan penuntutan terhadap wartawan surat kabar yang memuat berita yang melanggar ketentuan hukum.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

08 Desember 1950-13 Oktober 1956 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

## Perselisihan Perburuhan

475 Surat-surat tentang perkara-perkara perselisihan perburuhan antara lain perselisihan antara Serikat Buruh Bank Indonesia dengan Escomptobank NV.

Nb. Lampiran tidak lengkap, rusak ringan dan Bahasa Belanda.

07 Agustus 1951-05 Juli 1954 asli, tembusan, pertinggal, salinan 1 sampul

# Intergentil

Surat-surat tentang proses peradilan perkara-perkara hukum yang 476 menimpa dan/atau melibatkan orang asing ataupun warganegara Indonesia yang berada di luar negeri.

Nb. Lampiran tidak lengkap, rusak sedang dan Bahasa Belanda.

02 September 1950-16 Juli 1956 asli, tembusan, pertinggal, salinan 1 sampul

477 Surat-surat tentang usul penyerahan perkara Westerling kepada Republik Indonesia.

Nb. Lampiran tidak lengkap, rusak ringan, dan sedang.

26 September 1950-23 Oktober 1952 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Jaksa Agung tentang 478 permintaan J.D. Uttenhove agar dikembalikan ke Belanda karena sering konflik dengan bangsa Indonesia.

> 26 Januari-24 Maret 1954 asli, pertinggal 7 lembar

## Penyitaan dan Perampasan

479 Surat-surat tentang penyitaan dan perampasan barang-barang berkaitan dengan perkara hukum.

Nb. Sebagian rusak ringan.

23 Agustus 1950-19 Maret 1956 asli, tembusan, pertinggal, salinan 1 sampul

## Permohonan menjadi Tahanan Luar

480 Surat-surat tentang permohonan-permohonan menjadi tahanan luar dalam proses peradilan.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

16 Juli-29 Desember 1955 pertinggal, asli, tembusan 1 sampul

# Upaya Hukum

Surat-surat tentang penolakan (*verzet*) putusan pengadilan dan upayaupaya banding (*appel/revisie*) atas putusan-putusan pengadilan.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

25 Agustus 1950-24 Februari 1958 asli, tembusan, pertinggal, salinan 1 sampul

#### Penetapan Pengacara Negara

482 Surat-surat tentang penetapan pengacara negara dalam perkara-perkara gugatan badan hukum dan perseorangan terhadap pemerintah Indonesia.

Nb. Sebagian rusak ringan dan Bahasa Belanda.

14 Agustus 1950-13 Agustus 1956 asli, tembusan, pertinggal, salinan 1 sampul

### Pengaduan dan Tuntutan Keadilan Masyarakat

483 Berkas tentang pengaduan Sauning mengenai Rapat Besar Kajuagung yang tidak mau memeriksa perkaranya jika Sauning tidak membayar lagi wang walasan dengan mata uang Belanda.

10 Maret 1950-05 Agustus 1951 asli, salinan, tembusan, pertinggal 1 sampul 484 Surat-surat tentang pengaduan dan tuntutan atas tindakan-tindakan penahanan dan penggeledahan yang dianggap tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

26 September 1950-15 Desember 1956 asli, salinan, pertinggal 1 sampul

485 Surat dari Kepala Bahagian Hukum Pidana dan Ketentaraan kepada Ketua Mahkamah Agung tentang penyampaian surat Ketua Pengadilan Negeri Idi dan Sawah Lunto mengenai pertanyaan-pertanyaan soal peradilan.

Nb. Lampiran tidak ada.

18 Januari 1951 pertinggal 1 lembar

486 Surat-surat tentang pemberian hukuman mati kepada anggota-anggota PKTI dan Perbeta.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak ringan.

12 Februari 1951-26 September 1955 pertinggal 6 lembar

487 Surat-surat tentang pertanyaan, pengaduan dan tuntutan organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan legislatif mengenai penyelesaian perkara-perkara hukum tertentu.

Nb. Lampiran tidak lengkap, rusak ringan dan sedang.

04 Juni 1951-10 Maret 1958 asli, pertinggal, tembusan, salinan 1 sampul

488 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang laporan Jawatan Penerangan Daerah Timor Kupang mengenai Keputusan Pengadilan Istimewa dalam perkara Pae Nope, bekas Raja Amanuban.

28 Januari 1953 pertinggal 1 lembar 489 Surat dari Panitera Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tentang sidang di Labuan Bilik dan Kotapinang (Pengadilan Negeri Rantauprapat).

> 18 Desember 1953 pertinggal 1 lembar

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang 490 penyampaian surat Rabudin mengenai Keputusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 31 Maret 1954 yang menghukum Penedin 1 tahun 6 bulan, tetapi masih ditahan di luar penjara.

Nb. Lampiran tidak ada.

25 Juni 1954 pertinggal 1 lembar

491 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang Frans Spangenberg yang mengaku tidak bersalah atas perkara yang telah menghukumnya selama 5 tahun penjara.

> 27 Desember 1955 pertinggal 1 lembar

## C. Pemasyarakatan

# Kepenjaraan

492 Surat-surat tentang perpindahaan rumah penjara bagi orang-orang hukuman.

> 27 Oktober 1950-01 Desember 1956 asli, pertinggal 1 sampul

Berkas tentang orang-orang yang mendapatkan hukuman perjanjian. 493

> 27 Desember 1950-05 Juli 1955 pertinggal, asli, salinan, konsep 1 sampul

494 Surat-surat tentang tawanan-tawanan politik dan tawanan-tawanan akibat operasi militer.

> 10 Januari 1951-28 April 1955 asli, pertinggal 1 sampul

495 Surat-surat tentang tahanan-tahanan militer.

05 Februari 1951-13 Oktober 1956 asli, pertinggal 1 sampul

496 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Mahkamah Agung tentang penyampaian daftar orang-orang tahanan di Rumah Tahanan Labuhan-Deli.

07 Februari-06 Maret 1951 pertinggal, salinan 4 lembar

497 Surat-surat tentang penempatan dan permohonan pembebasan narapidana anak.

12 Februari 1951-01 Desember 1956 pertinggal, asli, tembusan 1 sampul

498 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Walikota Jakarta Raya tentang penyampaian kabar kepada Haji Ungi binti Haji Saunin warga Jatinegara bahwa suaminya, Haji Lim bin Buang tidak diketahui keberadaannya di rumah-rumah penjara.

08 Maret 1951 pertinggal 1 lembar

499 Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh kepada Jaksa Agung tentang siapa yang berhak membuat *bevelschrift* dua warga negara yang sakit jiwa dan berada di Rumah Penjara Payakumbuh.

09 Maret 1951 tembusan 1 lembar

500 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang permintaan Komisariat Belanda untuk mengunjungi tawanan-tawanan Bangsa Belanda.

12-24 Maret 1951 pertinggal 2 lembar 501 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang penyampaian salinan surat perintah harian Panglima Tentara dan Territorium IV/Divisi Diponegoro mengenai penyerahan Rumah Penjara Bulu kepada Pengawas Teritorial Semarang.

Nb. Lampiran tidak ada.

06 April 1951 pertinggal 1 lembar

502 Daftar Isi Penjara dalam Bulan Maret dan Mei 1951 yang dibuat oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan.

15 Mei-21 Juni 1951 asli 1 sampul

503 Surat dari Kepala Jawatan Kepenjaraan kepada Semua Kepala Penjara tentang jumlah orang hukuman tahanan sipil dan tentara yang dihukum sebelum 1950.

Nb. Rusak ringan.

17 Mei 1951 asli 1 lembar

504 Surat dari Pengurus Besar Serikat Sekerdja Kepenjaraan Jakarta kepada Wakil Ketua Pengurus Serikat Sekerdja Kepenjaraan Yogyakarta tentang penyampaian salinan Surat Sekretaris Kementerian Kehakiman mengenai pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kepenjaraan. Nb. Lampiran tidak ada.

21 Mei 1951 tembusan 1 lembar

505 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang penahanan T. Mustadjab di Rumah Penjara Medan.

24 Mei 1951 pertinggal 1 lembar

506 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang para tahanan peristiwa 19 November 1950 di Penjara Glodok.

28 Mei 1951 pertinggal

1 lembar

507 Surat permohonan tanda rehabilitasi dari H.E.F.Kapojos kepada Menteri Kehakiman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

28 Juli 1951-15 Juni 1954 asli, tembusan 1 sampul

508 Surat dari Kepala Jawatan Kepenjaraan kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian laporan dari Rumah-rumah Penjara Struisjwik, Glodok dan Tanah Tinggi (Tangerang) mengenai banyaknya tahanan tahanan yang perkaranya belum diputus oleh hakim.

17 September 1951 asli 1 sampul

509 Surat dari Jurutik Mangara Tua Nainggolan kepada Jaksa Agung tentang pemberian makanan orang-orang terpenjara se-Tapanuli.

22 September 1951 salinan 5 lembar

510 Berkas tentang pelarian narapidana-narapidana dari rumah-rumah penjara.

25 September 1951-13 Desember 1955 konsep, salinan, asli, tembusan, pertinggal 1 sampul

511 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tentang penyampaian surat M. Isa Anshary di Rumah Penjara Sukamiskin Bandung.

Nb. Lampiran tidak ada.

04 Oktober 1951 pertinggal 1 lembar

512 Surat Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Panitia Tahanan/Tawanan Provinsi Jawa Tengah. Nb. Rusak sedang.

> 06 Oktober 1951 pertinggal 1 lembar

513 Surat dari Kantor Besar Jawatan Kepenjaraan kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian laporan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh tahanan-tahanan di Rumah Penjara Pekalongan.

> 08-17 Oktober 1951 asli, salinan 9 lembar

514 Berkas tentang penjelasan mengenai pernyataan Subekti, Griffier Mahkamah Agung, pada berita Antara mengenai hak Direktur Penjara melepaskan tahanan yang melebihi masa tahanannya.

> 12 Oktober 1951-06 Maret 1952 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

515 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang penyelidikan atas permohonan yang diajukan oleh orang-orang tahanan di Rumah Penjara Situbondo.

> 22 Oktober 1951 pertinggal 1 lembar

516 Surat-surat tentang kemanan dan ketertiban di rumah-rumah penjara.

31 Oktober 1951-25 Oktober 1956

asli, pertinggal

1 sampul

517 Surat dari Jawatan Kepenjaraan kepada Pengadilan Negeri Kebumen mengenai pengiriman orang-orang hukuman ke tempat asalnya.

> 09 November 1951 pertinggal 1 lembar

518 Surat dari Kepala Jawatan Kepenjaraan kepada Pengurus Besar Gabungan Pro Juventute tentang permintaan kembali Rumah Pendidikan Tangerang.

> 31 Januari 1952 tembusan 2 lembar

519 Surat-surat tentang perizinan peminjaman rumah penjara untuk instansi lain.

12-20 Februari 1952 asli, pertinggal 3 lembar

520 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang permintaan penjelasan mengenai permohonan tahanan-tahanan di Rumah Penjara Gang Tengah yang mengaku tahanan militer.

09 Juni 1952 pertinggal 1 lembar

521 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Jawatan Kepenjaraan tentang penyampaian salinan surat Kedutaan Thailand dari Menteri Luar Negeri.

Nb. Lampiran tidak ada.

3 Februari 1954 pertinggal 1 lembar

522 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Jawatan Kepenjaraan tentang penyampaian salinan surat N. Ratna Suminar mengenai keterangan *Juvinile Delinquency* (Turunan Indonesia-Amerika).

08 April 1954 konsep, pertinggal, salinan 5 lembar

523 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang laporan kekejaman untuk orang tahanan, karena pada hari raya tidak boleh sembahyang dan pegawai-pegawai makan sogokan di Bagan Siapi-api oleh Hasan Bagat.

> 26 September 1955 pertinggal 1 lembar

524 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Jawatan Kepenjaraan tentang penyampaian salinan surat Perhimpunan Reklasering Semarang mengenai permohonan pemberian pengesahan pernyataan kesediaan dan pemberian subsidi bulanan.

15 September 1956

pertinggal 1 lembar

# Pengampunan

#### Permohonan

525 Surat-surat tentang permohonan pelepasan bersyarat dari para narapidana.

13 Januari 1951-12 Maret 1955 pertinggal, asli 1 sampul

526 Surat-surat tentang permohonan pengampunan, pengurangan, ataupun pengubahan hukuman, baik melalui abolisi, grasi, maupun amnesti bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

19 Februari 1951-18 Agustus 1956 asli, pertinggal 1 sampul

527 Surat-surat tentang permohonan pembebasan orang-orang tahanan dan orang-orang hukuman.

Nb. Lampiran tidak lengkap, rusak ringan dan sedang.

20 Desember 1951-29 Agustus 1956 asli, pertinggal 1 sampul

#### Penetapan

528 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 167/G s.d. 265/G Tahun 1950 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

15 September 1948-21 Oktober 1950 asli, pertinggal 1 sampul

529 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 267/G s.d. 465/G Tahun 1950 tentang persetujuan, pembebasan, dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

06 Desember 1949-30 Desember 1950 asli, pertinggal 1 sampul 530 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 001/G s.d. 237/G Tahun 1951 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

23 Agustus 1950-19 Maret 1951 asli, pertinggal 1 sampul

Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 238/G s.d. 453/G Tahun 1951 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

15 Januari 1950-09 Juli 1951 asli, pertinggal 1 sampul

Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 454/G s.d. 543/G Tahun 1951 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

25 Mei 1950-30 Agustus 1951 asli, pertinggal 1 sampul

533 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 544/G s.d. 790/G Tahun 1951 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

15 Mei 1950-27 Desember 1951 asli, pertinggal 1 sampul

534 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 185/G s.d. 356/G Tahun 1952 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

04 Juni 1951-03 Juni 1952 asli, pertinggal 1sampul

535 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 357/G s.d. 820/G Tahun 1952 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

23 Februari 1951-08 September 1952

asli, pertinggal 1 sampul

1 sampul

536 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 821/G s.d. 1062/G Tahun 1952 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.
Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

21 Agustus 1951-08 November 1952 asli, pertinggal

537 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 2/G s.d. 95/G Tahun 1953 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan

atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

29 April 1952-30 Januari 1953 asli, pertinggal 1 sampul

Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 96/G s.d. 338/G Tahun 1953 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

9 Desember 1952-13 Maret 1953 asli, pertinggal 1 sampul

539 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 350/G s.d. 585/G Tahun 1953 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

23 Oktober 1952-15 Mei 1953 asli, pertinggal 1 sampul

540 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 586/G s.d. 688/G Tahun 1953 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

3 September 1952-11 Juni 1953 asli, pertinggal 1 sampul 541 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 689/G s.d. 799/G Tahun 1953 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

02 Desember 1952-24 Juli 1953 asli, pertinggal 1 sampul

542 Berkas Keputusan Presiden RI Nomor 800/G s.d. 1250/G Tahun 1953 tentang persetujuan dan penolakan pemberian ampun, pengurangan atau pengubahan hukuman bagi orang-orang hukuman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

22 Januari-29 Desember 1953 asli, pertinggal 1 sampul

543 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Pertahanan tentang penyampaian Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan mengenai pembebasan R.M. Partatmo dan Muhammad Muhiddin.

23 Oktober 1956 pertinggal 1 lembar

## D. Hukum

## 1. Perundang-undangan

## Perancangan

Surat dari Kepala Seksi Penghubung DPR Kementerian Dalam Negeri RI kepada Kepala Bagian U.P.B.A. Kementerian Dalam Negeri tentang permohonan notulen dari jawaban pemerintahan RIS mengenai kodifikasi dan unifikasi hukum.

07 Oktober 1950 tembusan 1 lembar

545 Surat dari Menteri Keuangan kepada Kepala Jawatan Imigrasi tentang persetujuan terhadap Rencana Undang-undang Imigrasi.
Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

20 Oktober 1950 salinan, tembusan 3 lembar Berkas tentang tentang perancangan Undang-Undang dan Peraturan
 Pemerintah mengenai pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan daerah.
 Nb. Arsip tidak lengkap dan sebagian rusak sedang.

02 November 1950-09 Oktober 1956 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 1 sampul

547 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman kepada Sekretaris Dewan Menteri tentang perundang-undangan untuk dirundingkan dalam Sidang Kabinet.

24 Januari 1951 asli, pertinggal, konsep 4 lembar

548 Berkas tentang rencana undang-undang mengenai penghapusan badan hukum *Algemeene Volkscredietbank* (A.V.B.).

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

31 Januari-10 September 1951 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 1 sampul

549 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada para Menteri tentang Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengeluaran surat bendaharawan untuk tahun 1954 tanggal 3 Desember 1954. Nb. Rusak ringan

> 12 Februari 1951 salinan 6 lembar

550 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI tentang penyampaian beberapa RUU tahun 1951 dengan penjelasannya, yaitu mengenai perubahan "Grondhuurordonantie" dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" serta penyerahan urusan penilikan film kepada Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.

17 Maret-30 Agustus 1951 tembusan, fotokopi 6 lembar

551 Surat-menyurat antara Sekretaris Dewan Menteri dengan Sekretaris Kementerian Kehakiman tentang errata (kesalahan tulis/cetak) atas RUU mengenai perdamaian kerja.

17 Maret-25 April 1951 asli, pertinggal, konsep

7 lembar

552 Berkas tentang perancangan dan perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang mengenai SOB (*Staats van Oorlog and Beleg*: Keadaan Darurat/Keadaan Bahaya).

Nb. Lampiran tidak lengkap.

22 Maret 1951-29 Desember 1960 pertinggal, fotokopi 1 sampul

553 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Jawatan Tata Hukum Kementerian Pertahanan tentang Penambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1950 Nomor 29 dan 62.

28 Maret 1951 asli 1 lembar

554 Surat-surat dari Menteri Perekonomian dan Sekretaris Jenderal Dewan Menteri tentang Rencana Tambahan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951 mengenai tunjangan jabatan.

19 Juni-03 Juli 1951 asli, fotokopi 4 lembar

Berkas tentang jawaban dan pertanyaan anggota panitia *ad hoc* RUU Pemilihan Anggota Konstituante.

28 Juni-06 November 1951 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

556 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Pertanian tentang kehadiran wakil dari Kementerian Kehakiman dalam rapat Panitia Kecil untuk membuat RUU Perlindungan Alam dan Pemburuan.

29 Juni 1951 pertinggal 1 lembar

557 Surat-menyurat antara Ketua DPR RI dengan Menteri Kehakiman tentang permintaan pengiriman Rencana Undang-undang SOB dan imigrasi.

> 02 Juli-03 Agustus 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan 9 lembar

558 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Pertahanan tentang usul DPR untuk memasukan jaksa dan hakim dalam golongan orang-orang yang diperbolehkan mendapat senjata api.

21 Agustus 1951 pertinggal 1 lembar

559 Surat-surat dari Ketua DPR RI kepada Menteri Keuangan RI tentang pembetulan atas laporan gabungan mengenai RUU tentang menetapkan UU Darurat No. 22 tahun 1950, No. 37 tahun 1950 dan No. 5 tahun 1951 sebagai UU.

24 Agustus 1951 tembusan 2 lembar

560 Surat dari Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian surat DPR RI kepada Presiden RI mengenai pengiriman RUU tentang menetapkan "UU Darurat tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea" (UU Darurat No. 3 tahun 1950) sebagai UU.

29 Agustus 1951 asli, salinan 4 lembar

561 RUU Darurat tahun 1951 beserta penjelasannya tentang pemindahan dan pemakaian tanah-tanah yang mempunyai titel menurut hukum Eropa.

Agustus 1951 fotokopi 2 lembar

Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Dewan Menteri tentang RUU (Darurat) untuk pengganti SOB dan penimbunan barang.

05-15 September 1951 pertinggal 2 lembar

563 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Menteri Kehakiman tentang permohonan paraf pada RUU Darurat mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan.

Nb. Lampiran tidak ada.

08 September 1951

asli 1 lembar

Surat dari Menteri Agama RI kepada Perdana Menteri RI tentang RUU mengenai pembentukan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan-Dewan Pemerintahnya.

11 September 1951 tembusan 1 lembar

565 Surat dari Menteri Keuangan kepada Presiden RI tentang penyampaian RUU Darurat tentang penghentian berlakunya "*Indische Muntwet 1912*" dan penetapan peraturan baru tentang mata uang untuk dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

Nb. Lampiran tidak ada.

13 September 1951 tembusan

1 lembar

566 Surat-surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang undangan untuk merundingkan Rencana UU pengganti UU No. 22 tahun 1948.

26 September-04 Oktober 1951 asli

2 lembar

567 Surat-menyurat antara Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan Kementerian Kehakiman tentang rencana peraturan pembiayaan mendirikan perumahan.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

16 Oktober-05 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 1 sampul

Rancangan Keputusan Presiden RI tahun 1951 tentang pembatalan semua keputusan pengangkatan Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas atas Bank Tabungan Pos dan penetapan anggota yang baru, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

12 November 1951 salinan 2 lembar Surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Kehakiman tentang RUU mengenai ketentuan pinjaman nasional tahun 1946.

01 Desember 1951

asli

1 lembar

570 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang Rancangan Surat Keputusan Presiden mengenai penerimaan resmi Protokol 19 November 1948 (bahan-bahan bius).

Nb. Sebagian Bahasa Inggris.

24 Januari 1951 asli, salinan 10 lembar

571 Rancangan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

Nb. Arsip tidak lengkap dan rusak ringan.

1951 fotokopi 1 lembar

572 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Wakil Presiden RI, Perdana Menteri, dll tentang penyampaian surat Jaksa Agung pada Mahkamah Agung mengenai kurang lancarnya hubungan pekerjaan Polisi dengan Kejaksaan di Bondowoso, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang UU Kepolisian.

17 Januari 1952 pertinggal 1 lembar

573 Risalah rapat DPR RI ke-14 pada 25 Februari 1952 dan pembentukan panitia *ad hoc* dengan tugas menyusun RUU initiatief DPR RI mengenai hak *enquete* dan pertanggungan jawab Menteri.

25 Februari 1952 konsep, salinan 8 lembar

574 Surat dari Kepala Staf Angkatan Darat Kementerian Pertahanan kepada P.T. Kepala Staf Angkatan Perang tentang beberapa pokok pikiran sebagai tambahan bahan untuk menyusun peraturan (instruksi) pemerintah mengenai *Militaire Bijstand*.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

17 Mei 1952 salinan 1 sampul

575 Surat dari Menteri Keuangan kepada Ketua DPR RI tentang penyampaian jawaban Pemerintah atas laporan bahagian-bahagian mengenai RUU tentang penetapan UU Darurat No. 13/1951 tentang bursa sebagai UU.

22 Mei 1952 fotokopi, tembusan 3 lembar

576 Surat dari Panitera Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tentang penyelesaian RUU mengenai hukum acara apabila sesuatu berkas perkara hilang.

26 Juli 1952 asli 1 lembar

577 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang pembentukan suatu panitia *ad hoc* untuk meninjau RUU tentang dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan pertahanan pada umumnya.

29 Juli 1952 asli 1 lembar

Nota-Nota Keuangan dan Laporan Devisen tahun 1952 dan 1956 yang bertalian dengan perancangan APBN.

01 November 1952-September 1956 fotokopi 1 sampul

579 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara tentang RUU mengenai premie penangkapan candu gelap (obat bius).

13 Desember 1952 pertinggal 1 lembar 580 Berkas tentang Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 1952-1965.

Nb. Sebagian rusak sedang.

1952-21 Januari 1965

asli, pertinggal, fotokopi, tembusan, salinan

1 sampul

581 Surat dari Menteri Pertanian kepada Perdana Menteri tentang RUU pembentukan daerah otonom Provinsi Kalimantan.
Nb. Rusak berat.

08 Januari 1953 salinan 2 lembar

582 Surat-surat tentang perancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan Dewan Penerbangan.

18 Mei-05 Oktober 1953 salinan 3 lembar

Surat-menyurat antara Kepala Jawatan Pelayaran dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman tentang RUU Darurat tentang Mahkamah Pelayaran.

Nb. Lampiran tidak ada.

09-26 Juni 1953 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

584 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Menteri Keuangan tentang menyetujui Rancangan Undang-undang untuk memperlindungi gelar "akuntan" atau "accountant".

21 September 1953 pertinggal 1 lembar

585 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI mengenai penyampaian RUU tentang menetapkan "UU Darurat No. 9 tahun 1953 tentang pengawasan orang asing" sebagai UU.

Nb. Lampiran tidak ada.

12 Januari 1954 pertinggal

2 lembar

586 Surat dari Menterian Kehakiman kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai RUU Darurat tentang keadaan bahaya.

02 Februari 1954 pertinggal 6 lembar

587 Laporan DPR RI tentang RUU penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1952 mengenai pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang mempunyai titel menurut hukum Eropa sebagai undang-undang.

05 Februari 1954 salinan 7 lembar

Surat-surat tentang Rancangan Undang-Undang mengenai Barisan Sukarela (kelompok bersenjata untuk membantu negara memelihara keamanan dan ketertiban umum) dan perkumpulan terlarang.

17 November 1953-03 November 1954 pertinggal, asli, fotokopi 1 sampul

589 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tahun 1954 tentang penetapan peraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut.

20 Agustus 1954 asli, salinan, fotokopi 9 lembar

590 Berkas tentang Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pendirian Universitas Airlangga di Surabaya, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

17-23 Oktober 1954 asli, salinan, fotokopi 9 lembar

591 Surat-surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian berbagai Rancangan Peraturan Pemerintah.

Nb. Lampiran tidak ada.

18 Oktober 1954-10 Desember 1955 asli 4 lembar

592 Rancangan Peraturan Pemerintah tahun 1954 dengan penjelasannya tentang pembentukan Provinsi Administratif Sulawesi Utara dan Provinsi Administratif Sulawesi Selatan, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

> 18 Oktober 1954 asli, fotokopi 4 lembar

593 Rancangan-rancangan Undang-undang tahun 1954 dengan penjelasannya, antara lain tentang biaya surat pengetahuan lahir dan surat pengetahuan mati, pengesahan persetujuan perjanjian dengan *Export-Import Bank of Washington*, dan perkumpulan terlarang, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

18 Oktober-12 November 1954 asli, fotokopi 1 sampul

594 Berkas Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara RI dengan *Export-Import Bank of Washington* untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Menteri dan Sidang Kabinet, disertai surat pengantar.

Nb. Sebagian Bahasa Inggris.

18 Oktober 1954-25 Oktober 1956 asli, salinan, fotokopi 1 sampul

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan PP No. 32 tahun 1954 mengenai pendaftaran orang asing dengan penjelasannya, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

22 Oktober 1954 salinan 3 lembar

596 Rancangan Undang-undang dengan penjelasannya tentang perubahan bea materai 1921, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

02 November 1954 asli, fotokopi 4 lembar

597 Berkas tentang Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pemungutan dan penggunaan uang opsenten atas bea keluar karet rakyat.

03 November 1954 31 Maret 1955 asli, salinan, fotokopi 9 lembar

598 Memo dari Panitia Perundang-undangan kepada Menteri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman tentang penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai perubahan PP No. 45 tahun 1954 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.

18 November 1954 asli, salinan 1 sampul

599 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Para Menteri tentang Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengeluaran surat bendaharawan untuk tahun 1954 tanggal 3 Desember 1954. Nb. Rusak ringan.

> 03 Desember 1954 fotokopi 5 lembar

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan PP No. 42 Tahun 1954 tentang pembatasan perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras.

1954 fotokopi 1 lembar

Berkas tentang risalah perundingan DPR RI mengenai rancangan anggaran tahun dinas 1954.

08-23 Maret 1955 asli 1 sampul 602 Rancangan Undang-undang tahun 1952-1955 antara lain tentang penyelesaian hutang negara di zaman pergolakan, dll, yang disampaikan oleh Kepala Urusan Arsip/Eskpedisi DPR RI.

Nb. Sebagian rusak ringan.

10 Maret-18 April 1955 konsep, fotokopi 1 sampul

Rancangan Peraturan Pemerintah dengan penjelasannya tentang peraturan pembebasan dari bea masuk dan bea keluar umum untuk keperluan golongan-golongan pejabat dan ahli bangsa asing yang tertentu, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

21 Maret 1955 asli, fotokopi 3 lembar

Rancangan Peraturan Pemerintah dengan penjelasannya tentang pemindahan kekuasaan "*Hoofd van gewestelijk Bestuur*" dalam peradilan asli, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

23 Maret 1955 salinan 3 lembar

Rancangan Undang-undang dengan penjelasannya tentang peraturan putusnya hubungan kerja, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

31 Maret 1955 asli, fotokopi 1 sampul

606 Surat-surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dll mengenai undangan Sidang Dewan Menteri ke-105 yang salah satunya membahas RUU tentang perubahan dan tambahan *Indische Tariefwet*, dll.

31 Maret-07 April 1955 asli, fotokopi 4 lembar

607 Rancangan Undang-undang Darurat tahun 1955 dengan penjelasannya tentang Bank Rakyat Indonesia, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

25 Mei 1955 asli, fotokopi 6 lembar

Rancangan pemberitahuan dalam Berita Negara RI untuk Surat Keputusan Presiden No. 1 tahun 1956 tentang pembubaran dan pembentukan Panitia Agraria.

14 Januari 1956 konsep, salinan 3 lembar

609 Surat-surat tentang penyampaian dan persetujuan RUU mengenai korupsi.

Nb. Sebagian rusak sedang.

24 September 1956 pertinggal, tembusan 3 lembar

610 Berkas tentang Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pembangunan Masyarakat Desa (PMD).

Nb. Rusak ringan.

01 Oktober-05 Desember 1956 asli, fotokopi 1 sampul

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Pertanian tentang RUU pelarangan pengeluaran bibit tanaman.

07 Oktober 1956 pertinggal 1 lembar

Rancangan Undang-undang tahun 1956 dengan penjelasannya tentang persetujuan kebudayaan dan pengajaran antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

08 Oktober 1956 asli, fotokopi 8 lembar Surat-surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, dll, antara lain tentang tentang pembentukan Panitia Negara untuk mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah dan perubahan rancangan peraturan pemerintah tentang tambang minyak Sumatera Utara dan anggaran dasar yayasan.

Nb. Rusak ringan.

09-31 Oktober 1956 asli, fotokopi 1 sampul

Berkas tentang Rancangan-rancangan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang mengenai pendirian dan perizinan perusahaanperusahaan.

> 09-29 Oktober 1956 fotokopi, tembusan 1 sampul

Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman, dll tentang penyampaian surat Menteri Keuangan dengan lampirannya mengenai surat-surat anggaran belanja tahun 1956.

26 Oktober 1956 asli, salinan 1 sampul

616 Surat Menteri Perekonomian kepada Sekretaris Dewan Menteri tentang Rancangan Keputusan Presiden mengenai Lembaga Ukuran Meter Indonesia dan Lembaga Timbangan Kilogram Indonesia, disertai pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

> 29 Oktober 1956 salinan 5 lembar

Rancangan Undang-undang dengan penjelasannya tentang perkumpulan koperasi, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

03 Desember 1956 asli, fotokopi 1 sampul Surat-surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden, dll mengenai penyampaian Rancangan Keputusan Presiden tentang memperluas tugas Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan (PNPKK) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 54 tahun 1955.

11-17 Desember 1956 salinan, tembusan 7 lembar

619 Rancangan Peraturan Pemerintah tahun 1956 dengan penjelasannya tentang pemberian uang duka atau penghibur kepada janda atau ahli waris anggota Angkatan Perang yang tewas karena keganasan gerombolan.

1956 fotokopi 3 lembar

620 Rancangan Peraturan Pemerintah dan penjelasannya tentang pembebasan dari bea masuk atas dasar hubungan internasional, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

31 Desember 1956 asli, fotokopi 3 lembar

Surat dari Perdana Menteri RI kepada Menteri Kehakiman mengenai RUU tentang pertanggungan jawab kepidanaan Menteri (usul inisiatif anggota-anggota DPR H.Z.A. Achmad, dkk).

23 Januari 1957 tembusan 1 lembar

622 Surat dari Dewan Pembantu Penguasa Militer Tertinggi kepada Menteri Kehakiman, dll tentang penyampaian konsep peraturan penguasa militer tentang penghasilan dan usaha pegawai negeri dalam lapangan partikelir.

30 Juli 1957 asli, salinan 5 lembar 623 Surat dari Kepala Sekretariat Penguasa Miiter Tertinggi Kementerian Pertahanan kepada Menteri Kehakiman dll tentang penyampaian konsep-konsep peraturan mengenai pengawasan orang asing dan pendaftaran WNI keturunan asing.

08 Agustus 1957 asli, salinan 1 sampul

Memori Penjelasan dari RUU tentang perubahan *canon* dan *cijns* atas hak-hak *erfpacht* dan konsesi guna perusahaan kebun besar, disertai surat pengantar dari Kementerian Agraria dan Sekretariat DPR RI.

06-18 Januari 1958

asli, fotokopi

1 sampul

Anggaran RI untuk tahun Dinas 1960 tentang Badan-Badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi.

1960 fotokopi

3 lembar

626 Rancangan-rancangan Undang-undang tahun 1961 dengan penjelasannya, antara lain tentang pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, karantina udara, perguruan tinggi, dll.

14 Agustus-23 November 1961

fotokopi

1 sampul

Rancangan Undang-Undang tahun 1961 tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara RI dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok).

1961

fotokopi

5 lembar

Rancangan Undang-undang tahun 1962 dengan penjelasannya tentang Desa Praja dan Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

1962

fotokopi

1 sampul

Rancangan Undang-undang tahun 1962 dengan penjelasannya tentang Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat (P3R).

1962

fotokopi 4 lembar

630 Nota-nota dari Mr. M. Sudardjat kepada Sekretaris Jenderal dan Menteri Kehakiman tentang berbagai Rancangan Undang-undang. Nb. Lampiran tidak lengkap.

> TT fotokopi 1 sampul

Rancangan Undang-undang tentang dasar-dasar pokok kekuasaan Kehakiman dan tentang Mahkamah Agung.

TT

fotokopi

8 lembar

632 Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960).

TT

fotokopi

1 jilid

## Pengundangan

633 Surat-surat Keputusan berbagai Lembaga Negara dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

23 Maret 1950-22 Juni 1960 konsep, salinan 1 sampul

Berkas tentang pengundangan Ketetapan Menteri Kehakiman tanggal
 31 Juli 1950 No. JA 1.5/1/4 mengenai pendaftaran kapal-kapal.
 Nb. Sebagian Bahasa Belanda

31 Juli-25 September 1950 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

635 Surat-menyurat antara Kepala Jawatan Imigrasi dengan Menteri Kehakiman tentang permohonan pengumuman dalam Lembaran Negara untuk peraturan tentang pakaian dinas dan tanda-tanda pangkat untuk pegawai-pegawai Imigrasi.

Nb. Lampiran tidak lengkap.

16 Agustus-26 September 1950 asli, pertinggal, konsep, fotokopi

1 sampul

Surat-surat tentang pengesahan, perubahan, dan pengundangan atas penetapan, keputusan dan peraturan-peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Nb. Sebagian rusak sedang.

19 Agustus 1950-19 Agustus 1961 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

637 Surat-surat Keputusan Presiden RI tahun 1950 tentang pengangkatan berbagai pejabat tinggi pemerintahan RI pada DPR, Mahkamah Agung, kementerian-kementerian, dll.

21 Agustus-17 Oktober 1950

salinan

1 sampul

638 Surat dari Menteri Kehakiman RI kepada Pemimpin Kantor Pemberitaan "Antara" dan Direktur *Persbureau* "Aneta" tentang pengumuman resmi pemerintah akan berlakunya Keputusan Presiden RIS tanggal 9 Agustus 1950 No. 29 (Lembaran Negara 1950 No. 54) mengenai kejahatan dan pelanggaran oleh pejabat-pejabat yang disebutkan dalam pasal 148 Konstitusi RIS (forum privelegiatum).

25 Agustus 1950 pertinggal, konsep 4 lembar

639 Surat-surat tentang permohonan pemuatan dan pembetulan berbagai surat keputusan, peraturan, dan pengumuman dalam Berita Negara, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Nb. Sebagian rusak sedang dan lampiran tidak ada.

05 September 1950-21 Agustus 1958 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

640 Berkas tentang permohonan pengundangan dan pembetulan Surat-surat Ketetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juni 1950 No. 92, 95, 96, dan 97/1950/R dalam Berita Negara.

07 September-14 November 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul 641 Surat-menyurat antara Kabinet Presiden dengan Sekretaris Kementerian Kehakiman tentang pengundangan Keputusan Presiden, PP, UU, dan UU Darurat pemerintahan RI tahun 1950-1954 dalam Berita Negara, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang kemudian disampaikan pada Kementerian Penerangan untuk disiarkan melalui radio.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan sebagian rusak ringan.

09 September 1950-14 April 1954 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

Surat-menyurat (telegram) antara Kementerian Kehakiman Yogyakarta dengan Kementerian Kehakiman tentang permintaan pengiriman nomor undang-undang pengesahan Undang-undang Dasar Sementara RI.

12-14 September 1950 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

643 Berkas tentang pengesahan, perubahan, dan/atau pengundangan penetapan, keputusan, dan peraturan-peraturan kementerian/lembaga dalam bidang kesehatan.

Nb. Sebagian rusak ringan.

12 September 1950-08 Desember 1956 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

644 Surat-surat tentang permohonan ralat pada berbagai *Staatsblad* Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Nb. Lampiran tidak lengkap, sebagian rusak ringan dan sebagian Bahasa Belanda.

13 September 1950-12 Oktober 1953 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi, tembusan 1 sampul

645 Berkas tentang pengesahan, perubahan, dan/atau pengundangan penetapan, keputusan, dan peraturan-peraturan kementerian/lembaga RI dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Nb. Sebagian rusak sedang.

26 September 1950-21 Oktober 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul 646 Berkas tentang pengesahan, perubahan, dan/atau pengundangan penetapan, keputusan, dan peraturan-peraturan Kementerian Perhubungan.

Nb. Sebagian rusak ringan dan sebagian Bahasa Belanda.

06 Oktober 1950-13 Agustus 1964 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi, tembusan 1 sampul

647 Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Centrale Stichting Wederopbouw tentang pembebasan tugas dan penunjukan Sekretaris Dewan Pengurus dan Dewan Penguasa Centrale Stichting Wederopbouw.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

26 Oktober 1950 salinan 1 lembar

648 Berkas tentang keputusan pengangkatan calon Walikota Salatiga.

26 Oktober 1950-15 Maret 1951 asli, pertinggal 1 sampul

649 Surat-surat Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

27 Oktober 1950-05 April 1954 salinan 1 sampul

Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 dan penjelasannya tentang mencabut kembali Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 7) dan menyerahkan kembali kekuasaan dan kewajiban pemerintahan dan penjagaan keamanan umum di Jakarta Raya dari Gubernur Militer Ibu Kota kepada pemerintah sipil dan polisi umum.

28 Oktober 1950 salinan 2 lembar 651 Surat-surat dari Kedutaan Besar Indonesia di Washington D.C. dan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri Kehakiman tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang mengenai perjanjian pinjaman pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.

Nb. Sebagian Bahasa Inggris.

04 November 1950-09 Juli 1951 asli, pertinggal 1 sampul

652 Surat Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1950 tentang perintah kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Drs. A. Oudt, dll untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan soal-soal yang bersangkutan dengan bantuan E.C.A., setelah menghadiri Konferensi Kedua para Menteri Peserta Uni Belanda-Indonesia di Belanda.

15 November 1950 salinan 2 lembar

Berkas tentang peraturan-peraturan mengenai perburuhan.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan Inggris.

21 November-20 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 1 sampul

Berkas tentang peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat sipil dan kondisi darurat perang.

Nb. Bahasa Belanda.

09 Desember 1950-31 Oktober 1951 salinan 1 sampul

655 Surat-surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

23 Desember 1950-20 Oktober 1955 salinan 1 sampul Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Kehakiman di Yogyakarta tentang permintaan pengiriman Undangundang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman di Yogyakarta sejak Januari 1950 hingga terbentuknya Negara Kesatuan, sehubungan dengan permohonan ralat pada Penjelasan Undang-undang No. 17 tahun 1950.

28 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep 5 lembar

657 Lembaran Negara RI Nr. 81 tahun 1950 tentang Surat Keputusan Presiden RI mengenai UU Darurat tentang memungut opsenten atas beabea masuk untuk tahun 1951.

> 28 Desember 1950 salinan 2 lembar

658 Surat-surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang peraturan umum ujian penghabisan sekolah-sekolah lanjutan negeri untuk tahun pelajaran 1950/1951, daftar anggota-anggota panitia ujian penghabisan SMA warga P.P. 32, dan jadwal ujian negeri untuk mencapai ijazah BII Seni Rupa bagian menggambar di Yogyakarta.

Nb. Sebagian rusak sedang.

02 Januari 1951-18 Februari 1953 salinan 1 sampul

659 Surat-surat tentang penetapan Menteri Kehakiman RI tentang penetapan saat berlakunya "*Ordonnantie Noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling* 1948" (*Staatsblad* 1948 No. 54) untuk daerah Pegawai Pemindahan Hak-Tanah di Yogyakarta, Surakarta, Kediri, Madiun, dan Jambi.

10 Januari-05 Februari 1951 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

660 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. Kab.1/1/2 tentang penetapan peraturan mengenai "Panitia *herschikking*" dengan fungsi peninjauan terhadap susunan kantor-kantor daerah, penempatan kepalakepala daerah, dll.

22 Januari 1951

salinan 3 lembar

Berkas tentang pengesahan, perubahan, dan/atau pengundangan penetapan, keputusan, dan peraturan-peraturan kementerian/lembaga RI dalam bidang keagamaan.

Nb. Sebagian rusak ringan.

29 Januari 1951-12 September 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

662 Surat-surat Keputusan Menteri Perhubungan RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

06 Februari 1951-30 Desember 1953 salinan 6 lembar

663 Surat-surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

07 Februari 1951-17 November 1954 salinan 9 lembar

Surat-surat Keputusan Menteri Agama RI dalam bidang kepegawaian.Nb. Sebagian rusak berat.

26 Februari 1951-10 Desember 1953 salinan 1 sampul

665 Surat-surat tentang permohonan dari Kabinet Perdana Menteri RI tentang pengumuman peraturan dan keputusan kekuasaan militer pusat dan penjelasannya dalam Berita Negara.

28 Februari-19 Maret 1951 asli, konsep 3 lembar

Surat-menyurat antara Direktur Kabinet Presiden dengan Sekretaris Kementerian Kehakiman tentang ralat pada PP No. 4 Tahun 1951.

03 Maret-10 Mei 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan

667 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Perdana Menteri RI tentang PP No. 32 tahun 1950 mengenai kekuasaan Kantor Urusan Pegawai.

> 07 Maret 1951 salinan 4 lembar

668 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1950 dan Instruksi Pemerintah berhubung dengan Maklumat Pemerintah tanggal 30 Januari 1952. Nb. Lampiran tidak ada.

> 08 Maret 1951-13 Februari 1952 pertinggal 2 lembar

669 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang Undang-undang perlindungan berkaitan dengan warga negara turunan Arab di Gresik dan Malang.

Nb. Lampiran tidak ada.

08 Maret 1951 asli 1 lembar

670 Surat pengantar dari Sekretaris Dewan Ekonomi Keuangan kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian Surat Keputusan Dewan Ekonomi dan Keuangan mengenai pembentukan dan tugas kewajiban Panitia Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Priok.

20 April 1951 asli, salinan 3 lembar

671 Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Uni Indonesia-Nederland No. 5/S.D.U./51 tentang pengangkatan Mr. R.M.T. Soemardi Mangoenkoesoemo sebagai Ajun Sekretaris Jenderal pada Kantor Sekretariat Uni Indonesia-Nederland di Jakarta.

24 April 1951 salinan 1 lembar 672 Surat-surat tentang pengesahan, perubahan, dan pengundangan penetapan dan keputusan-keputusan Perdana Menteri, antara lain mengenai Panitia Nasionalisasi, Pengurus Besar Palang Merah Indonesia, dll.

09 Mei 1951-04 April 1959 asli, konsep, salinan 1 sampul

673 Surat dari Ketua Panitia Tahanan/Tawanan Provinsi Jawa Tengah kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepenjaraan tentang penyampaian surat keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai pembentukkan Panitia Tahanan/Tawanan Provinsi Jawa Tengah.

24 Mei 1951 tembusan, salinan 3 lembar

674 Surat-surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

30 Mei 1951-17 Oktober 1955 salinan 1 sampul

675 Surat-surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI tentang penghasilan yang diberikan kepada pegawai-pegawai imigrasi yang ditempatkan di Hongkong dan Singapura, disertai surat pengantar dari Sekretaris Jenderal Menteri Luar Negeri.

01 Juni 1951 asli, salinan 4 lembar

676 Surat Putusan-putusan Presiden RI No. 125 tanggal 14 Juli 1951 tentang pembentukan Dewan Pertahanan yang bertugas membantu Dewan Menteri dalam menetapkan kebijaksanaan umum pemerintah.

14 Juli 1951 fotokopi 1 lembar 677 Surat Putusan-putusan Presiden RI No. 127 tanggal 16 Juli 1951 tentang penetapan pemberian pembebasan hukuman untuk sepenuhnya atau sebagian pada tanggal 17 Agustus kepada mereka yang dihukum hilang kemerdekaannya dan penyerahan pelaksanaan peraturan kepada Menteri Kehakiman.

16 Juli 1951 fotokopi 1 lembar

678 Surat pengantar dari Menteri Luar Negeri kepada Kementerian Kehakiman tentang penyampaian Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. S.P./316/L mengenai perintah kepada R. Sukono, Kontrolir Kepala Jawatan Pegadaian Negeri untuk pergi ke Tokyo dan memeriksa semua intan berlian pada *Nederlandsche Handel Maatschappij* (*Factory*) sebelum diserahkan kepada Kepala Misi RI di Tokyo.

24 Juli 1951 salinan 3 lembar

679 Surat-surat Keputusan Menteri Pertahanan RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

24 Juli 1951-08 Juni 1957 salinan 1 sampul

Surat-surat Keputusan Menteri Perburuhan dan Menteri Sosial tentang pemindahan kantor pusat beberapa jawatan dari Yogyakarta ke Jakarta, antara lain Jawatan Penempatan Tenaga, Jawatan Transmigrasi, dll.

31 Juli 1951 salinan 4 lembar

681 Tambahan Lembaran Negara RI Nr. 192 tentang nasionalisasi *de Javasche Bank*.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

15 Agustus 1951 fotokopi 1 sampul 682 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Gubernur Provinsi Kalimantan tentang pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 (Hukum Pidana) di wilayah Kalimantan Barat yang tidak termasuk bagian NKRI.

23 Agustus 1951 pertinggal 1 lembar

Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang penyampaian Surat Keputusan DPDS Provinsi Jawa Barat mengenai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran lalu-lintas.

> 13 September 1951 pertinggal, konsep, salinan 3 lembar

684 Surat-surat Keputusan Menteri Pertanian RI dalam bidang kepegawaian dan kepanitiaan.

Nb. Sebagian rusak berat.

03 Oktober 1951-23 Mei 1957 salinan 1 sampul

Berkas tentang pengesahan, perubahan, dan/atau pengundangan suratsurat keputusan dan pengumuman Menteri Pertanian dan Menteri Agraria.

Nb. Sebagian rusak ringan.

16 Oktober 1951-13 April 1954 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

Surat-surat Keputusan Menteri Sosial RI dalam bidang kepegawaian. Nb. Sebagian rusak sedang.

18 Oktober 1951-26 Mei 1953 salinan 4 lembar

687 Surat-surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang pembentukan Badan Pertimbangan Kebudayaan dan pembukaan KLP/SGB di Sumenep.

06 November 1951-27 Februari 1952 salinan

3 lembar

688 Surat Keputusan DPRDS Kabupaten Purbalingga No. 18/Um/Agr./D.P.R.D./'51 tentang penunjukan DPD Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan permintaan hak-hak eigendom kepada pemerintah atas tanah untuk kepentingan Daerah, dll.

08 November 1951 salinan 1 lembar

689 Surat-surat Keputusan Menteri Penerangan RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

04 Desember 1951-14 Desember 1953 salinan 5 lembar

690 Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1142/C-V tentang penghargaan ijazah sekolah-sekolah atau kursus-kursus pendidikan agama.

12 Januari 1952 fotokopi 3 lembar

691 Surat-surat Keputusan dan Errata Menteri Perekonomian RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

29 Januari 1952-16 Februari 1954 salinan 1 sampul

692 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 10490/U.U tentang keterangan mengenai istilah-istilah, pembagian kelas, pengobatan, tariftarif, dan penetapan umum pada peraturan untuk poliklinik-poliklinik kesehatan.

05 Maret 1952 salinan 2 lembar 693 Surat Keputusan Menteri Urusan Pegawai No. 4-1912/21/52 tentang mengubah putusan kedua dari surat keputusan No. 11/51 mengenai penyerahan alat-alat pengangkutan dalam pengurusan Jawatan Perjalanan untuk selanjutnya dipergunakan oleh Jawatan Transmigrasi.

27 Mei 1952 salinan 1 lembar

Berkas tentang perancangan dan pengundangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden mengenai cara hubungan dan kerjasama antara kuasa sipil dan kuasa militer.

Nb. Sebagian rusak berat.

09 September 1952-26 Oktober 1954 asli, salinan, fotokopi, tembusan 1 sampul

695 Surat-surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang penunjukan mahasiswa-mahasiswa ikatan dinas dengan biaya negara pada universitas-universitas Indonesia di Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, dan Yogyakarta.

16-27 Oktober 1952 salinan 8 lembar

696 Surat-surat tentang perancangan, pengesahan, pengundangan, dan peninjauan surat-surat keputusan bersama di bidang pendidikan, peradilan, pertahanan dan keamanan.

22 Oktober 1952-20 April 1964 pertinggal, asli, salinan 7 lembar

697 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri tentang peraturan mengenai sensor surat-surat yang ditujukan kepada instansi-instansi resmi (DPR) demi kepentingan hukum.

28 Oktober 1952 asli 1 lembar 698 Berkas tentang mulai berlakunya keputusan pemerintah mengenai penyerahan pembukuan kapal-kapal kepada syahbandar berdasarkan penetapan pemerintah tanggal 18 Maret 1947 No. 12 bagi daerah residensi Palembang, Manado, dan daerah Gorontalo.

14 November 1952-27 Juni 1953 asli, konsep, salinan 1 sampul

699 Tambahan Lembaran Negara RI Nr. 205 tentang penjelasan PP Nr. 14 tahun 1952 tentang pemberian pengganti kerugian kepada PNS untuk barang-barang bergerak yang rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa.

1952 fotokopi 1 lembar

700 Berkas tentang perancangan, perubahan, dan pengundangan atas peraturan-peraturan mengenai perbankan, khususnya untuk Bank Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Nb. Sebagian rusak sedang.

> 01 Juni 1953-18 Desember 1968 asli, pertinggal, fotokopi 1 sampul

701 Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 57/Um/53 dan perubahannya dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 128/Um/55 tentang uang sidang, uang jalan dan penginapan, uang pengganti kerugian bagi para anggota Dewan Pengurus Yayasan Karet Rakyat Pusat.

> 09 Juni 1953-08 September 1955 salinan 7 lembar

702 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembiayaan pengeluaran-pengeluaran keperluan Panitia Agraria.

Nb. Rusak berat.

12 Juni 1953 salinan 1 lembar 703 Surat-menyurat antara Kabinet Presiden dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman tentang Keputusan Presiden No.108 tahun 1953 mengenai pengangkatan S. Mangunsarkoro dan Mohammad Roem sebagai pembentuk kabinet.

> 16-24 Juni 1953 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

Surat-menyurat antara Direktur Kabinet Presiden RI dengan Sekretaris Jenderal Kehakiman tentang pengumuman dalam Lembaran Negara No. 51 tahun 1953 untuk pengundangan UU Darurat No. 7 tahun 1953 mengenai ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga tanpa surat izin.

20 Juni-02 Juli 1953 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

705 Surat-surat Keputusan Menteri Perburuhan RI dalam bidang kepegawaian.

Nb. Sebagian rusak sedang.

22 Juni-16 November 1953 salinan 1 sampul

706 Surat Keputusan Menteri Perburuhan RI No. 4927a/53 tentang memperpanjang waktu keanggotaan dari anggota/anggota-anggota pengganti Dewan Penasehat Jawatan Penempatan Tenaga Pusat.

27 Juni 1953 salinan 2 lembar

707 Surat Edaran dari Menteri Kehakiman RI kepada Ketua Mahkamah Agung Indonesia, dll tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional.

> 24 Agustus 1953 pertinggal 1 lembar

708 Surat pengantar dari Menteri Luar Negeri kepada Kementerian Kehakiman tentang penyampaian Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. S.P./1404/Del mengenai penunjukan Dr. Soedarsono, pegawai tinggi Kementerian Luar Negeri, dan Mr. Besar Martokusumo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, untuk pergi ke Tokyo guna melanjutkan usaha "Fact Finding Mission" RI ke Jepang, khususnya mengenai perundingan tentang pengangkutan kapal-kapal.

15 Desember 1953 salinan 4 lembar

709 Surat-surat Keputusan dan Peraturan Menteri Pertanian RI tentang panitia dan teknis ujian penghabisan di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Makassar, Padang, Bogor, dan honorarium bagi guruguru tidak tetap.

> 12 Januari 1954-09 Mei 1955 salinan 1 sampul

710 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. Pem.20/1/34 tentang pembagian daerah administratif Provinsi Jawa Timur daerah Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dari Karesidenan Kediri, dan Kabupaten Pacitan dari Karesidenan Madiun.

03 Maret 1954 salinan 2 lembar

Surat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 26 tahun 1954) untuk merubah Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953 (Lembaran Negara No. 61 tahun 1953), disertai penjelasannya, berkaitan dengan pemilihan anggota-anggota DPRD Minahasa.

09 Maret 1954 fotokopi 3 lembar

712 Surat dari Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi Kementerian Dalam Negeri kepada semua Kementerian tentang penyampaian Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1954 untuk merubah Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953 (Lembaran Negara No. 61 tahun 1953).

23 Maret 1953 asli, salinan

3 lembar

713 Surat dari Sekretaris Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat kepada Menteri Kehakiman RI tentang penyampaian keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tahun 1953-1954.

31 Maret 1954 salinan 1 sampul

714 Surat-surat Keputusan Menteri Perekonomian RI No. 6090/M dan No. 6091/M tentang perusahaan-perusahaan tambang minyak di Sumatera Utara yang diawasi dan diatur langsung oleh Kementerian Perekonomian.

12 April 1954 salinan 2 lembar

715 Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. U4/3/7 tentang peraturan pakaian dinas dan tanda-tanda pangkat serta bendera mobil pegawai bagian lalu lintas jalan.

22 April 1954 salinan 10 lembar

Memo dari Panitia Perundang-undangan kepada Menteri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman tentang penyampaian Undangundang Darurat mengenai amnesti dan abolisi.

> 13 September 1954 asli, konsep, salinan 1 sampul

717 Surat Pengatar dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal 11 November 1954 No. P 10/11/19 mengenai usul mengadakan putusan tentang tunjangan kejuruan bagi teknisi pegawai negeri.

29 November 1954 asli, salinan 3 lembar Kumpulan rancangan pemberitahuan dalam Berita Negara, Lembaran Negara, dan Tambahan Lembaran Negara RI untuk Surat Keputusan Menteri-menteri, Peraturan Pemerintah, hingga penjelasan UU tahun 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, dan 1960.

Nb. Lampiran tidak ada.

1954-1960 konsep 1 sampul

719 Kartu-kartu pokok Lembaran-lembaran Negara tahun 1954-1956 yang berisi berbagai UU, UU Darurat, dan PP, antara lain tentang kuasa Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia, PN Pelabuhan Palembang, dll.

1954-1955 fotokopi 1 sampul

720 Surat-surat keputusan Menteri Kesehatan RI tentang tempat-tempat pendidikan berbagai tenaga kesehatan.

30 Maret 1954-28 Juli 1955 salinan 1 sampul

721 Surat dari Kepala Jawatan Pajak kepada Kepala Inspeksi Keuangan Kantor Besar Jawatan Pajak tentang Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan pajak rumah tangga untuk kendaraan bermotor milik pegawai pemerintah dan anggota DPR.

19 Januari 1955 salinan 6 lembar

722 Surat-surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua DPDS Kabupaten Bandung dan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang UU mengenai Acara Pidana Khusus untuk anggota DPR. Nb. Lampiran tidak ada.

> 18 Mei 1955-16 November 1956 pertinggal 2 lembar

723 Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24511/Kab tentang pembukaan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di kota Tondano Sulawesi Utara.

> 28 April 1955 salinan 3 lembar

724 Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 88/Um/55 tentang pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Akademi Biologi.

06 Juli 1955 salinan 5 lembar

725 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Kepala Bagian Pendidikan Kementerian Kesehatan tentang permintaan pemuatan surat edaran Menteri Kesehatan dalam Tambahan Lembaran Negara.

21 Juli-02 September 1955 asli, pertinggal 7 lembar

726 Surat Keputusan Panglima Tentara & Territorium V "Brawidjaja" No. 0060/T.V./Kpts/55 tentang perintah kepada siapa pun di wilayah Territorium V Jawa Timur untuk menyerahkan senjata api milik pribadi untuk sementara pada instansi polisi terdekat dan pelarangan untuk sementara semua bahan-bahan atau alat-alat peledak milik perusahaan negeri atau partikelir.

Nb. Rusak ringan.

10 September 1955 salinan 1 lembar

727 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 189966/BSD tentang kesempatan pada para pengusaha penggaraman partikelir untuk membuat dan menjual garam.

20 September 1955 salinan 2 lembar

728 Surat Keputusan Presiden RI No.230/M tahun 1955 tentang pemindahan Kedutaan Besar RI di Karachi (Pakistan) dan pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Australia.

26 Oktober 1955 salinan 1 lembar

729 Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. 14.543a/M tentang daftar golongan barang-barang pada golongan I, II, III, dan IV, disertai lampiran.

31 Oktober 1955 salinan 6 lembar

730 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Kepala Jawatan Perindustrian Kementerian Perekonomian tentang jawaban atas permintaan pemuatan surat edaran Kepala Jawatan Perindustrian mengenai logam tua dalam Tambahan Berita Negara dan Berita 04 November 1955

pertinggal, konsep, fotokopi

4 lembar

731 Kumpulan Tambahan Lembaran Negara RI No. 896-900 dan 1955 antara lain mengenai kedudukan Balai Harta Peninggalan, peraturan Kursus Guru A (K.G.A.) dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, dll.

1955 fotokopi 5 lembar

732 Reaksi-reaksi luar negeri terhadap *joint-statement* Roeslan Abdulgani-Gromyko menurut kawat-kawat, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

20 Oktober 1956 asli, fotokopi 1 sampul

733 Surat dari Menteri Agraria kepada Perdana Menteri RI dengan dilampiri suatu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 13 tahun 1956 dengan penjelasannya mengenai pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

29 Oktober 1956 fotokopi 1 sampul 734 Surat pengantar dari Sekretariat Penguasa Militer Tertinggi Kementerian Pertahanan kepada Menteri Pertahanan tentang resume persoalan-persoalan SOB.

Nb. Lampiran tidak ada.

31 Juli 1957 tembusan 2 lembar

735 Lembaran Negara RI No. 102 tahun 1957 tentang Surat Keputusan Presiden RI mengenai UU tentang pembebasan Saudara Untung dari penggantian uang.

> 08 Oktober 1957 fotokopi 1 lembar

736 Berkas tentang perancangan Keputusan Presiden mengenai pemindahan urusan pendaftaran kapal dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Pelayaran.

28 Oktober 1957-22 Januari 1958 pertinggal, konsep, salinan, tembusan 1 sampul

737 Surat Peraturan Penguasa Militer, Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer atas seluruh wilayah Indonesia No. 989/PMT/tahun 1957 dan instruksi pelaksanaannya tentang pengawasan pengajaran asing.

06-19 November 1957 salinan 1 sampul

738 Instruksi Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer atas daerah Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia No. Instr/PM/012/1957 tentang kebijaksanaan umum penguasa militer dalam menghadapi pers.

> 23 November 1957 salinan 4 lembar

739 Kumpulan Tambahan Lembaran Negara RI No. 1829-1838 dan 1896 antara lain mengenai penjelasan atas Penetapan Presiden tentang Pemerintah Daerah, penjelasan PP pengganti UU tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank, dll.

05 Maret-24 Agustus 1959 fotokopi 1 sampul

740 Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. Kpts/043/Prod/1960 tentang pemindahan Pabrik Gula Pagottan ke Lombok (Pujung), disertai lampiran anggaran belanja tahun 1960-1963.

22 November 1960 salinan 4 lembar

741 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. Kab.1/15/1 tentang pemberian izin kepada *NV Electriciteit Maatschappij Bali en Lombok* di Surabaya untuk memasang dan mempergunakan saluransaluran listrik untuk mengalirkan tenaga listrik di wilayah Klungkung.

10 Agustus 1961 salinan

1 lembar

Pembetulan Keputusan Presiden RI No. 235 tahun 1961 tentang pengangkatan Direksi Sementara dari PN Pelabuhan Daerah II.

09 Oktober 1961 salinan 1 lembar

743 Surat-surat Keputusan Presiden RI No. 590 dan 592 tahun 1961 tentang penetapan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional untuk K.H. Samanhudi, HOS Tjokroaminoto, dll dan pemberian tanda-tanda kehormatan atas jasa-jasa kepada Negara dan Bangsa Indonesia untuk Josef Holaubek, Dr. Oswald Peterlunger, dll.

09-14 November 1961 salinan 2 lembar

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

1961 fotokopi 1 sampul 745 Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi No. KPTS/008/PROD/1962 tentang pembentukkan Badan Pertimbangan Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi.

18 April 1962 salinan 2 lembar

Lembaran-lembaran Negara No. 46, 99, 104, 105, 106, dan 116 tahun 1963, antara lain mengenai Peraturan Presiden tentang kedudukan keuangan anggota DPR-GR, dll.

22 Mei-30 November 1963 fotokopi 1 sampul

Peraturan Presiden RI No. 24 tahun 1963 tentang Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) (Lembaran Negara tahun 1963 No. 111).

27 November 1963 salinan 3 lembar

Peraturan Presiden RI No. 1 tahun 1964 tentang Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 1965 No. 90).

03 Februari-24 September 1964 salinan 9 lembar

749 Peraturan Presiden RI No. 6 tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Tatacara dan Peraturan-peraturan (Lembaran Negara tahun 1965 No. 22).

> 26 Maret 1964 salinan 2 lembar

750 Peraturan Presiden RI No. 20 tahun 1964 tentang pengawasan atas kegiatan-kegiatan Perusahaan Dagang Negara dan Perusahaan Negara di luar negeri (Lembaran Negara tahun 1964 No. 58).

04 Juni 1964 salinan 1 sampul 751 Peraturan Presiden RI No. 21 tahun 1964 tentang surat pendorong produksi tambahan untuk ekspor dari ex-daerah konsinyasi *counter import* (Lembaran Negara tahun 1964 No. 62).

18 Juni 1964 salinan 2 lembar

752 Peraturan Presiden RI No. 22 dan 23 tahun 1964 dan penjelasannya tentang pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang serta lalu lintas barang dan uang di Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara tahun 1964 No. 64-65 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2661).

20 Juni 1964 salinan 1 sampul

Peraturan Presiden RI No. 26 tahun 1964 tentang perubahan/tambahan Peraturan Presiden RI No. 10 tahun 1963 tentang distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri (Lembaran Negara tahun 1964 No. 75).

24 Agustus 1964 salinan 3 lembar

Peraturan Presiden RI No. 33 tahun 1964 dan penjelasannya tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan.

19 September-04 November 1964 salinan 1 sampul

755 Peraturan Presiden RI No. 31 tahun 1964 tentang Badan Ekonomi dan Keuangan.

Nb. Arsip tidak lengkap

1964 salinan 1 lembar

Peraturan Presiden RI No. 37 tahun 1964 dan penjelasannya tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional (Lembaran Negara tahun 1964 No. 122 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2712).

25 November 1964 salinan 7 lembar 757 Peraturan Presiden RI No. 40 dan 41 tahun 1964 tentang kedudukan keuangan Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat serta Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1964 No. 128).

Nb. Arsip tidak lengkap.

12 Desember 1964 salinan 3 lembar

Peraturan Presiden RI No. 46 tahun 1964 dan penjelasannya tentang pemberian perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai sipil/anggota Angkatan Kepolisian Negara/anggota militer/menteri negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan anak yatim piatunya (Lembaran Negara tahun 1964 No. 136 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2719).

28 Desember 1964 salinan 3 lembar

759 Terbitan Khusus Kementerian Penerangan RI tentang Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

28 Maret 1966 fotokopi 1 jilid

760 Surat Keputusan Presiden RI No. 93 tahun 1969 tentang Dana Pengasuhan Putera-Puteri Irian Barat.

17 November 1969 salinan 2 lembar

761 Undang-undang Darurat tentang Warganegara Indonesia Keturunan Arab.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

TT fotokopi 6 lembar Daftar nama-nama Panitia Negara beserta susunan, tugas serta tanggal dan nomor Keputusan Presiden sebagai dasar pembentukkannya.

TT konsep 4 lembar

Undang-undang Darurat tentang penarikan uang perak lama, yang dikeluarkan berdasarkan "*Indische Muntwet* 1912", dari peredaran, dan larangan mempergunakannya sebagai alat pembayaran yang sah.

TT fotokopi 3 lembar

### Litigasi

764 Berkas tentang peninjauan materi, pembaharuan dan pencabutan peraturan perundang-undangan masa penjajahan Belanda.
Nb. Sebagian rusak ringan.

25 Agustus 1950-19 Oktober 1956 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

765 Surat-surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Agama tentang peninjauan materi undang-undang bea imigrasi baru dan pembahasan usul penghapusan pasal 527 dan menambah pasal 270 UU Hukum Pidana.

01 Desember 1950-20 Februari 1951 asli, tembusan 3 lembar

766 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Jaksa Agung tentang adanya Maklumat Kepala Daerah Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 1948.

> 25 April-01 Agustus 1951 asli, pertinggal 1 sampul

Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Ketua DPR RI tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 RI untuk penggabungan daerah-daerah kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo.

24 September 1951

tembusan 3 lembar

768 Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI No. MP/C/831/55 tentang pencabutan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI No. MP/C/455/55 dan penyerahan kembali pistol merk Vickers No. 3947 kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Jakarta.
Nb. Rusak ringan.

07 Desember 1955 salinan 1 lembar

769 Berkas tentang penarikan kembali berbagai Rancangan Undang-undang dengan amanat Presiden.

28 Juni-29 September 1956 asli, pertinggal, konsep, tembusan 1 sampul

770 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri RI tentang laporan Panitia Negara untuk meninjau Zoutmonopolie-Ordonnantie 1941, serta RUU tentang pembikinan, peredaran, penjualan dan penyimpanan garam, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

15 Oktober 1956 asli, salinan, fotokopi 1 sampul

### 2. Ketatanegaraan

### Kedaulatan Negara

 Surat pernyataan Panglima Besar RI Soekarno tentang gencatan senjata dan penetapan garis demarkasi pada tanggal 15 Februari 1947.
 Nb. Sebagian rusak berat dan Bahasa Belanda.

> 1947 salinan 6 lembar

772 Catatan tentang pertemuan Security Council ke-2047 tanggal 17 Februari 1948 di New York mengenai pertanyaan Indonesia (*Indonesian Question*) sehubungan dengan status Belanda dan RI. Nb. Bahasa Inggris.

17 Februari 1948 fotokopi 773 Berkas tentang laporan delegasi Indonesia dan delegasi Belanda mengenai perubahan ketatanegaraan urusan keuangan, perekonomian, sosial, kerjasama politik perdagangan dalam Konferensi Meja Bundar. Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan Inggris.

> 05 September-26 Oktober 1949 asli, pertinggal, salinan, fotokopi 2 sampul

Berkas tentang risalah-risalah Konferensi Meja Bundar berkaitan dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
 Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan Inggris.

10 September-14 November 1949 salinan, fotokopi 2 sampul

775 Memorandum tentang pengaduan pelanggaran Perjanjian Lingardjati, Renville, Royen-Rum, dan Mantelresolutie berkaitan dengan penyerangan terhadap Ambon. Nb. Bahasa Belanda.

> 07 November 1950 fotokopi 1 lembar

776 Berkas tentang pembagian dokumen dalam arsip sekretariat Uni Indonesia-Nederland di Jakarta tahun 1950, antara lain mengenai laporan rapat-rapat Konferensi Irian, Laporan rapat-rapat MCII, dll. Nb. Sebagian Bahasa Belanda

1950 fotokopi 1 sampul

777 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang keterangan Delegasi Indonesia dan pemerintah Belanda mengenai Irian Barat.

03 Januari 1951 salinan 3 Jembar 778 Berkas tentang laporan *vredesconferentie* dengan Jepang yang diselenggarakan di San Fransisco.

Nb. Bahasa Belanda dan Inggris

26 Februari-08 September 1951 asli, salinan, pertinggal, fotokopi 1 sampul

779 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Jaksa Agung dan Sekretaris Dewan Menteri tentang usul supaya Republik Indonesia menjadi anggota I.C.P.C. (*International Criminal Police Commision*) di Paris.

17 Mei 1951-29 April 1952 pertinggal, asli, fotokopi 1 sampul

780 Draf sementara perjanjian damai dengan Jepang (*provisional draft of a Japanese Peace Treaty*) dengan memorandum, disertai surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri.

Nb. Bahasa Inggris.

23 Mei 1951 asli, fotokopi 1 sampul

781 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan A.L. de Boer di Suriname mengenai jawaban atas permohonan A.L. de Boer mengenai perjanjiannya dengan beberapa orang wakil Indonesia.

06-25 Juli 1951 pertinggal 3 lembar

782 Berkas tentang Hubungan Kerjasama antara Militer dan Kekuasaan Sipil dalam Keadaan Perang (*Staat van Oorlog*) menurut "*Regeling op den staat van Oorlog en van Beleg*" *Staatsblad* 1939 No. 582 dengan perobahan-perobahannya.

17 September 1952 fotokopi 1 sampul

783 Surat-surat tentang kedudukan diplomatik komisaris-komisaris Kerajaan Belanda di Indonesia.

18 Agustus-13 Oktober 1953 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

784 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Keuangan tentang permohonan pertolongan mempertimbangkan pinjaman pemerintah di zaman pergolakan 1948.

14 November 1953 pertinggal, konsep 4 lembar

785 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang Staf Pemerintahan Irian Barat yang akan tumbuh.

12 Februari 1954 asli, tembusan 2 lembar

786 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian kawat-kawat sandi dari Manila mengenai perundingan Indonesia-Philipina dalam soal imigrasi.

09 November 1954 asli, tembusan 10 lembar

787 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang reaksi-reaksi luar negeri mengenai Kabinet Baru (Kabinet Ali Sastroamidjojo-Rum-Chalid).

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan Inggris.

23 April 1956 asli, salinan 4 lembar

788 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Staf Angkatan Darat tentang adanya perbuatan kudeta dibawah pimpinan Kolonel Zulkifli Lubis.

07 Desember 1956 tembusan 2 lembar

789 Laporan tahunan Pemerintahan Provinsi Irian Barat tahun 1963.

TT fotokopi 1 jilid 790 Surat tentang pemasukan daerah ke dalam Daerah Bagian Negara RI.

TT konsep

791 Nota dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri tentang Konferensi Segi Empat dan masalah-masalah yang akan dapat dibicarakan dalam konferensi tersebut.

TT tembusan 1 sampul

### Susunan Kekuasaan

792 Surat dari Bagian Hotel Negara dan Tourisme (HONET) Kementerian Perhubungan kepada Perdana Menteri tentang permintaan peningkatan status HONET menjadi suatu Badan Pemerintahan tersendiri, disertai lampiran.

13 November 1950 asli, tembusan, salinan. 9 lembar

793 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang Kedudukan Jaksa Agung.

Nb. Lampiran tidak ada.

04 April 1951 asli 1 lembar

794 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang pelaksanaan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom.

Nb. Lampiran tidak ada.

20 Agustus 1952 pertinggal 1 lembar 795 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang penyampaian surat dari Kepala Kepolisian Negara mengenai Panitia Persiapan Pembangunan Istana Mangkunegara.

05 Mei 1954

pertinggal, salinan

2 lembar

796 Surat dari Sekretaris Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Kehakiman tentang undangan rapat pembagian wilayah RI dalam provinsi-provinsi.

25 Maret 1955

asli

4 lembar

797 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang kedudukan Jaksa Agung di Jakarta.
Nb. Rusak ringan.

22 Oktober 1956

asli

1 lembar

798 Surat dari Perdana Menteri dan Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang penyumpahan anggota dan pelantikan Konstituante.

31 Oktober-01 November 1956

asli

1 sampul

799 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman tentang keanggotaan Mr. Djody Gondokusumo pada DPR.

11 Desember 1956

asli

1 lembar

800 Surat dari Presidium Kabinet RI kepada Pimpinan DPR-GR sehubungan dengan surat Presiden RI tentang penyempurnaan pimpinan dan keanggotaan MPRS.

04-12 Mei 1966

fotokopi 4 lembar

# 3. Kewarganegaraan

Naturalisasi

801 Berkas tentang permintaan penambahan dan perubahan nama bagi warganegara turunan Eropa.

Nb. Sebagian rusak sedang dan Bahasa Belanda.

30 Maret 1949-26 November 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

802 Berkas tentang permintaan perubahan nama Warga Negara Indonesia (WNI).

Nb. Sebagian rusak berat, sebagian Bahasa Belanda dan Jawa.

15 Desember 1950-03 Desember 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

803 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang penyampaian surat Wakil Ketua Pengadilan Rapat Tinggi Palembang mengenai kedudukan orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia dalam Pengadilan Rapat (pengadilan asli).

Nb. Lampiran tidak ada.

02 Mei 1951 pertinggal, konsep 3 lembar

804 Berkas tentang permintaan perubahan nama bagi warga negara turunan Tionghoa.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda

09 November 1951-29 Mei 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

Surat-surat tentang permohonan J. Budiman untuk menjadi warga negara Indonesia dan memakai nama Indonesia.
 Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

31 Maret-17 April 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 9 lembar

806 Surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman, dll tentang surat Menteri Dalam Negeri mengenai penyampaian surat-surat tentang arti istilah "gevestigd" dalam hal kewarganegaraan dan siapa-siapa yang masuk sebagai WNI. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

04 Oktober 1954

salinan, tembusan 6 lembar

807 Surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri kepada para Menteri tentang penyampaian salinan surat Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan mengenai jawaban pemerintah atas pertanyaan anggota DPR a.n. Siauw Giok Tjhan tentang Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia.

20 November 1954 asli, salinan 5 lembar

808 Surat dari Pusat Badan Konferensi Bangsa Indonesia Turunan Arab kepada Perdana Menteri RI tentang pengangkatan turunan Arab dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

23 Maret 1956 tembusan 3 lembar

809 Nota dari A.Bajasut kepada Komisi Penyelesaian Masalah Keturunan Arab tentang usul agar menghapus peraturan-peraturan yang menghambat proses asimilasi keturunan Arab di Indonesia baik di bidang sosial maupun politik.

17 Mei 1956 tembusan 3 lembar

## Dwi Kewarganegaraan

810 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri tentang kewarganegaraan kembar Indonesia-Tiongkok.

> 24 November 1954 asli 1 lembar

# 4. Keimigrasian

Perizinan

811 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian surat permohonan pemberian visa untuk istri dari H. Gilchrist, delegasi Australia di "*United Nations Special Committe on the Balkans*", untuk tinggal di Amerika Serikat (*Verenigde Staten*) dari Indonesia.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

04 September 1950 asli, salinan 2 lembar

812 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Kepala Bagian Pelabuhan Kementerian Perhubungan tentang kesediaan membantu Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengurus jemaah haji, disertai lampiran.

> 30 Oktober 1950 tembusan, salinan 4 lembar

Surat-surat tentang permohonan izin untuk kembali ke Indonesia a.n. Mohamad Kassim dan Rapijan.

Nb. Lampiran tidak lengkap.

08 Januari 1951-23 Mei 1953 asli, salinan 7 lembar

Berkas tentang *simplification of formalities and reduction of cost for migrants* (penyederhanaan formalitas dan pengurangan biaya untuk migran).

Nb. Sebagian Bahasa Inggris.

13 Januari-23 April 1951 asli 1 sampul

815 Surat dari Sekretariat Presidium Universiteit Indonesia kepada Mr. Musa Surianata Jumena pada Kementerian Luar Negeri tentang penyampaian PP No. 19 dan 22 tahun 1951 dari Prof. Supomo untuk keperluan protokol dan Diplomatik Paspoort untuk Presiden Universiteit Indonesia.

06 April 1951 fotokopi 7 lembar 816 Surat dari Sekretaris Kementerian Kehakiman kepada Kepala Jawatan Imigrasi tentang penyampaian surat dari Ali Amsjah di Tanjungbalai tanggal 17 Mei 1951 mengenai pemasukan bangsa-bangsa asing.

Nb. Lampiran tidak ada.

19 Juni 1951 konsep 1 lembar

Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Firma "Kwong Teng Jie" di Balikpapan tentang penolakan permintaan untuk mendatangkan Lie Sien Koei dan 2 anak.

22 Juni 1953 pertinggal 1 lembar

818 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri tentang orang Indonesia yang ingin memasuki *Singapore Volunteer Corps*. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

22 Agustus 1953 pertinggal 5 lembar

819 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Kepala Jawatan Imigrasi tentang penyampaian salinan surat dari Residen Palembang yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengenai P. Maiduty Mahidin, seorang bangsa India di Kajuagung. Nb. Lampiran tidak ada.

30 Juni 1954 pertinggal 1 lembar

820 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Kantor Bipora tentang penyampaian surat dari Syahbandar Udara Kemayoran mengenai pembatasan pemberian izin masuk daerah *Douane* (bea cukai) dan imigrasi Pelabuhan Udara Kemayoran.

Nb. Lampiran tidak ada.

18 Maret 1955 pertinggal 1 lembar 821 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Kepala Jawatan Imigrasi tentang pembebasan bea kanselary bagi warga negara Jerman Timur, Korea dan Taiwan yang berstatus diplomatik/dinas.

15 Oktober-19 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan 7 lembar

822 Berkas tentang permohonan *exit-reentry permit* ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) a.n. Lim Hong Kian.

07 September-07 November 1956 asli, pertinggal, konsep 6 lembar

823 Surat-surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Kepala Kantor Imigrasi di Jakarta tentang peninjauan kembali permohonan perpanjangan K.I.M. a.n. L.M. Veen dan M.H.H. Ramakers.

14 November 1956 tembusan 2 lembar

824 Surat dari Ikatan Importir Bahan-bahan dan Alat-alat Pertanian dan Perikanan Indonesia (I.I.B.A.P.P.I.) kepada Menteri Kehakiman tentang permohonan perpanjangan *exit permit* Ong King Liong ke Eropa.

24 Oktober 1957 asli, salinan 5 lembar

## Pengendalian

Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Menteri Kehakiman tentang keterangan keberatan atas berdiamnya Nyonya Hohmann-Huster asal Jerman di Indonesia.

29 September 1950 asli 1 lembar

826 Berkas tentang pelanggaran-pelanggaran keimigrasian, pengeluaran orang asing dari Indonesia, penawanan orang asing, dan ekstradisi terhadap orang asing.

Nb. Lampiran tidak lengkap, sebagian Bahasa Belanda dan Perancis.

02 Oktober 1950-31 Oktober 1956 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

827 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Kepala Kantor Imigrasi pada Komisariat Agung Indonesia tentang pengawasan terhadap orang-orang asing yang menghadiri konferensi-konferensi di Indonesia.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

15 November 1950 tembusan, salinan 3 lembar

828 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Kepala Bagian Penerangan Luar Negeri tentang alamat orang-orang Amerika yang bekerja di Indonesia.

09 Januari 1951 tembusan 3 lembar

829 Surat dari P.G. Hoedt kepada Jawatan Pusat Imigrasi tentang penawaran pencatatan bangsa asing dengan "Filmstrip".

19 Juni 1951 tembusan 1 lembar

830 Memo dari Konsul Jenderal RI kepada Konsulat Jenderal Hongkong tentang tindakan untuk mencegah pencampuran tangan asing (Tionghoa) yang mengakibatkan kekacauan.

09 Juli 1951 salinan 2 lembar

831 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri tentang Kapal Panama "VIM" yang mendaratkan beberapa orang Tionghoa dengan cara tidak sah.

Nb. Lampiran tidak ada.

17 September-12 Desember 1951

pertinggal

3 lembar

832 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang penyampaian salinan surat Menteri Luar Negeri mengenai Kapal "Coorabie". Nb. Lampiran tidak ada.

31 Agustus 1951 pertinggal

1 lembar

833 Surat dari Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Kepala-Kepala Kepolisian di seluruh Indonesia tentang organisasi-organisasi pemuda komunis Tionghoa.

17 Januari 1952 tembusan, fotokopi 5 lembar

834 Surat dari Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Kepala Polisi Provinsi Sumatera Utara di Medan tentang Gabungan Perserikatan Buruh Tani Tionghoa Diseberang Lautan di Sumatera Utara (Su Tung Hoa Kiauw Kung Nung Lian Hiap Chung Hui).

02 April 1952 tembusan, salinan 3 lembar

835 Surat dari Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Wakil Jaksa Agung di Makassar tentang pembentukan suatu cabang di Makassar dari Barisan Demokrasi Baru di Tiongkok.

28 Mei 1952 salinan 7 lembar

836 Berkas tentang permohonan pembebasan dan jaminan untuk orangorang Tionghoa yang berada di Tahanan Imigrasi Tanjung-Perak Surabaya dikarenakan pelanggaran masuk ke Indonesia a.n. O Tjing Shoet, Wo Hang, dkk.

Nb. Sebagian rusak sedang.

18 Agustus-02 November 1953 asli, tembusan, salinan 1 sampul 837 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang surat dari Jawatan Imigrasi mengenai *activiteit* orangorang Amerika.

01-05 Desember 1953 asli, pertinggal, salinan 4 lembar

838 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang cara pengajuan usul pengenyahan orang asing.

15 Februari 1954 pertinggal 1 lembar

839 Surat pengantar dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Kehakiman tentang penyampaian daftar namanama pegawai-pegawai diplomatik dan kepala-kepala bagian kanselarai pada perwakilan-perwakilan RI di luar negeri.

04 September 1954 asli, salinan 1 sampul

840 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman, dll tentang penyampaian surat-surat dari Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Kepolisian Negara mengenai repatriasi orang-orang Jepang, untuk dibicarakan dalam Sidang

23 Desember 1954

asli, salinan

1 sampul

841 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian salinan surat dari Kepala Bagian Pendaftaran Orang Asing mengenai sistem pemeriksaan dalam Pendaftaran Orang Asing (P.O.A.) fase ke-II.

Nb. Rusak ringan.

11-17 Februari 1955 asli, salinan 4 lembar

842 Berkas tentang pengawasan orang asing terkait dengan Konferensi Afro-Asia.

Nb. Sebagian rusak ringan dan sebagian Bahasa Inggris.

12 Maret-22 April 1955 asli, salinan 843 Surat pengantar dari Sekretariat Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Sekitar Afro-Asia kepada Menteri Kehakiman tentang pengiriman salinan surat pengantar dan surat dari Kepala Bea & Cukai mengenai caranya menghadapi para tamu pada Konferensi A.A. oleh Jawatan Bea dan Cukai.

01 April 1955 asli, salinan 4 lembar

Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman kepada Jawatan Imigrasi tentang penyampaian surat dari Kepala Polisi Kabupaten Probolinggo tentang seorang bangsa asing bernama Ang Uwie Kun yang tidak memiliki dokumen imigrasi.

Nb. Lampiran tidak ada.

14 September 1955 pertinggal, konsep 2 lembar

Surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Pertahanan tentang pembelian barang import dari Hongkong untuk Angkatan Laut.

29 Oktober 1955 tembusan 2 lembar

846 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri tentang penyampaian daftar nama orang-orang Philipina yang berada di Asrama Imigrasi di Tanjung Priok.

Nb. Lampiran tidak ada.

September 1956 pertinggal 1 lembar

847 Surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian-Kementerian, dll tentang pengiriman surat Menteri Dalam Negeri mengenai penduduk Sangir dan Talaud yang menyeberang ke Philipina.

10 Oktober 1956 asli, salinan 6 lembar Pernyataan dari kebijakan imigrasi di masa depan (*Statements of Future Immigration Policy*).

Nb. Rusak ringan dan berbahasa Inggris.

TT

fotokopi 8 lembar

Kumpulan Undang-undang dan Putusan Menteri Kehakiman tentang pendaftaran orang asing dan kependudukan orang asing.

TT

konsep, fotokopi

1 sampul

# 5. Keperdataan

# a. Pencatatan Sipil

## Kelahiran dan Kematian

850 Surat-surat tentang permintaan perbaikan, pembuatan dan pengiriman akta kematian.

13 Agustus 1950-15 September 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

Surat-surat tentang permintaan, pembuatan, perbaikan dan pengiriman salinan/petikan akta kelahiran.

08 Februari 1951-02 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

### Perkawinan dan Perceraian

852 Surat-surat tentang permintaan surat kuasa, surat perjanjian dan akta perkawinan.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

21 November 1950-27 Oktober 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

853 Surat-surat tentang pendaftaran, permintaan dan pengiriman akta perceraian.

20 April 1951-31 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul 854 Surat-menyurat dari pegawai catatan sipil Jambi dan Menteri Kehakiman mengenai petunjuk terkait status perempuan Siam yang pernah kawin dengan orang Belanda di Siam dan bercerai di Indonesia.

06-24 Januari 1952 asli, pertinggal 2 lembar

855 Surat-menyurat antara Pegawai Catatan Sipil Kupang dengan Kementerian Kehakiman tentang permintaan penjelasan mengenai perkawinan orang-orang asing dalam waktu pendudukan.

10 Maret-29 Mei 1952 asli, pertinggal, konsep 6 lembar

Surat-surat tentang permohonan izin untuk menikah antara lain a.n. J.P.F. Vonk.

17 Maret-21 Agustus 1952 asli, pertinggal 1 sampul

857 Surat dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Jawa Tengah tentang pendapat mengenai aturan perkawinan campuran (antar bangsa).

27 Maret 1952 tembusan 1 lembar

858 Surat-menyurat antara Kepala Bahagian Roma Katholik Kementerian Agama RI dengan Kepala Bahagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman tentang hukum perkawinan warga negara baru.

06-16 Juni 1952 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

859 Surat-menyurat antara Menteri Agama dengan Menteri Kehakiman tentang permohonan pendapat untuk penyelesaian perkara perkawinan a.n. B. Sulimah yang tidak diakui oleh H. Zjuhri dari Kudus.

23 Juni-03 November 1952 asli, pertinggal, konsep 4 lembar 860 Surat-menyurat antara Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Kehakiman tentang pertanyaan dari Ambassade Perancis mengenai status perkawinan orang Indonesia Islam a.n. Samat dan B'Bero. Nb. Rusak sedang dan sebagian berbahasa Perancis.

04 Juli-12 Agustus 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 7 lembar

861 Surat dari Kepala Bagian Umum Kantor Pusat Perbendaharaan Yogyakarta kepada Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman tentang penyampaian daftar penyetoran uang biaya nikah Kota Besar Surakarta.

Nb. Lampiran tidak ada.

08 Oktober 1952 asli 1 lembar

862 Surat-menyurat antara Bupati Bangkalan dengan Kementerian Kehakiman tentang surat kawin bangsa asing (Tionghoa) dan "wettiging van natuurlijke kinderen".

13-22 Oktober 1952 asli, konsep 2 lembar

# Pengakuan Anak

863 Surat-menyurat antara Pegawai Catatan Sipil Medan dengan Kementerian Kehakiman tentang Keputusan *Landrechter* Medan No. 340/1949 mengenai permohonan memungkiri anak a.n. Hubertus Nicolaas.

Nb. Lampiran tidak ada.

14 Januari-02 Februari 1952 asli, konsep 2 lembar

864 Surat-menyurat antara Pegawai Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Ciamis dengan Kementerian Kehakiman tentang pengakuan anak oleh seorang Tionghoa dari perempuan gendak bangsa Indonesia.

24 Maret-07 April 1952 asli, pertinggal, konsep 5 lembar

865 Surat-menyurat antara Leonardus Ch. Sahelatua dengan Menteri Kehakiman tentang permohonan pengesahan anak angkat dan pemakaian nama keluarga bapak angkat.

Nb. Rusak ringan dan sebagian Bahasa Belanda.

30 Oktober-20 November 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 5 lembar

### Dokumentasi dan Distribusi

866 Surat-surat tentang permintaan, penyesuaian, dan pengiriman kartukartu perseorangan.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda, sebagian rusak sedang dan ringan.

04 Januari 1950-21 Juli 1952 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

867 Surat-surat tentang permintaan dan pengiriman kutipan/petikan akta catatan sipil (kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian).

Nb. Sebagian rusak sedang dan ringan.

16 Mei 1950-26 Juni 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

868 Surat-surat tentang permintaan pengiriman daftar-daftar catatan sipil dan buku peraturan-peraturan catatan sipil.

23 Juni 1951-19 September 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi, tembusan 1 sampul

869 Surat-menyurat dari Kementerian Kehakiman dan Menteri Luar Negeri tentang penolakan permintaan Kedutaan RI di London mengenai pengesahan tanda tangan akta.

02 November 1950-09 April 1951 asli, pertinggal, konsep 5 lembar Daftar laporan dari catatan sipil terhadap orang-orang golongan Eropa di Karesidenan Pati selama tahun 1950.

21 Mei 1951 asli 2 lembar

871 Surat dari Pegawai Catatan Sipil Wates kepada Kementerian Kehakiman tentang permohonan penjelasan mengenai pengisian petikan akta catatan sipil.

05 November 1951-10 Januari 1952 asli, konsep 2 lembar

Kumpulan telegram dari Bupati Madiun dan Wedana Toli-Toli tentang permohonan keterangan peraturan *burgerlijke stand* (catatan sipil) untuk bangsa Tionghoa peranakan yang menolak untuk menjadi WNI.

31 Desember 1951-31 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep 8 lembar

873 Surat-menyurat antara Kementerian Kehakiman dengan Bupati Wonogiri tentang laporan catatan sipil Wonogiri tahun 1951. Nb. Rusak ringan.

> 04 Januari-23 April 1952 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

874 Surat-menyurat (telegram) antara Residen Bengkulu dengan Kementerian Kehakiman tentang peraturan pencatatan sipil bagi orang asing yang telah menjadi WNI.

09 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep 4 lembar

Surat-surat tentang penyesuaian kartu perseorangan, surat kelahiran, dan surat perkawinan a.n. Johannes de Bruin, Willem Dezentje, dll Nb. Sebagian rusak sedang dan lampiran tidak lengkap.

31 Januari-21 Agustus 1952 asli, pertinggal, tembusan 1 sampul 876 Surat-menyurat antara Bupati Grobogan di Purwodadi dengan Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman tentang Bupati atau Walikota yang dapat dianggap sebagai pegawai catatan sipil untuk golongan Eropa dan Tionghoa.

81 Agustus-10 Oktober 1952 asli, konsep 3 lembar

877 Surat dari Wedono Karanganyar kepada Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman tentang pemeriksaan kembali terkait suratsurat yang dialamatkan untuk Pegawai Catatan Sipil Karanganyar.

01 Oktober 1952 asli 1 lembar

# b. Pengurusan Harta Peninggalan

### Wasiat

878 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris Hasan Qalbi di Padang mengenai surat wasiat perorangan.

25 Januari 1949-11 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

879 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris Djokomardejo di Cirebon mengenai surat wasiat perorangan.

05 Juni 1950-18 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

880 Berkas tentang permintaan keterangan kepada Balai Harta Peninggalan Makassar mengenai surat wasiat perorangan.

21 Juni-16 November 1950 asli, pertinggal, konsep 6 lembar

881 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada G.C. Rath di Lawang tentang petikan akta kematian J.H.Th. Rath.

20 Juli-25 September 1950 asli, pertinggal, konsep 6 lembar 882 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris A.W. Reijerse di Palembang tentang surat wasiat.

09 September-04 November 1950 asli, pertinggal 5 lembar

883 Berkas tentang permintaan keterangan surat wasiat dari pengacarapengacara J.H. Hogerzeil, J.Ph. Mullemeister, D. Van Eck, Tan Siong Sioie, dll di Semarang dan Surabaya.

> 11 September 1950-21 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

Berkas tentang permintaan keterangan kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta tentang pendaftaran surat wasiat perorangan.

11 September-15 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

Berkas tentang permintaan keterangan surat wasiat dari Notaris-Notaris di Nederland mengenai wasiat perorangan.

11 September 1950-04 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris H.D. van Werkum di Surabaya mengenai surat wasiat.

11 September-11 Desember 1950 pertinggal, konsep 1 sampul

Surat dari Kementerian Kehakiman kepada wakil Notaris Tan A Sioe di Semarang tentang pendaftaran surat wasiat dari J.E. Bousche, Ang Kiem Go, M. Brouwer, Ong Thiam Som, dll.

11 September 1950-19 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris J.L Dalits di Medan mengenai surat wasiat perorangan.
 Nb. Rusak ringan.

16 September-04 Oktober 1950

asli, pertinggal 3 lembar

889 Berkas tentang permintaan keterangan pendaftaran surat wasiat dari perseorangan di Bandung, Nederland.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan rusak ringan.

18 September 1950-14 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

890 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris H. Ribbers di Malang tentang surat wasiat.

Nb. Rusak sedang.

18 September 1950-29 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

Berkas tentang permintaan keterangan pendaftaran surat wasiat dari perseorangan di Cirebon, Cimahi, Surabaya, Malang, Manado, Cimahi, Medan, dll.

27 September 1950-30 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

892 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada kantor Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Komisaris Agung Kerajaan Belanda di Semarang, NV Jamy di Bandung, dll tentang surat wasiat.

Nb. Rusak ringan.

27 September 1950-21 Agustus 1952 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

893 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris Th. R.W. Vermeulen di Surabaya mengenai surat wasiat perorangan. Nb. Arsip rusak sedang.

28 September 1950-01 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

894 Berkas tentang permintaan keterangan pendaftaran surat wasiat dari Balai Harta Peninggalan Medan.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

28 September 1950-17 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

895 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Notaris Soetardjo di Purwokerto tentang surat wasiat Ny. Ong Tambak Nio, Liem Tiong Gwan.

Nb. Rusak ringan.

23 Oktober 1950-07 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep 5 lembar

896 Berkas tentang permintaan keterangan surat wasiat dari Balai Harta Peninggalan Semarang.

Nb. Sebagian rusak sedang.

25 Oktober 1950-23 November 1950 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

897 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris Liem Sik Tjo di Surabaya mengenai surat wasiat perorangan yang ditanganinya tahun 1950.

13-28 November 1950 asli, pertinggal, konsep 4 lembar

898 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada Notaris J.W. Crefeld di Bandung tentang surat wasiat dari T.E.J. van den Bos.

15 November-13 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

899 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Notaris Tjan Gwan Kie di Jember tentang surat wasiat dari A.L.M. van Blommestein, Tjan Lioe Kien, Njoo Jan Nio (Ny.).

16 November 1950-17 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep 9 lembar 900 Surat-surat dari Menteri Kementerian Kehakiman RI kepada *Ministerie* van Justitie Centraal Testamenten Register dan Komisaris Agung di 's Gravenhage tentang surat wasiat H. Roeske dan E.A. Rothschild. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

18 November 1950-22 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

901 Berkas tentang permintaan keterangan dari *de Javasche Bank* di Batavia, Bandung, dan Yogyakarta mengenai surat wasiat perseorangan.

18 November 1950-17 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

902 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada *Cultuur Handel en Industrie Bank* di Surabaya, *Escomptobank NV* tentang keterangan surat wasiat.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan rusak sedang.

20 November-13 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris E.L. Sarkies di Surabaya mengenai surat wasiat.
 Nb. Rusak ringan.

> 20 November-13 Desember 1950 salinan, pertinggal, konsep 3 lembar

904 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris Tan Eng Kiam di Bandung mengenai surat wasiat.

22 November 1950-21 Desember 1951 asli, pertinggal., konsep 1 sampul

905 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris R. van Vendeloo di Surabaya mengenai surat wasiat perorangan.

28 November 1950-12 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul 906 Berkas tentang permintaan keterangan pendaftaran surat wasiat dari perseorangan S. Achmadie di Batavia.

18 Desember 1950-11 Januari 1951 asli, pertinggal, konsep 9 lembar

907 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada Balai Harta Peninggalan di Kediri tentang surat wasiat dari Teng Kong Hian,Tan Hwat Sioe, Tjan Som Bo, dkk.

> 23 November-20 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep 9 lembar

908 Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris Sie Khwan Ho di Surabaya mengenai surat wasiat perorangan.

07 Desember 1951-30 November 1953 asli, pertinggal, konsep 8 lembar

909 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Notaris R.M. Soeprapto di Semarang tentang daftar wasiat Ong Sing Bo.

01 November-01 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

910 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada Notaris S. Bartstra di Bandung tentang daftar wasiat Oeng Beng Seng, Nicolas Charles Pattipeiluku, Jacobus Lambertus Kingma, dll.

> 01 November-23 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

911 Surat-menyurat dari Kementerian Kehakiman kepada Notaris R.M. Soerojo di Batavia tentang surat wasiat dari Liem Siauw Hien dan Pouw Peng Nio.

912

16-20 November 1953 asli

2 lembar

8 lembar

Berkas tentang permintaan keterangan dari Notaris R. Sujadi di

Magelang tentang surat wasiat.

23 November-03 Desember 1953
asli, pertinggal, konsep

913 Berkas tentang permintaan keterangan surat wasiat dari Balai Harta Peninggalan Surabaya.

16 November 1950-01 Desember 1953 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

### Warisan

914 Surat dari Said bin Awad bin Salim Abdat di Jakarta kepada Kementerian Kehakiman RI tentang permintaan bantuan permasalahan warisan almarhum Salim bin Awwab bin Abdat.

Nb. Rusak ringan.

07 September 1950 asli 3 lembar

915 Surat-menyurat dari Kementerian Kehakiman kepada Notaris A.J. Soentpiet di Ternate tentang yang memberikan anugerah akta pemberian adalah Ny. Tan Goe Djie Nio.

Nb. Arsip rusak ringan.

10-19 Oktober 1950 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

916 Surat-surat tentang pengambilalihan hak atas tanah-tanah peninggalan orang-orang Belanda, oleh Negara di Jalan Cikini 77, Jalan Duku 9, Jalan Taman Cut Mutiah 6, Jalan Imam Bonjol 10, Jalan Raden Saleh 15 Jakarta.

21 Oktober-06 Desember 1950 salinan 7 lembar

917 Berkas tentang pelaksanan peraturan "herstel rechtsverkeer" (pemulihan hak) berkaitan dengan hipotek persil dari NV Bouw-en Handel Maatschappij Low Guan Bie di Kutaraja.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

24 Oktober-21 November 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan 10 lembar

918 Berkas mengenai pembukuan saham dari Kantor Asuransi O.W.J. Schlenker untuk Indonesia kepada Panitia Penyelesaian Urusan Pemilihan Hak di Jakarta.

Nb. Bahasa Belanda.

01 Januari 1951-31 Desember 1952 asli 1 sampul

919 Surat-surat tentang permohonan pengumuman ahli waris janda Cornelia Henriette Antoinette Cornetraedt dalam Berita Negara.

> 14 Februari-20 Maret 1951 asli, pertinggal, konsep 9 lembar

920 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri tentang penyampaian surat dari Ketua Pengadilan Negeri wilayah Hulu-Sungai di Kandangan mengenai keterangan-keterangan tentang waris-waris dari Sajid Moehdar Bin Moehamad bin Akil bin Salim dan Sharifah Fatmah binti Agil bin Moehamad bin Agil bin Salim.

> 20 Juni-19 Juli 1951 asli, pertinggal 3 lembar

921 Berkas tentang penyelesaian hutang Hotel Dharma Nirmala NV di

Nb. Sebagian Bahasa Belanda, rusak ringan dan disertai kunci brankas. 27 Desember 1951-27 April 1959 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

Surat dari F.G. Witteveen kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri

922 Jakarta tentang permohonan pertimbangan mengenai penempatan rumah peninggalan istrinya di jalan Madura. 21 Februari 1952

tembusan 6 lembar

923 Berkas tentang permohonan seorang keturunan Arab a.n. S. Abud bin Umar Al Gidjah Nahdi, untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum bibinya yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta.

> 17 September-28 Desember 1953 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

924 Berkas tentang laporan Dr. Teng Sio Tjhan NV, kepada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak mengenai penjualan objek-objek berupa persil dan bangunan yang tidak diketahui alamat pemiliknya dan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan, No.1-12 (disertai pengantar No. 12).

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan rusak ringan.

21 Februari-13 Mei 1958 asli, salinan 1 sampul

925 Berkas tentang laporan Dr. Teng Sio Tjhan NV, kepada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak mengenai penjualan objek-objek berupa persil dan bangunan yang tidak diketahui alamat pemiliknya dan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan, No.13-19 (disertai nota agar disetor ke Thesauri Negara).

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan rusak ringan.

16 Oktober 1957-05 Juni 1958 asli, salinan 1 sampul

926 Pengumuman dari Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang daftar persil-persil kepunyaan pemilik-pemilik yang tidak diketahui tempat tinggalnya (*afwezigen*) atau yang tidak dikenal (*onbekenden*) di Karesidenan Malang dan Bojonegoro.

31 Desember 1959 fotokopi 2 lembar

927 Berkas tentang penyerahan persil, obligasi, dll, daerah Yogyakarta, Purwokerto, dll, melalui Balai Harta Peninggalan Semarang, Surabaya, dan Jakarta.

Nb. Sebagian rusak sedang dan sebagian berbahasa Belanda.

18 Juni 1960-03 Januari 1961 asli, pertinggal, salinan 1 sampul

### Perwalian Anak

928 Surat-surat dari Kementerian Kehakiman kepada Hakim Pengadilan Negeri di Jakarta tentang perwalian anak-anak Ketting Olivier.

23 April-27 November 1951 asli, pertinggal, konsep 5 lembar 929 Surat proses verbal pengangkatan anak/adopsi anak bernama Abuhanifah sebagai anak dari A. Suleiman. Nb. Arsip rusak ringan.

> 27 September 1950 asli 2 lembar

930 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Dewan Perwalian di Jakarta tentang alamat F.G Ten Cate.

03 Januari-15 Februari 1952 asli 3 lembar

931 Surat-surat tentang permohonan dari Notaris C.D. Jalink di 's Gravenhage mengenai kuasa untuk harta peninggalan alm. Johan Theodoor Drop untuk anaknya Reinhard Diederik Govert Drop dengan ibu wali a.n. Ny. Anna E.J. Drop-van der Klits.

Nb. Sebagian rusak ringan dan sebagian berbahasa Belanda.

02-17 Juli 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 5 lembar

932 Surat-menyurat antara Menteri Kehakiman dengan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di 's Gravenhage, Menteri Luar Negeri dan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta tentang permohonan surat Keputusan *Raad van Justitie* (dahulu) di Jakarta mengenai keangkatan Ir. A.C. van de Bijlaardt sebagai perwalian Nona Hermine Margerete Wadeson. Nb. Sebagian rusak sedang.

15 September-16 November 1955 asli, pertinggal 8 lembar

### c. Pertanahan

## Pengakuan Hak

933 Surat-menyurat antara Said Mohd. (Tengku Djang) b. Sagoff di Singapore dengan Menteri Kehakiman tentang permintaan pengakuan sebagai pemilik Pulau Rupat dan pendirian berbagai perusahaan.

27 September-07 Oktober 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan 7 lembar 934 Surat tentang penunjukan A. Th. Loing sebagai pengganti notaris Tan Eng Kiam untuk pembuatan akta-akta jual beli mengenai persil-persil hak eigendom, Jalan Dago No. 73 Bandung.

16-28 Juli 1951 konsep, salinan 4 lembar

935 Surat-surat tentang hak Victor Berge atas Pulau Batu-Kora. Nb. Sebagian Bahasa Inggris.

> 03 Agustus-28 Oktober 1953 asli, pertinggal, konsep, salinan 5 lembar

## Pemeliharaan Hak

936 Berkas tentang pembayaran pajak dan asuransi serta jual beli oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak untuk persil di Jalan Segara 11 Jakarta.

Nb. Sebagian rusak sedang dan berbahasa Belanda.

18 Mei 1949-10 Maret 1960 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

937 Surat dari Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah kepada Anggota Panitia Penyelenggara Negara Kesatuan "Bagian Kehakiman" di Medan tentang instruksi bagi Jawatan Pendaftaran Tanah. Nb. Lampiran tidak ada.

> 29 Agustus 1950 tembusan 1 lembar

938 Surat-surat tentang permintaan dari Asia Datawu untuk penyelesaian masalah tanah sawah pusaka miliknya di Gorontalo.

17-28 Oktober 1950 asli, pertinggal, konsep 9 lembar

939 Surat dari Kaliamas Bajoangin kepada Menteri Kehakiman dll tentang permohonan bantuan untuk permasalahan tanah miliknya yang akan diambil alih oleh Wedana Bilah, Rantau Prapat.

20 November 1950 asli, salinan 5 lembar

940 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman kepada Mahkamah Agung, dll tentang penyampaian Instruksi No. IV dari Kementerian Pertanian mengenai pembangunan wilayah hutan di Jawa.

> 04 Desember 1951 pertinggal, konsep, salinan 6 lembar

941 Daftar rekapitulasi persil-persil di daerah Magelang, Purwokerto, dll. Nb. Bahasa Belanda.

> 25 Agustus-06 Desember 1952 asli 1 sampul

942 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung tentang permintaan kabar mengenai persoalan pengaduan-pengaduan dari penduduk tentang tanah-tanahnya yang dipakai oleh NV B.P.M. Tanjung.

03 September 1953 pertinggal 1 lembar

943 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung tentang penyampaian surat Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli mengenai perkara mengerjakan tanah *Landbouw-concessie* Tanjung Merawa tanpa hak.

Nb. Lampiran tidak ada.

21 September 1953 pertinggal 1 lembar

944 Surat-menyurat antara Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Jakarta dengan Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang keterangan pendaftaran tanah dan surut ukur untuk tanah eigendom *verponding* No. 6466 di Manggadua Jakarta a.n. Emilie Macaré, dll. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

25 Mei 1956-09 Juni 1958

asli, pertinggal, konsep 1 sampul

945 Surat dari Ketua DPR kepada Menteri Kehakiman tentang keterangan mengenai izin Djapulung Saragih untuk mendirikan bangunan rumah di Lubukpakam.

02 Juli 1957 salinan, tembusan 2 lembar

## Pemindahan Hak

946 Surat-surat dari *NV Assurantie Maatschappij de Nederlanden van* 1845 kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian surat-surat kepada Menteri Sosial mengenai penyitaan dan kepemilikan persil Medan Merdeka Barat 10 Jakarta.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

07-09 Maret 1950 asli, salinan, tembusan

1 sampul

947 Surat dari Husin bin Naser Albakri kepada Kantor Pendaftaran Tanah tentang penjualan persil di Noordwijk No. 23 dan Pecenongan No. 5-7-7a *Verponding* 9615-9618 yang tidak wajar.

11 November 1950 tembusan 1 lembar

948 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kediri kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian surat dari Mr. A. Geurtsen di Rotterdam dan jawaban dari Pengadilan Negeri Kediri tentang permintaan salinan akta penjualan tanah di Karesidenan Kediri sehubungan dengan surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

04 Desember 1950 asli, salinan 3 lembar 949 Memorandum dari Wirjono Koesoemo kepada Dr. Hazairin tentang penyimpanan surat-surat mengenai pengoperan nama atas pembangunan, yang telah dijual oleh Sun Ui kepada Wong Djun Siong, disertai lampiran.

Nb. Arsip rusak ringan.

27 Desember 1950 tembusan 1 sampul

950 Surat Keputusan Kepala Bagian Urusan Perumahan Pusat dari Kementerian Sosial No. UPP 12-1-17 tentang menarik kembali pemilikan sementara atas persil di Jalan Jambu 9 Paviliun Jakarta *Verponding* No. 13831 Hak Eigendom dan mengembalikannya kepada Johannes Adrianus Jacob Gerardus Willem Delmaar.

02 Maret 1951 salinan 1 lembar

951 Surat-surat tentang penolakan permohonan pemindahan hak eigendom a.n. J.D. Arendsen de Wolff, kepala pengurus bioskop-bioskop di Bandung.

02-12 Mei 1952 salinan 4 lembar

952 Surat dari Pimpinan Komite Rakyat Cabang Kebayoran kepada Menteri Kehakiman, dll tentang tuntutan ganti rugi uang pembayaran tanah. Nb. Tidak lengkap.

02 November 1953 tembusan 5 lembar

953 Berkas tentang permasalahan tanah eigendom No. 6466 di Manggadua Kober Jakarta seluas + 7790 M² milik Macaré dan Schmidt yang disewa oleh Achmad bin Amir Baloewel yang kemudian diduduki oleh rakyat Manggadua.

Nb. Sebagian rusak sedang dan berbahasa Belanda.

25 November 1953-09 Desember 1957

asli, pertinggal, konsep, tembusan, salinan 1 sampul

954 Pemberian Izin oleh Kepala Kejaksaan di Jakarta terhadap surat dari Tan Tek Liang, kuasa dari Perseroan Terbatas "Perusahaan Dagang Robinson" tentang permohonan izin pemindahan hak atas nama perseroan terhadap sebidang tanah hak eigendom di Pasar Baru Jakarta seluas 136 M² untuk digunakan sebagai rumah toko.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan rusak sedang.

29 Mei-13 Agustus 1954 tembusan 2 lembar

955 Surat-menyurat antara Hermanus G. Hammacher, Direktur *NV Javasche Administratie Mij.* dengan Kementerian Kehakiman tentang pemindahan hak tanah hak eigendom di Jalan Dipati Ukur Bandung seluas 833 M² a.n. Perhimpunan Ilmu Alam Indonesia.

Nb. Rusak sedang.

08 Juli-14 September 1955 pertinggal, konsep, salinan, tembusan 5 lembar

956 Surat kontrak jual/beli persil-persil Jambi antara Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak dengan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Jambi.

> 04 November 1955 konsep, salinan 5 lembar

957 Surat-menyurat antara Bagian P.T.K. dengan Bagian Keuangan pada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang uang sewa persil a.n. Macaré dan Schmidt.

> 18 April-23 Mei 1956 pertinggal, konsep 7 lembar

958 Berkas tentang penaksiran, penjualan dan pembayaran upah taksir untuk tanah Eigendom *verponding* No. 6466 di Manggadua Jakarta seluas + 7790 M² milik Macaré dan Schmidt.

18 Juni 1956-08 Februari 1960 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul 959 Surat dari Kepala Sekolah Kerajinan Negeri Kutoarjo kepada Kepala Bagian Bangunan Departemen PP dan K di Jakarta tentang pembayaran tanah untuk Sekolah Kerajinan Negeri Kutoarjo sebanyak

09 Januari 1961
tembusan
1 lembar

### d. Kenotariatan

# Pengangkatan dan Penempatan Notaris

960 Berkas tentang lamaran menjadi notaris di Semarang dan Madiun kepada Kementerian Kehakiman.

11 September 1950-24 Februari 1951 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

961 Berkas tentang pengembalian ujian notaris.

21 September-18 November 1950 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

962 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Notaris Sie Khwan Djioe tentang pemberitaan panitia ujian notaris tahun 1950 di Batavia.

01-Nov-50 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

963 Surat dari Notaris R.M. Wiranto di Yogyakarta kepada Kementerian Kehakiman mengenai permohonan dispensasi untuk dapat membuka praktik notaris di Kedu dan Karesidenan Semarang dengan bertempat di Yogyakarta.

17 Januari 1951 asli 2 lembar

964 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Semua Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya, Semua Notaris tentang Daftar Baru Notaris, Wakil Notaris dan Notaris merangkap.

09 Desember 1954 pertinggal 3 lembar

Izin Istirahat

965 Berkas tentang ijin cuti notaris.Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

12 September 1950-30 Mei 1951 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

### Legalisasi

966 Berkas tentang legalisasi tanda tangan, paraf dan cap notaris.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris, sebagian rusak sedang

28 September 1950-12 Desember 1952 asli, pertinggal, salinan, konsep 1 sampul

967 Berkas tentang aturan notaris: a.l jabatan notaris, bahasa akta-akta notaris, administrasi notaris.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

09 Oktober-20 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

## Pengawasan Notaris

968 Surat-menyurat dari Kementerian Kehakiman kepada advokat J.L.A. Visser di Bandung tentang keberadaan akta-akta Notaris Broonsgeest mengenai adopsi van Lie Seng Liong oleh Lie Kiem Kiok dan Tan Goan Nio.

17-27 November 1950 asli, pertinggal, konsep 3 lembar

969 Berkas tentang pemeriksaan Notaris van Altena yang dianggap melanggar ketentuan hukum.

04 April-02 Mei 1951 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

970 Surat dari K. Mantiri dan A. Ratulangi kepada Kementerian Kehakiman tentang pengaduan perbuatan Notaris G.J.F.P Kairupan di Manado.

17-25 Juni 1951 asli, konsep 3 lembar

# e. Pengakuan Badan Hukum

Organisasi Kemasyarakatan

971 Anggaran Dasar (Singkat) dari Ikatan Boeroeh Perkeboenan (IBP) dan Pengumuman No. 1 Keputusan Rapat Pengurus Besar GASBI.

November 1948 fotokopi 2 lembar

972 Surat-menyurat antara *Acting* Kepala Daerah Maluku Utara yang berkedudukan di Ternate dengan Menteri Kehakiman tentang permohononan pengesahan perkumpulan *Pantecostal Church of God of America* di Indonesia di Ternate.

23 Maret 1950-11 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

973 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Residen di Malang tentang pendirian dan anggaran dasar dari Perkumpulan Rumah Sekolah Tionghwa Lawang yang berkedudukan di Lawang. Nb. Lampiran tidak ada.

> 16 Agustus 1950 pertinggal, konsep 3 lembar

974 Surat-menyurat antara Pengurus Pusat Perhimpunan Penerbangan Indonesia di Jakarta dengan Menteri kehakiman tentang permohonan pengesahan anggaran dasar Perhimpunan Penerbangan Indonesia (Perpeni).

01 September-05 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan 7 lembar

975 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Bendahara Perkumpulan "School met de Bijbel" tentang syarat memperpanjang status badan hukum.

06 September 1950 pertinggal 1 lembar

976 Surat dari Menteri kehakiman kepada Residen di Semarang tentang anggaran dasar Perkumpulan Pusat Beras Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang.

Nb. Lampiran tidak ada.

07 September 1950 pertinggal, konsep

977 Tambahan Berita Negara tanggal 21 September 1950 No. 49 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang dahulu bernama *Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereniging* dan berubah menjadi *Sterrenkundige Vereniging voor Indonesie* yang berkedudukan di Bandung.

21 September 1950 fotokopi 1 lembar

978 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perkumpulan *St. Borromeus Vereeniging* yang berkedudukan di Bandung. Nb. Sebagian rusak sedang.

30 Oktober-28 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

979 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan *Hua Chiao Ching Nien Lien Ho Hui (Ching Lien)* yang berkedudukan di Telukbetung.

29 Desember 1950-31 Juli 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, tembusan 1 sampul

980 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan *Shin Sheng She* yang berkedudukan di Yogyakarta.

Nb. Sebagian rusak ringan.

12 Januari-14 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

981 Berkas tentang permohonan pengesahan anggaran dasar perkumpulan Gabungan Ahli Gigi Tionghoa Perantauan Sumatera yang berkedudukan di Medan.

Nb. Sebagian rusak berat.

03 Maret-23 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

982 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan Sourabaya Society of Teachers of Dancing (S.S.T.D.) yang berkedudukan di Surabaya.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

25 April 1951-12 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

983 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan Persatuan Pengangkutan Rakyat Indonesia yang berkedudukan di Medan.

Nb. Sebagian rusak sedang.

01 Juni-31 Oktober 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

984 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan Zending Protestant Chung Hua Ja She Kauw Fie yang berkedudukan di Jakarta.

> 16 Juni-21 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

985 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan Serikat Pedagang Beras yang berkedudukan di Bandung.

27 Agustus 1951-27 Mei 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

986 Berkas tentang pengumuman perubahan anggaran dasar dari perkumpulan *Watersportvereniging* "Brantas".

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

06 Oktober 1951-11 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep 9 lembar

987 Surat dari Mr. N. van Dijk kepada J.J. van der Linden di Surabaya tentang perkumpulan *Surabayasche Planten-en Dieren-tuin* di Surabaya.

Nb. Bahasa Belanda.

23 Oktober 1951 pertinggal, konsep 2 lembar 988 Surat dari Menteri kehakiman kepada Tuan Abednego di Kementerian Agama di Jakarta tentang penyampaian surat dan sejilid peraturan gereja dari Majelis *Tiong Hwa Kie Tok Kauw* mengenai pengakuan Gereja Kristen Tionghoa di Temanggung.

Nb. Lampiran tidak lengkap

22 November 1951 pertinggal, konsep, fotokopi 1 sampul

989 Surat-menyurat antara Pengacara Khouw Hoey Tin di Jakarta dengan Menteri kehakiman tentang pengesahan perubahan anggaran dasar *Chung Hua Tsing Nien Hui (Chung Hua)* yang berkedudukan di Jakarta

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

04 Januari-19 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 6 lembar

990 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (P.D.G.I.) yang berkedudukan di Bandung.

14 Januari-11 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

991 Surat dari J. Andre Jansma (Pengacara) kepada Kementerian Kehakiman tentang permintaan kutipan putusan mengenai perkumpulan *Bond van Melkveehouders* Surabaya.

Nb. Lampiran tidak ada.

28 Januari 1952 asli 1 lembar

992 Berkas tentang permohonan pengakuan sebagai badan hukum dari Badan Baitul Maal Banyuwangi di Banyuwangi.

07 Februari-06 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 10 lembar 993 Surat-menyurat antara Notaris P.S. Mr. Moeljadi Dd. di Banjarmasin dengan Menteri kehakiman tentang perkumpulan *Tionghwa Hwee Kwan* yang berkedudukan di Banjarmasin.

12-23 Februari 1952 asli, pertinggal, salinan 4 lembar

994 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dari perkumpulan *Koloniale Golfclub* Palembang yang berkedudukan di Palembang.

26 Februari-18 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 8 lembar

995 Surat dari Menteri kehakiman kepada Menteri Agama RI tentang penyampaian surat permohonan pengurus "*Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee*" di Gorontalo.

Nb. Lampiran tidak ada.

29 Februari 1952 pertinggal, konsep 4 lembar

996 Surat-menyurat antara M. Ali Rasjidi, Ketua Pengurus Besar "KAMI" di Jakarta dengan Menteri kehakiman tentang permohonan pengesahan "KAMI" (Kepanduan Angkatan Muda Islam) yang berkedudukan di Jakarta sebagai badan hukum.

Nb. Rusak ringan.

22-29 maret 1952 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 6 lembar

997 Surat-menyurat antara pengurus Chung Hua Tsung Hui di Kudus dengan Kementerian Kehakiman tentang permintaan kopi dari anggaran dasar *Tho Tee Kong Bio* yang berkedudukan di Kudus.

27 Juni-11 Juli 1953 asli, pertinggal, konsep 4 lembar

998 Surat dari Sentral Kontak Biro Usaha-usaha Pejuang Kemerdekaan Makassar kepada Menteri Kehakiman tentang susunan pengurus dan stryt program Sentral Kontak Biro Usaha-usaha Pejuang Kemerdekaan.

08 Mei 1955

Asli

999 Surat-Surat Keputusan Kepala Jawatan Hubungan Perburuhan tentang pendaftaran Serikat Buruh Perusahaan Kaju/Bangunan (S.B.P.K.B.) di Surabaya, Serikat Buruh Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (S.B.D.P.P.K.) di Yogyakarta, dan Serikat Buruh Listrik & Gas Indonesia (S.B.L.G.I.) di Yogyakarta.

09 September 1955 salinan 3 lembar

1000 Berkas tentang pengesahan anggaran dasar dari Perkumpulan Budi Kemuliaan yang berkedudukan di Jakarta.

09 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1001 Surat dari Kepala Bagian Badan-Badan Hukum Kementerian Kehakiman kepada pengurus *Pakistan Welfare Association* di Jakarta tentang pemberitahuan tata cara permohonan pengakuan sebagai badan hukum.

03 Desember 1955 pertinggal, konsep 3 lembar

1002 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden, Wakil Presiden, dll tentang usul anggaran dasar anggaran rumah tangga *Internasional Criminal Police Organization* tanggal 27 Oktober 1956.
Nb. Rusak ringan

27 Oktober 1956 fotokopi 1 sampul

## Perusahaan

Berkas tentang perubahan anggaran dasar NV Papierfabriek Padalarang yang berkedudukan di Padalarang.
 Nb. Sebagian rusak sedang dan Bahasa Belanda.

11 Oktober 1946-05 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi, tembusan 1 sampul

1004 Surat-surat mengenai permohonan pendaftaran dan pendirian nama *Indonesis Maatschappy op Aandelen* (I.M.A.) "Sudara" dan I.M.A. Pamah Segedang yang berkedudukan di Mardingding.

17 Februari 1948-15 Maret 1952 asli, salinan 1 sampul

1005 Berkas tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Nidya* yang berkedudukan di Cianjur.
Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

16 April 1948-15 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1006 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Thong Sing* yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

22 Januari 1949-05 Desember 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1007 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Cultuur en Handel Maatschappij Tjihuni yang sebelumnya berkedudukan di Semarang dan kemudian pindah ke Jakarta.

> 24 Januari 1949-25 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1008 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Lie Pie Houw* yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

01 April 1949-04 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1009 Surat permintaan keterangan dari Ny. Bond penduduk Australia tentang riwayat badan hukum *Trust Estate* yang didirikan di Makassar.

25 Mei 1949-07 November 1950 Asli, pertinggal, konsep 1 sampul

1010 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar *NV Textielfabriek* Sinar Mas yang berkedudukan di Jakarta.
Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

08 Juli 1949-25 Oktober 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1011 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Oliefabriek* Ciamis yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian rusak sedang dan sebagian berbahasa Belanda.

09 Desember 1949-29 Desember 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1012 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *W.A. Robertson & Co. NV* yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

13 Maret-19 Desember 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1013 Berkas tentang permohonan pengesahan anggaran dasar untuk *NV Massabouw* yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian rusak ringan.

23 Maret-07 November 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1014 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *Autedienst en Transportonderneming Bintang* yang berkedudukan di Tegal.

Nb. Sebagian rusak sedang dan sebagian berbahasa Belanda.

30 Maret 1950-25 Oktober 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan

1015 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Gapura (NV Gapura) yang berkedudukan di Sumenep.

04 Mei 1950-01 April 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1016 Berkas tentang perpanjangan waktu untuk mengeluarkan sero-sero yang belum diambil dari perseroan terbatas R.K.O. Radio Films NV yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

12 Mei-26 September 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1017 Berkas tentang perpanjangan waktu untuk mengeluarkan sero-sero yang belum diambil dari perseroan terbatas *NV Cultuur Maatschappij Bajoelor* yang berkedudukan di Banyuwangi dan *NV O.I. Cultuur en Handelsco* yang berkedudukan di Blitar.

05 Juni 1950-26 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1018 Surat-surat mengenai pendirian persekutuan sero Mustika NV, *NV Eng Choen* dan Perhimpunan *Hwa Lien* berkedudukan di Telukbetung.

06 Juni 1950-07 Januari 1952 pertinggal, konsep 1 sampul

1019 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas *NV Industrie en Handel Maatschappij Hap Goan* yang berkedudukan di Jakarta.

08 Juni-16 November 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 6 lembar

1020 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Sumatera *Rubber Coy Ltd.* yang berkedudukan di Jakarta.

16 Juni-20 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1021 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Architecten, Ingenieurs en Handelsbureau "Hoan Sie"* yang berkedudukan di Bandung.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

16 Juni-23 November 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1022 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas *NV Hevea Latex and Rubber Works* yang berkedudukan di Cirebon.

19 Juni-12 September 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1023 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Penerbitan dan Percetakan "Nusantara" yang berkedudukan di Cirebon. Nb. Lampiran tidak lengkap.

> 20 Juni-30 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 9 lembar

1024 Berkas tentang permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV International Trading Company Limited (NV Intraco Ltd.)* yang berkedudukan di Surakarta.

22 Juni 1950-29 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep 8 lembar

1025 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Persekutuan Dagang (NV) *Brawidjaja Trading Company* yang berkedudukan di Jakarta.

25 Juni-08 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan 7 lembar

1026 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Paberik Barang-barang Logam dan Porcelein Kar Surabaya yang berkedudukan di Surabaya.

01 Juli-12 September 1950

asli, konsep, salinan, fotokopi 6 lembar

1027 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Handelmaatschappij Liauw Njie Hap yang berkedudukan di Jakarta. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

> 06 Juli-09 Oktober 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1028 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *Jacobson van den Berg & Co NV* yang berkedudukan di Jakarta.
Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

10 Juli-11 September 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1029 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Het Indische Veem yang berkedudukan di Tanjung Priok. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

> 12 Juli-27 September 1950 asli, konsep, fotokopi 8 lembar

1030 Berkas tentang pengesahan akta pedirian perseroan terbatas Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Nam Thay" (*Handel Maatschappij "Nam Thay" NV*) yang berkedudukan di Semarang.

> 12 Juli-09 Oktober 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1031 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Sumber Bahagia yang berkedudukan di Surabaya.

25 Juli 1950-10 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 10 lembar

1032 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Apotheek Widjaja yang berkedudukan di Surakarta.

27 Juli 1950-08 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1033 Berkas tentang pengesahan anggaran dasar Indonesian *Agricultural Technical and Trading Company Pedatti* yang berkedudukan di Manado.

14-31 Agustus 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1034 Berkas tentang permohonan pengesahan anggaran dasar persekutuan sero Pedoman yang berkedudukan di Yogyakarta.

14 Agustus-12 November 1950 asli, pertinggal, konsep 6 lembar

1035 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *Oud* (*Java*) NV yang berkedudukan di Surabaya.

Nb. Lampiran tidak lengkap, sebagian rusak sedang dan Bahasa Belanda.

14 Agustus-06 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1036 Berkas tentang permohonan pengesahan anggaran dasar *NV The Celebes Overseas Trading Company (NV Celtraco Ltd.)* yang berkedudukan di Surabaya.

16 Agustus-18 September 1950 asli, pertinggal, konsep 5 lembar

1037 Surat dari Direktur NV RIPPI Pusat kepada Menteri Kehakiman tentang pemberitahuan perubahan nama dan alamat Rukun Ichtiar Perdagangan dan Pelajaran Indonesia.

27 Agustus-01 November 1950 asli 2 lembar

1038 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Textile Industrie Kian Seng and Company Limited yang berkedudukan di Bandung.

> 29 Agustus 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi

1039 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil "Liong Gwan" yang berkedudukan di Cirebon.

> 30 Agustus-30 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1040 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas Persekutuan Andil Maskapai Dagang *Mamlukat & Company* yang berkedudukan di Jakarta.

31 Agustus 1950-22 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1041 Tambahan Berita Negara RI tanggal 1 September 1950 No. 284 tentang pendirian perseroan terbatas NV Percetakan Nasional (NV The National Press Ltd.) yang berkedudukan di Jakarta.

> 01 September 1950 fotokopi 2 lembar

1042 Surat edaran Kementerian Kehakiman kepada notaris-notaris di Indonesia tentang pengurusan permohonan pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas.

01 Oktober 1950 asli, konsep 9 lembar

Berkas tentang perubahan tempat kedudukan P.D. & Industrie M.A.I."Hemat" dari Barabai ke Banjarmasin.Nb. Rusak ringan.

25 Oktober 1950-24 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi, tembusan 1 sampul

1044 Surat-menyurat antara H. Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan dengan Menteri kehakiman tentang permohonan salinan anggaran dasar perseroan terbatas NV Hotel My Rietema yang berkedudukan di Sibolga.

07 November-01 Desember 1950 asli, pertinggal, konsep

4 lembar

1045 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Dagang *Hoo Kwan Tjhiang* yang berkedudukan di Surabaya.

16 November 1950-10 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1046 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Trio (NV Trio) yang berkedudukan di Samarinda.

> 18 November 1950-14 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1047 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *Indonesian Import-Export & Trading Corporation NV* yang berkedudukan di Surabaya.

25 November 1950-18 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1048 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Pasir Kantjana yang berkedudukan di Jakarta.

25 November-20 Desember 1950 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1049 Berkas tentang permohonan pengesahan akta pendirian NV Mliwis yang berkedudukan di Surabaya.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

28 November 1950-26 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1050 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Bintang Asia" yang berkedudukan di Jakarta.

30 November 1950-23 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1051 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij "Djaga Satroe" merk Lam Seng* yang berkedudukan di Cirebon.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

09 Desember 1950-27 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1052 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Percetakan Negara tentang pemuatan iklan (pemberitahuan) dari Pengadilan Negeri Tomohon dalam Berita Negara mengenai hak kepemilikan a.n. Persatuan Dagang Harmsen Verwey dan Dunlop NV, disertai

11 Desember 1950 Asli, pertinggal 4 Lembar

1053 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Heng Hong* yang berkedudukan di Palembang.

14 Desember 1950-27 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1054 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas Perusahaan Listrik Gebeo NV (*Electriciteitmaatschappij Gebeo NV*) yang berkedudukan di Bandung.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

15 Desember 1950-27 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1055 Berkas tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Maskapai Dagang Dinas Otobis dan Perusahaan Pengangkutan Mascot yang berkedudukan di Bandung.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

19 Desember 1950-08 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1056 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Maskapai Dagang *Liem Kiem Ling & Co (Liem Kiem Ling & Co Trading Company NV)* yang berkedudukan di Semarang.

31 Desember 1950-17 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1057 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas Persekutuan Dagang *Sie Tay NV* yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

08 Januari 1951-14 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1058 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Harta Tetap Lim Tjan yang berkedudukan di Jakarta.

> 11 Januari-05 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1059 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jaksa Agung tentang Keputusan Bupati Purbalingga mengenai pemberian izin menjalankan pekerjaan meminjamkan uang.

Nb. Rusak sedang.

12 Januari 1951 Pertinggal 2 Lembar

1060 Berkas tentang pembukuan kapal-kapal untuk daerah Bondowoso dan Surabaya.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

19 Januari-12 Juli 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1061 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perindustrian Pharmasi dan Perikanan Mico yang berkedudukan di Malang.

> 30 Januari-05 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1062 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Maskapai Dagang *Kwong Njan Hin* yang berkedudukan di Jakarta.

31 Januari 1951-05 Febrauri 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

1063 Berkas tentang pengesahan akta pendirian NV Perusahaan Dagang Pendowo Limo (NV Pendowo Limo) yang berkedudukan di Jakarta.

06 Februari-25 Oktober 1951

asli, pertinggal, konsep, fotokopi

1 sampul

1064 Surat dari Notaris R. Kadiman di Jakarta kepada Tata Usaha Berita Negara RI pada Percetakan Negara tentang permintaan pemasangan iklan pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Dagang "Hadji Moenaf" yang berkedudukan di Jakarta.

> 08 Februari 1951 tembusan 1 lembar

1065 Surat-surat tentang izin membuat, menjual, dan menggunakan senjata api.

24 Februari 1951-25 Oktober 1956

pertinggal, asli

1 sampul

1066 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Cultuur My Koebang Kangkoeng* yang berkedudukan di Bandung.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

27 Februari 1951-07 April 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1067 Berkas tentang pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Usaha Bersama (NV Uber) yang berkedudukan di Surabaya.

27 Februari 1951-26 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 1 sampul 1068 Surat dari Mahkamah Agung Indonesia kepada Menteri Kehakiman mengenai permohonan akan mendapatkan rongsokan bekas kapal terbang dan permohonan persetujuan perluasan organisasi.

27 Februari-16 Oktober 1951 asli, pertinggal 1 sampul

1069 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Tjepat yang berkedudukan di Cirebon.

> 14 Maret-21 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1070 Berkas tentang permintaan pendirian perusahaan oleh pegawai-pegawai negeri yaitu NV Perusahaan Pelajaran Majang, NV Persatuan Usaha Ekonomi, dan NV Technis Biro.

Nb. Sebagian rusak sedang.

17 Maret-25 Oktober 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1071 Berkas tentang pengesahan pendirian NV Paberik Tenun Yoen Foh yang berkedudukan di Bandung.Nb. Sebagian rusak berat.

20 Maret 1951-01 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1072 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *South Sea Trading Company NV* yang sebelumnya berkedudukan di Surabaya kemudian pindah ke Jakarta.

29 Maret 1951-04 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1073 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Kian Hoat yang berkedudukan di Telukbetung.

03 April-22 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1074 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *The Suez Trading Company NV* yang berkedudukan di Surabaya.

Nb. Sebagian rusak sedang.

12 April 1951-05 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1075 Berkas tentang permohonan pengesahan anggaran dasar perkumpulan Koperasi Perusahaan Kapur Nasional (Koperasi Pekana) (U.A.) yang berkedudukan di Padang Panjang.

12 April 1951-08 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep 7 lembar

1076 Berkas tentang pembubaran NV Widjaja Kesuma yang berkedudukan di Semarang.

Nb. Lampiran tidak lengkap.

13 April-31 Oktober 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan 9 lembar

1077 Berkas tentang permohonan pengesahan akta pendirian NV Perseroan Dagang dan Industrie Winahjoe yang berkedudukan di Surakarta.

25 April 1951-09 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1078 Berkas tentang permohonan pengesahan akta pendirian NV Pertiss Trading Company yang berkedudukan di Bengkulu. Nb. Lampiran tidak ada.

> 01 Mei-31 Oktober 1951 asli, pertinggal, konsep 4 lembar

1079 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *Indonesian Trading Corporation "Samy" NV* yang berkedudukan di Bandung.

03 Mei-22 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar 1080 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij "Seek An"* yang berkedudukan di Telukbetung.

09 Mei 1951-12 Maret 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

1081 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Veem Dempo yang berkedudukah di Jakarta.

Nb. Sebagian rusak ringan.

11 Mei 1951-18 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1082 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil "Indonesia-China" (Indonesia-China Limited) yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian rusak sedang.

12 Mei 1951-11 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1083 Berkas tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Badan Penerbit "Pedoman" yang berkedudukan di Jakarta.

15 Mei 1951-10 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1084 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil "Ozecu" (Ozecu NV) yang berkedudukan di Jakarta.

17 Mei-23 Oktober 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 5 lembar

1085 Berkas tentang permohonan pengesahan akta pendirian *NV Handel en Industrie Mij Khing Hong* yang berkedudukan di Palembang.

24 Mei 1951-26 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep 7 lembar 1086 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Pustaka dan Penerbit Endang yang berkedudukan di Jakarta.

26 Mei-05 November 1951

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

1087 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Marif yang berkedudukan di Bandung.

01 Juni-17 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1088 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *Handel Maatschappij "Mijtog" NV* yang berkedudukan di Bandung.

01 Juni 1951-25 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1089 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Daben yang berkedudukan di Jakarta.

07 Juni 1951-17 Oktober 1955

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

1090 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Perseroan Dagang Nasional NV ("Perdana" NV) yang berkedudukan di Manado.

12 Juni-10 November 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV
 Perusahaan Mobil International yang berkedudukan di Surabaya.
 Nb. Lampiran tidak lengkap dan sebagian rusak ringan.

14 Juni 1951-24 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1092 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Perseroan Dagang Pantai Buaya NV (*Pantai Buaya Trading Coy Ltd. NV*) (Pabutraco NV) yang berkedudukan di Medan.

18 Juni 1951-25 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1093 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Dewi Sri Sumatera yang berkedudukan di Medan.

19 Juni 1951-06 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1094 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Tjoo Sing yang berkedudukan di Surabaya.

23 Juni 1951-08 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1095 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil Kong Hoa (Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta.

> 25 Juni 1951-07 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1096 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *Tan Shen Trading Coy Ltd. NV* yang berkedudukan di Jakarta.

28 Juni-22 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1097 Surat pemberitahuan dari NV Billiton Maatschappij tentang pencabutan surat kuasa umum a.n. W. Bergmeyer, J.J.H. Nagel, dan R.E. Vaillant serta pemberian kuasa umum kepada H.J. Koppes dengan W. van Slooten dan kuasa khusus kepada W.P.J. van Dooren dengan H.W. Prins untuk pembuatan perjanjian-perjanjian dan penerimaan pembayaran-pembayaran.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

01 Juli 1951 fotokopi 2 lembar

1098 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Hotelbedrijven Indonesia* (NV Hobein) yang berkedudukan di Jakarta.

02 Juli 1951-14 Februari 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1099 Berkas tentang permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Technica* yang berkedudukan di Surabaya.

04 Juli 1951-04 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep 8 lembar

1100 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV South Asiatic Corporation Ltd.* yang berkedudukan di Jakarta.

12 Juli-21 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1101 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Bien Sang Hang yang berkedudukan di Makassar. Nb. Lampiran tidak ada.

> 13 Juli 1951-04 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1102 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Chang Choon Trading Company (Limited)* yang berkedudukan di Surabaya.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan sebagian rusak sedang.

14 Juli 1951-17 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1103 Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta No. 1/M.W. tanggal 17 Juli 1951 tentang pemberian izin kepada Henricus Sawandi untuk menjalankan perusahaan meminjamkan uang (*geldschister*) selama tiga tahun, disertai surat pengantar.

17 Juli 1951 tembusan 2 lembar

1104 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Radjin yang berkedudukan di Palembang.

18 Juli 1951-10 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi

6 lembar

1105 Berkas tentang pengesahan anggaran dasar perkumpulan Gabungan Perusahaan Rokok Sunda Kecil.

Nb. Lampiran tidak ada.

19 Juli-22 Oktober 1951 asli, pertinggal, konsep, tembusan 6 lembar

1106 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil "*Indonesia Asia Company*" yang berkedudukan di Manado.

19 Juli 1951-27 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1107 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kantor Wakil Notaris di Telukbitung tentang pengesahan akta pendirian PT. PARTI NV di Telukbitung.

30 Juli 1951-26 Januari 1952 asli 1 sampul

1108 Berkas tentang pengesahan akta pendirian Maskapai Perkebunan (Cultuur) Industri, Dagang dan Angkutan H.D. "Sukamanah" (I.M.A.) yang berkedudukan di Sukabumi.

02 Agustus 1951-25 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1109 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil Perusahaan Paberik Kaju "Tjisarua" yang berkedudukan di Jakarta.

> 02 Agustus 1951-22 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan dan Fabriek Roti Madju yang berkedudukan di Palembang.
 O6 Agustus 1951-10 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi

1111 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Lompobattang yang berkedudukan di Surabaya.

06 Agustus 1951-18 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1112 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang dan Perindustrian Tay Tong yang berkedudukan di Palembang.

11 Agustus 1951-06 Mei 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1113 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang dan Perindustrian Prajogo (NV Prajogo) yang berkedudukan di Surabaya.

11 Agustus 1951-04 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1114 Berkas tentang permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Penerbitan Percetakan dan Dagang Semarang yang berkedudukan di Semarang.

Nb. Sebagian rusak ringan.

13 Agustus 1951-04 April 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1115 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Toko Jakarta Company* yang berkedudukan di Jakarta.

13 Agustus 1951-29 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1116 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Liong Seng* yang berkedudukan di Semarang.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

15 Agustus 1951-26 Februari 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1117 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Swarha Building Plantation & Trading Corporation Ltd. van het NV Bouw en Handel Maatschappij Soenda yang berkedudukan di Bandung.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

20 Agustus 1951-15 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1118 Tambahan-tambahan Berita Negara RI tahun 1951 Nr. 506-513 tentang pemberitaan, pengesahan anggaran dasar, dan pendirian perseroan-perseroan terbatas antara lain Persekutuan Andil Paberik Minyak Bandung, NV Nederlandsch-Indische Drukkers en Uitgevers Maatschappij (NIDEUM), dll.

20-21 Agustus 1951 fotokopi 1 sampul

1119 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dari perkumpulan *Vereniging van Vreemdelingen-Werknemers in Sumatra* yang berkedudukan di Medan.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

20 Agustus-28 November 1951 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1120 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Bouw Maatschappij Loyens & Volkmaars yang berkedudukan di Jakarta. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

> 23 Agustus 1951-16 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1121 Berkas tentang pengesahan akta pendirian Serikat Dagang dan Perusahaan Seri Budi yang berkedudukan di Malang.

29 Agustus 1951-29 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep 1 sampul 1122 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada *NV Het Warenhuis* mengenai izin untuk menjual senapan angin.

29 Agustus-10 Desember 1951 asli, pertinggal 6 lembar

1123 Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij voorheem Wevery Audit* yang berkedudukan di Bandung.

31 Agustus 1951 konsep 1 lembar

1124 Berkas tentang permohonan pengesahan anggaran dasar *NV Murian Trading Company* yang berkedudukan di Surabaya.

01 September 1951-19 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, fotokopi 1 sampul

Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Perseroan Dagang Terbatas Brantas NV yang berkedudukan di Padang.

03 September-27 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1126 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Pemborongan Pembangunan Borobudur yang berkedudukan di Jakarta.

03 September 1951-12 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1127 Berkas tentang pengesahan akta pendirian M.A.I. Sarintan yang berkedudukan di Pantai Hambawang.

Nb. Sebagian rusak berat.

05 September-19 Oktober 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi, tembusan 1 sampul

1128 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Dagang Kim Hin yang berkedudukan di Jakarta.

06 September-27 Desember 1951

asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1129 Surat-menyurat antara Notaris C. Maathuis di Palembang dengan Menteri kehakiman tentang pengesahan perubahan anggaran dasar *NV Algemeen en Architecten en aannemings Mij. Roelands-Klaasen* yang berkedudukan di Palembang.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

15 September 1951-28 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep 7 lembar

1130 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Sin Nam Hin yang berkedudukan di Jakarta.
Nb. Sebagian rusak sedang.

17 September-25 Oktober 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1131 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Subur yang berkedudukan di Medan.

17 September 1951-08 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1132 Berkas tentang pengesahan akta pendirian *NV Ysfabriek Labuhan Batu* yang berkedudukan di Rantau Prapat

22 September-19 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1133 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Eng Hoo Trading Company Ltd.* yang berkedudukan di Jakarta.

24 September 1951-14 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 9 lembar

1134 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Bouw Maatschappij Henriette yang berkedudukan di Bandung.

26 September-29 November 1951

asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1135 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas P.A. Maskapai Dagang "Setudju" yang berkedudukan di Cirebon.

28 September 1951-25 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1136 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij vh. Sin King en Co* yang berkedudukan di Jakarta.

01 Oktober-19 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1137 Berkas tentang permohonan pengesahan akta pendirian NV Penggilingan Beras "Sidodadi" yang berkedudukan di Banyuwangi.

01 Oktober 1951-09 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1138 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang, Industri dan Perwakilan Djajamulia Limited yang berkedudukan di Jakarta.

> 06 Oktober-19 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1139 Surat penetapan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang penyerahan penguasaan dan pengawasan rumah-rumah sekolah, gedung-gedung dan asrama-asrama milik Perserikatan Sekolah "Dr. Nomensen" yang berada di Tarutung dan Narumonda.

08 Oktober 1951 salinan 3 lembar

1140 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perkebunan dan Perdagangan Setia (NV Setia) yang berkedudukan di Cianjur.

09 Oktober-29 November 1951

asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1141 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil Maskapai Dagang "*Tai Tung Company Indonesia*" Limited yang berkedudukan di Jakarta.

> 13 Oktober 1951-07 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 10 lembar

1142 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Maskapai Perniagaan Tay Lam Siong Hang (*NV Handelmij Tay Lam Siong Hang*) yang berkedudukan di Cirebon.

13 Oktober-19 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1143 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil Maskapai Dagang "*Tai Tung Company Indonesia" Limited* yang berkedudukan di Jakarta.

> 13 Oktober 1951-07 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 10 lembar

1144 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil Maskapai Dagang Bie Sing Kongsie yang berkedudukan di Jakarta.

> 15 Oktober 1951-18 Maret 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1145 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang "Muara" (*Muara Trading Company Ltd.*) yang berkedudukan di Jakarta.

19 Oktober 1951-06 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1146 Berkas tentang pengesahan perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Veem, Ekspedisi dan Pengangkutan "Pagarrujung" yang berkedudukan di Jakarta.

19 Oktober-19 Desember 1951

asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1147 Surat-menyurat antara Notaris H. Soetan Pane Paroehoem di Medan dengan Menteri Kehakiman tentang pengesahan akta pendirian NV Usaha Saudara.

Nb. Lampiran tidak lengkap.

20 Oktober-21 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep 8 lembar

1148 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Handel Mij Pan Kie* yang berkedudukan di Lho Seumawe.

20 Oktober 1951-16 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1149 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Sulawesi Trading Company* atau NV Perusahaan Antero Dagang *Import Export Trading Company* (P.A.D.I.E.) yang berkedudukan di Makassar.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

21 Oktober 1951-20 Oktober 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1150 Surat-menyurat antara Kantor Notaris R. Kadiman di Jakarta dengan Menteri kehakiman tentang permohonan pengesahan atas anggaran dasar perseroan terbatas NV Indonesia Kendaraan Motor (NV Inkenmo) yang berkedudukan di Jakarta.

> 22 Oktober-13 Desember 1951 asli, pertinggal, konsep 4 lembar

1151 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Ibraco NV yang berkedudukan di Bandung.

26 Oktober-20 Desember 1951 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1152 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Jawa Canning Company* yang berkedudukan di Surabaya.

30 Oktober 1951-23 Februari 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1153 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Tiga Sekawan yang berkedudukan di Pekalongan.

01 November 1951-20 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1154 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Kilang Papan Indonesia-Tionghoa (NV Kipinta) yang berkedudukan Di Pangkalan Dodek dekat Tebing Tinggi.

02 November 1951-15 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1155 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *Handel Maatschappij Hoo Sing Liong NV* yang berkedudukan Surabaya dan kemudian pindah ke Semarang.

05 November 1951-20 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1156 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *Handel Mij Ye Gwan Liong NV* yang berkedudukan di Jember dan kemudian pindah ke Semarang.

06 November 1951-26 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1157 Surat dari Pengurus Korps Ahli Imigrasi kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian anggaran dasar dan sambutan dari Ketua Korps Ahli Imigrasi.

08 November 1951 asli, fotokopi 9 lembar

1158 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Cultuur Maatschappij Padabeunghar en Tedja* yang berkedudukan di Jamblang, Cirebon.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

09 November 1951-27 Maret 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1159 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas P.A. Percetakan Wie Mie yang berkedudukan di Jakarta.

15 November 1951-04 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1160 Berkas tentang permohonan pengesahan akta Persekutuan Andil Maskapai Dagang "*Batanghari Trading Company*" (NV Batraco) yang berkedudukan di Jambi.

Nb. Sebagian rusak sedang.

21 November 1951-11 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1161 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang dan Usaha Mendut yang berkedudukan di Medan.

> 22 November 1951-29 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Asia Perusahaan Pekerjaan Kerajinan Karet yang berkedudukan di Medan.

> 22 November 1951-04 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 10 lembar

1163 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Suburbaru Trading Company* yang berkedudukan di Medan.

27 November 1951-15 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1164 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV* Saparua Cigaret Factory and Trading Company yang berkedudukan di Medan.

30 November 1951-10 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1165 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Indonesia Wood Corporation* yang berkedudukan di Semarang.

30 November 1951-04 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1166 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Sin Hap Seng & Import-Export* yang berkedudukan di Gunung Sitoli.

03 Desember 1951-28 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi, tembusan 8 lembar

1167 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas Perusahaan Dagang Sing Bie Kongsi NV yang berkedudukan di Demak.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

04 Desember 1951-25 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1168 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Kota Nopan Trading Company Limited* yang berkedudukan di Medan.

05 Desember1951-15 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

Berkas tentang perpanjangan waktu penjualan saham-saham NV
 Blomkring yang berkedudukan di Bandung.
 Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

09 Desember 1951-06 Agustus 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 7 lembar

1170 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Matahari Film Exchange* yang berkedudukan di Jakarta.

10 Desember 1951-04 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1171 Berkas tentang pengesahan takta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Lam Giok Hoo" yang berkedudukan di Jakarta.

12 Desember 1951-06 Maret 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1172 Berkas tentang *NV Cultuur en Veeteeltmaatschappij Neusoe Oost* yang berkedudukan di Kutaraja yang telah habis masa berlakunya. Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

14 Desember 1951-25 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 10 lembar

1173 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *Perceelen Maatschappij Karangwoelan NV* yang berkedudukan di Semarang.

17 Desember 1951-21 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1174 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Kapo Trading Company Ltd.* yang berkedudukan di Jakarta.

18 Desember 1951-28 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1175 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Serdit* yang berkedudukan di Toli-Toli Selebes Tengah.

Nb. Lampiran tidak lengkap.

18 Desember 1951-04 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1176 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Nam An Kongsi* yang berkedudukan di Medan.

21 Desember 1951-18 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1177 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Tjin Guan Lie* yang berkedudukan di Jakarta.

24 Desember 1951-18 Maret 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

8 lembar

1178 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas Indoswedia NV yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan sebagian Bahasa Belanda.

02 Januari-05 Maret 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, forokopi

1 sampul

1179 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang "Pamitran" yang berkedudukan di Jakarta.

03 Januari-04 Maret 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 9 lembar

1180 Surat dari Menteri kehakiman kepada Kantor Notaris Sie Khwan Djioe di Jakarta tentang permohonan pengesahan akta pendirian *NV Morpheus Goan Tjiang & Co* yang berkedudukan di Jakarta.

08 Januari 1952 pertinggal, konsep 2 lembar

1181 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas *NV Basad Trading Company* yang berkedudukan di Bandung.

09 Januari-18 Maret 1952

asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

1182 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Indonesia yang berkedudukan di Bandung.

09 Januari-15 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi

8 lembar

1183 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang dan Biro Bangunan Tjeremai yang berkedudukan di Bogor.

> 09-20 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi

7 lembar

1184 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Sampagul yang berkedudukan di Padangsidempuan.

09 Januari-14 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1185 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Persekutuan Dagang Bogor yang berkedudukan di Bogor.

10-29 Januari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1186 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Tjin Tjiang yang berkedudukan di Samarinda.

10 Januari-08 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1187 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Putra yang berkedudukan di Cikajang, Garut.

16 Januari-27 Maret 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1188 Surat-menyurat antara S. Brasseur, Direktur *NV Firma Agence Générale* di Jakarta dengan Menteri kehakiman tentang pertanyaan mengenai undang-undang untuk NV Indonesia.

16 Januari-23 Februari 1952 asli, pertinggal, konsep 6 lembar

1189 Surat dari So Bo Soet di Gombong kepada Kementerian Kehakiman tentang permintaan pencabutan izin *NV Gie Yoe* di Prembun.

23 Januari 1952 fotokopi 1 lembar

1190 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Perusahaan Dagang Lian Tjoen NV yang berkedudukan di Jakarta.

24 Januari-20 Februari 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi

1191 Surat-menyurat antara Pimpinan Badan Ekonomi Pedjoang RI di Jakarta dengan Menteri kehakiman tentang permohonan pengesahan sebagai badan hukum untuk Badan Ekonomi Pedjoang RI (B.E.P.R.I.). Nb. Rusak berat.

> 28 Januari-27 Oktober 1952 asli, pertinggal, konsep, salinan 5 lembar

1192 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Thambas yang berkedudukan di Makassar.

09 Februari 1952-03 Desember 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1193 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persatuan Ekonomi Rakyat Kadipaten NV (Perak NV) yang berkedudukan di Kadipaten.

> 12 Februari-13 Maret 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 9 lembar

1194 Surat-menyurat antara Bagian Badan-Badan Hukum Kementerian Kehakiman dengan Kepala Jawatan Koperasi Pusat Kementerian Perekonomian tentang perkumpulan-perkumpulan koperasi Indonesia. Nb. Sebagian rusak ringan.

12 Februari-14 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep 5 lembar

1195 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perbengkelan Nusantara dan perseroan Dagang (NV Nusantara) yang berkedudukan di Jakarta.

16 Februari-18 Maret 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 7 lembar

1196 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Dagang dan Industrie Paätsia yang berkedudukan di Djajak.
19 Februari-15 Maret 1952

asli, konsep, salinan, fotokopi 9 lembar

1197 Surat dari Mr. J. Ph. de Korte, Notaris di Makassar kepada Menteri Kehakiman RI tentang pengesahan perseroan terbatas *NV Sulawesi Motor Company* yang berkedudukan di Makassar.

Nb. Rusak ringan dan sebagian berbahasa Belanda.

20 Februari 1952 asli, salinan 3 lembar

1198 Surat-menyurat antara Kepala Bagian Pelajaran Umum Kementerian Perhubungan dengan Menteri kehakiman tentang pengakuan *Shipping Company Ltd.* yang berkedudukan di Banjarmasin sebagai *rederij*.

23 Februari-08 Maret 1952 asli, pertinggal, konsep 5 lembar

1199 Berkas tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Angkutan "Ubata" yang berkedudukan di Makassar.

27 Februari-15 Maret 1952 asli, konsep, salinan, fotokopi 8 lembar

1200 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Notaris C. Maarhuis tentang pengesahan perubahan anggaran dasar *NV Algemeen en Architecten* di Palembang.

28 Februari 1952 pertinggal 1 lembar

1201 Surat dari Menteri kehakiman kepada Notaris R.M. Winarto di Yogyakarta tentang permintaan akta surat-surat lain tentang NV Motor Import Company (NV M.I.C.) Yogyakarta kepada Notaris, akta tersedia.

> 01 Maret 1952 pertinggal, konsep, salinan 6 lembar

1202 Surat dari Ko Siok Hie di Surabaya kepada Nn. Rochmat di Bagian Hukum Kementerian Kehakiman tentang penetapan Menteri Kehakiman terhadap NV Kalimas yang berkedudukan di Surabaya.

03 Maret 1952 asli, fotokopi 2 lembar

1203 Surat-surat dari Menteri kehakiman kepada N.A. van Altena, Notaris di Jakarta tentang permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Land en TuiNbow onderneming Tjitajam yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Lampiran tidak ada.

05-29 Maret 1952 pertinggal, konsep 8 lembar

1204 Surat penetapan Menteri Kehakiman tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Persekutuan Andil Maskapai Dagang "Tja Bie" yang berkedudukan di Jakarta.

06 Maret 1952 konsep, salinan, fotokopi 5 lembar

1205 Surat dari Menteri kehakiman kepada N.A. van Altena, Notaris di Jakarta tentang permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas NV Bloemenhandel Mevrouw Pesch.
Nb. Lampiran tidak ada.

> 26 Maret 1952 pertinggal, konsep 4 lembar

1206 Berkas mengenai status Koperasi Persatuan Kebun-kebun Getah Rakyat Labuhan Batu U.A.

19 Mei-07 November 1952

asli

1 sampul

1207 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar NV Pembangunan Kebun Aceh yang berkedudukan di Langsa.

18 Desember 1952-05 Oktober 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1208 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas Paberik Es Jakarta NV yang berkedudukan di Blitar.

17 Februari 1953-15 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1209 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas International Agencies NV (Intag NV) yang berkedudukan di Semarang.

> 29 April-20 Juni 1953 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1210 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Staf Angkatan Udara tentang Firma Parlin.

20 Oktober-09 November 1953

asli

1 lembar

1211 Surat dari Presiden Direktur NV Harta Pusaka kepada Menteri Kehakiman tentang Penutupan Pabrik Mesin S "Sumber Mas" Malang.

07 November 1953

asli

1 lembar

1212 Berkas tentang pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas *Sympati Motor NV* yang berkedudukan di Jakarta.

22 Januari 1954-15 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1213 Surat-menyurat antara R. Kodratsamadikoen dengan Kementerian Kehakiman tentang permintaan pemuatan dalam Berita Negara untuk pengumuman mengenai pembubaran perseroan dagang "Toko Betawi" merk Thay Seng di Gorontalo dan pendirian perseroan dagang "Sef Bin Ali Aliamri & Co" di Buko, Sulawesi Utara.

01 Maret 1954 pertinggal, konsep, tembusan 5 lembar

1214 Tambahan Berita Negara RI Nr. 135 tentang pendirian perseroan terbatas *NV Rajat Trading Company Ltd.* yang berkedudukan di Surabaya.

05 Maret 1954 asli 2 lembar

1215 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian Maskapai Andil Indonesia (M.A.I.) "U.P.P.E.R.I." yang berkedudukan di Pinrang.

13 April 1954-09 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1216 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 April 1954 No. 260 tentang pendirian Perhimpunan Koperasi "Koperasi Batik Surakarta W.A." (K.B.S.) yang berkedudukan di Surakarta.

23 April 1954 asli 2 lembar

1217 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Perseroan Dagang, Angkutan, Industri dan Perkebunan Ex Pegawai Perkebuan Sindoro-Sumbing (NV Ex P.P.N. Sindoro-Sumbing) yang berkedudukan di Wonosobo.

Nb. Sebagian rusak sedang.

18 Juni 1954-22 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1218 Tambahan Berita Negara RI tanggal 06 Agustus 1954 No. 474 tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Scheepswerf Antjol* yang berkedudukan di Jakarta.

06 Agustus 1954 asli 1 lembar

1219 Tambahan Berita Negara RI tanggal 06 Agustus 1954 No. 471 tentang pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Tangerang yang berkedudukan di Jakarta.

06 Agustus 1954 asli 2 lembar 1220 Berkas tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Abimanju Trading Company Limited* yang berkedudukan di Jakarta. Nb. Sebagian rusak sedang.

08 Oktober 1954-16 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1221 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang Industrie dan Perkebunan Nusa Baru (NV Nusa Baru) yang berkedudukan di Surabaya.

30 Oktober 1954-22 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1222 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas Perusahaan Dagang Karang Sekar dahulu *Firma Dharma Trading Company* yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Rusak ringan.

27 Desember 1954-20 Oktober 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1223 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas Perseroan Dagang *Import & Export Tjin Lian Tjan NV* yang berkedudukan di Surabaya.

> 14 Januari-21 September 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1224 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Gwan Gwan* yang berkedudukan di Dadapan, Banyuwangi.

20 Januari-19 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1225 Surat dari Menteri Perekonomian kepada Dewan Menteri tentang penutupan perusahaan-perusahaan karena tidak mendapat devisen, disertai surat pengantar.

05 Februari-01 Maret 1955 asli, salinan 2 lembar 1226 Berkas tentang permohonan pengesahan risalah *NV Sigaretten Fabriek Seraju* yang berkedudukan di Semarang.

Nb. Rusak sedang dan sebagian Bahasa Belanda.

10 Februari-26 April 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1227 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang dan Penggergajian Kayu Then Fo Sen yang berkedudukan di Pontianak.

28 Februari-05 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1228 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas Santosa NV yang berkedudukan di Jakarta.

01 Maret-05 Okober 1955 asli, konsep, fotokopi 6 lembar

1229 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas *NV Handel Maatschappij Guan Lie Chan* yang berkedudukan di Medan.

05 April-11 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

1230 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perkebunan Tjimajak, NV Pabrik Tepung Kaspee (*Kaspee Flour Company Limited*), dan NV Pabrik Gula Ponen Baru yang berkedudukan di Semarang.

05 Mei-05 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Badan Perniagaan Merdeka yang berkedudukan di Pemangkat.

13 Mei-20 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1232 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan Koperasi Suluh Perekonomian Rakyat G.A. (Super) yang berkedudukan di Tanjung Pinang.

17 Juni-18 Oktober 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1233 Berkas tentang permohonan pengakuan pendirian Percetakan "Kangaroo" M.A.B. yang berkedudukan di Surakarta.

23 Juni-10 Oktober 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan 8 lembar

1234 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan dan Dagang Bakti yang berkedudukan di Medan.

28 Juni-17 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1235 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas *NV Indonesian Produce Trading Limited* (NV Inpro) yang berkedudukan di Bandung.

Nb. Rusak ringan.

30 Juni-10 Oktober 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1236 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NVP.D. Permega, NV Perseroan Industeri Spartan, dan NV Apotheek Rachmati yang berkedudukan di Medan.

28 Juli-10 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1237 Surat Keputusan Panglima Tentara dan Territorium V/ Brawidjaja tentang ijin NV Borsumy Surabaya untuk mengangkut, menyimpan, dan menggunakan bahan nitrogen cellulose sebagai bahan pelekat kulit untuk pabrik kulit di Kraton-Pasuruan.

09 Juli 1955 tembusan 1 lembar 1238 Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Juli 1955 No. 653 tentang penetapan anggaran dasar *Handel en Industrie Maatschappij "Jawa Baroe NV"* yang berkedudukan di Surabaya.

12 Juli 1955 fotokopi 2 lembar

1239 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Kantor Tata Usaha Peterongan yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

12 Juli-25 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1240 Berkas tentang likuidasi *NV Cultuur Mij.* Tempur Sewu yang berkedudukan di Jakarta dengan likuidator Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

13 Juli 1955-31 Desember 1959 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1241 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Import Bahan Industrie dan Pembangunan yang berkedudukan di Jakarta.

15 Juli-05 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1242 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Penerbit "Pantjawarna" yang berkedudukan di Surakarta. Nb. Sebagian rusak sedang.

> 18 Juli-10 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1243 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas Perusahaan Pharmasi dan Kimia Kazani (PT Kazani) yang berkedudukan di Jakarta.

> 18 Juli-11 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

1244 Tambahan Berita Negara RI Nr. 776 tentang pernyataan keputusan rapat *NV Selatpandjang Trading Coy.* yang berkedudukan di Jakarta.

05 Agustus 1955 fotokopi 2 lembar

1245 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas Perusahaan Penerbitan Percetakan dan Perdagangan "Irrasco" NV yang berkedudukan di Jakarta.

08 Agustus-05 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1246 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas *NV*Savitra Industrial Company Limited dan *NV Erikemmy Industrial*Company Limited yang berkedudukan di Semarang.

11 Agustus-12 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1247 Berkas tentang pengakuan sebagai badan hukum untuk perkumpulan Koperasi Pedagang-Pedagang Indonesia U.A. yang berkedudukan di Medan.

Nb. Sebagian rusak ringan.

12 Agustus-11 November 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1248 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Kantor Securitas yang berkedudukan di Jakarta.

> 14 Agustus-12 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 6 lembar

1249 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Dagang & Industri Trisila (NV Trisila) yang berkedudukan di Surabaya.

> 16 Agustus-05 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1250 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Perusahaan Penggilingan Karet "Kota Bumi" yang berkedudukan di Palembang.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda.

20 Agustus-04 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1251 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas *NV Piano Assembling Factory Djokolioe* yang berkedudukan di Jakarta.

26 Agustus-10 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1252 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Gabungan Pemborong Indonesia (G.A.P.I.) yang berkedudukan di Bandung.

> 30 Agustus-05 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1253 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang dan Industri Wan Tjhiang yang berkedudukan di Surabaya.

> 30 Agustus-05 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1254 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Sayuran dan Buah-Buahan Indonesia (NV Sabin) yang berkedudukan di Malang.

Nb. Sebagian rusak sedang.

01 September-05 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1255 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Pustaka Hwa Chiaw yang berkedudukan di Medan. Nb. Rusak ringan.

> 08 September-07 Desember 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1256 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Kolff's Offset Drukkerij* yang berkedudukan di Jakarta. Nb. Lampiran tidak lengkap.

14 September-17 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 5 lembar

1257 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas Perusahaan Veem Nasional "Masa Veem NV" yang berkedudukan di Samarinda.

15 September-24 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1258 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Dagang dan Perindustrian "Harta" yang berkedudukan di Jakarta.

> 15 September-05 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1259 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Perindustrian Dimita (*Dimita Moulding Industries Limited*) yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian rusak berat.

15 September-05 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1260 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Pioga Veem yang berkedudukan di Jakarta.
Nb. Sebagian rusak ringan.

15 September-05 Oktober 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1261 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Pembangunan Djati yang berkedudukan di Jakarta.

16 September-03 Desember 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1262 Surat Keputusan Kepala Jawatan Hubungan Perburuhan tentang pendaftaran Serikat Buruh Daerah Autonom (SEBDA) yang berkedudukan di Semarang.

Nb. Rusak ringan.

21 September 1955 salinan 1 lembar

1263 Surat Keputusan Presiden tanggal 30 Mei 1955 tentang pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan No. 12 tahun 1954 tentang pengambilan batu, kerikil dan pasir di perairan umum, disertai surat pengantar.

> 23 September-13 Oktober 1955 fotokopi 8 lembar

1264 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Direktur Kabinet Presiden RI tentang penyampaian surat permohonan H.M. Said mengenai pembentukan Biro Pemberantasan Penderitaan Rakjat-Djelata.
Nb. Rusak sedang.

23 September 1955 asli, pertinggal, konsep 4 lembar

1265 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perseroan Dagang dan Industri "Tjibaliung" yang berkedudukan di Rangkasbitung.

> 26 September-05 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1266 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas Biro Arsitek-Insinjur dan Anemer "Djayatama" yang berkedudukan di Surabaya.

Nb. Sebagian rusak sedang.

26 September-05 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul 1267 Surat dari R.M. Soeprapto, notaris di Semarang kepada Menteri Kehakiman tentang permohonan pengesahan risalah *NV Sigaret Tenfabriek Serajoe*.

Nb. Lampiran tidak ada.

27 September 1955 asli 1 lembar

1268 Surat penetapan Menteri Kehakiman tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Perindustrian Dimita (*Dimita Moulding Industries Limited*) yang berkedudukan di Jakarta. Nb. Rusak ringan.

05 Oktober 1955 salinan 1 lembar

1269 Surat-menyurat antara Koperasi Pelajaran Indonesia Sulawesi di Tegal dengan Kementerian Kehakiman tentang pengakuan Koperasi Pelajaran Indonesia Sulawesi "Kopis" sebagai badan hukum.

10 Oktober 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan 6 lembar

1270 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Handel en Industrie Maatschappij Branta-Sena* yang berkedudukan di Semarang.

13 Oktober-29 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1271 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NV Pabriek Rokok Seraju yang berkedudukan di Semarang. Nb. Sebagian rusak berat.

> 18 Oktober 1955 konsep, salinan, fotokopi 4 lembar

1272 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perindustrian dan Perdagangan Makarsad (Makarsad NV) yang berkedudukan di Jakarta.

21 Oktober-29 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi

1 sampul

1273 Berkas tentang pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas *NV Cultuur Maatschappij* "Bukit Lawang" yang berkedudukan di Jakarta.

Nb. Sebagian rusak sedang dan lengket.

02-19 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1274 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas Perseroan Dagang Serangkai NV yang berkedudukan di Medan. Nb. Sebagian rusak ringan.

> 04-24 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1275 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas PT Perusahaan Dagang, Expeditie dan Veem, dan Industri "Kamang" (Kamang Ltd.) yang berkedudukan di Jakarta.

05 November-08 Desember 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1276 Berkas tentang pengesahan naskah pendirian perseroan terbatas NV Perusahaan Industri, Perdagangan dan Pemborongan "Favoriet" (NV Favoriet) yang berkedudukan di Bandung.

09-14 November 1955 asli, konsep, salinan, fotokopi 1 sampul

1277 Surat-surat dari *Maclaine*, *Watson & Co. NV* tentang permintaan petikan peraturan tentang membawa senjata api dari luar negeri ke Indonesia.

Nb. Sebagian Bahasa Belanda dan Inggris.

14 November 1955 asli, salinan 10 lembar

1278 Berkas tentang pembukuan sehubungan dengan likuidasi badan-badan hukum.

15 Mei-10 November 1956

asli

1 sampul

1279 Berkas tentang tinjauan terhadap perkembangan PT (NV) dalam tahun 1950-1955.

Nb. Lampiran tidak lengkap dan sebagian Bahasa Belanda.

04 Juni 1956 konsep, fotokopi 1 sampul

1280 Surat dari *Nederlandsche Handel Maatschappij NV* di Amsterdam kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian laporan mengenai keadaan perseroan dan tindakan-tindakan yang dilakukan tahun 1956 beserta neraca dan perhitungan laba-rugi.

Nb. Lampiran tidak ada.

07 Mei 1957 asli 1 lembar

1281 Kumpulan Tambahan Berita Negara RI tanggal 28 Juni-23 Juli 1957 No. 711-786 tentang perseroan terbatas, perseroan-perseroan firma atau komanditer dan perkumpulan-perkumpulan koperasi a.n. Perusahaan Dagang dan Industri NV Geati, *NV Tai Tong Trading Co.*, dll.

28 Juni-23 Juli 1957 asli 1 jilid

1282 Surat-surat dari W.B.F.H. Alling di Ende kepada Menteri Kehakiman tentang penyampaian berkas untuk pengesahan pendirian perseroan terbatas PT Damai, NV Himpunan Saudara, dan PT Tertib. Nb. Lampiran tidak ada.

12 April 1958 asli 3 lembar

1283 Tambahan Berita Negara RI tanggal 22 November 1960 No. 749 tentang perubahan anggaran dasar PT Visok Veem yang berkedudukan di Semarang.

22 November 1960 fotokopi 1 lembar 1284 Tambahan Berita-Negara No. 56 tentang Perseroan Terbatas PT Bintang Tunggal.

14 Juli 1961 fotokopi 1 lembar

## Yayasan

1285 Berkas tentang permohonan pengesahan akta anggaran dasar *Stichting Nederlandse Schoolvereniging* Bangka yang berkedudukan di Pangkalpinang.

Nb. Lampiran tidak ada.

20 Agustus 1951-21 Januari 1952 asli, pertinggal, konsep 4 lembar

1286 Berkas tentang permintaan pemberian hak milik atas tanah kepada Yayasan Dharma Siswa Madura dan Yayasan Perumahan Madura.

06 Agustus 1952-24 November 1955 asli, pertinggal, konsep 1 sampul

1287 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Pengurus Yayasan Hatta di Jakarta tentang permintaan pengiriman anggaran yayasan kepada Tata Usaha Berita Negara.

23 Juli 1953 pertinggal 2 lembar

1288 Surat-meyurat antara Notaris R.M. Wiranto dengan Menteri Kehakiman tentang penafsiran Rancangan Undang-Undang mengenai Yayasan.

20 Maret-07 April 1954 asli, pertinggal 10 lembar

1289 Surat-menyurat antara pengurus Yayasan Kebaktian Pedjuang Daerah Bali dengan Kementerian Kehakiman tentang permohonan pengesahan Yayasan Kebaktian Pedjuang Daerah Bali sebagai badan hukum.

> 02-27 September 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan 1 sampul

1290 Surat-menyurat antara Sekretaris Umum Yayasan "Satria" di Jakarta dengan Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman tentang pengesahan Yayasan "Satria", disertai lampiran salinan akta (notaris) pengesahan Yayasan "Satria".

12-24 September 1955 asli, pertinggal, konsep, salinan 8 lembar

1291 Surat-menyurat antara Ketua Yayasan Urusan Harta Peninggalan di Banyuwangi dengan Kementerian Kehakiman tentang permohonan izin pendirian Yayasan Urusan Harta Peninggalan di Banyuwangi. Nb. Lampiran tidak ada.

> 15-29 November 1955 asli, konsep 3 lembar